



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran (TA) 2023 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023.

Laporan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi Laporan Keuangan disajikan agar pengguna mengetahui mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Posisi keuangan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama TA 2023.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 9);



- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 4);
- t. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 368 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 368); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 368 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 34);
- u. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 277 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan TA 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 277); dan
- v. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 278 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan TA 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 278).

Berdasarkan perundang-undangan di atas Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 berupa Laporan Keuangan TA 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan penyusunan keuangan disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan
- 2.4. Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
- 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambatan Pencapaian Kinerja

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program

- 4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program
- 4.2. Faktor Pendukung dan Penghambatan Pencapaian Kinerja



Bab V Kebijakan Akuntansi

- 5.1. Entitas Pelaporan
- 5.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan Pos - pos Laporan Keuangan

- 6.1. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 6.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP.SAL)
- 6.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 6.4. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional (LO)
- 6.5. Penjelasan Pos - Pos Laporan Arus Kas (LAK)
- 6.6. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 6.7. Hal – Hal Lain terkait Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022.
- 6.8. Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Bab VII Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro daerah disajikan untuk mengetahui dan memahami perekonomian Kabupaten Kuningan yang menjadi reflektor kinerja pembangunan. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Kuningan Tahun 2021 s.d. 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1.1 Relatif Terjaganya Stabilitas Ekonomi Dengan Baik

Salah satu variabel penting dalam mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah adalah menggunakan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Untuk mengukur besarnya LPE dapat diukur dari perkembangan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. Selain itu, PDRB juga menginformasikan struktur perekonomian daerah, yaitu kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro.

Pendapatan perkapita merupakan gambaran daya beli masyarakat atau rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk yang berasal dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraannya bertambah baik. Sebaliknya penurunan pendapatan perkapita berarti tingkat kesejahteraannya semakin menurun. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Sedangkan untuk menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah dapat diamati dengan pertumbuhan PDRB per kapita. Meningkatnya PDRB per kapita yang diterima penduduk, maka daya beli masyarakat akan bertambah, sehingga kebutuhan rumah tangganya terhadap barang dan jasa akan terpenuhi. Kebutuhan yang diikuti daya beli, akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total *output* produksi barang dan jasa tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan PDRB Kabupaten Kuningan sejak Tahun 2021 s.d. Tahun 2023 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Kuningan Tahun 2021 s.d. 2023

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2020	21,996*	14,495*
2021	22,805**	14,812**
2022	24,682***	15,426***
2023	24,682***	15,426***

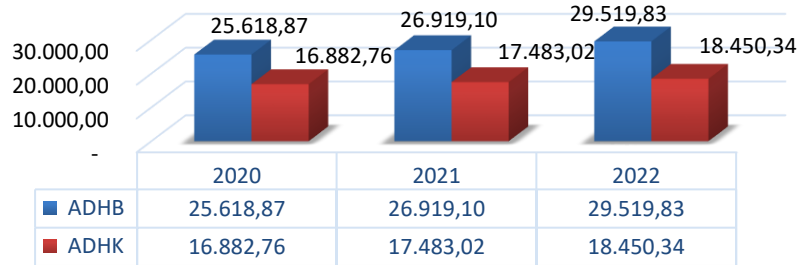
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan

Ket : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara



Perkembangan PDRB Kabupaten Kuningan untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 ditampilkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut :

Grafik 1
Perkembangan PDRB Kabupaten Kuningan
Tahun 2021 s.d. 2023



Untuk melihat perkembangan perekonomian di Kabupaten Kuningan kurun waktu Tahun 2021 s.d. Tahun 2023 disajikan pada Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan, sebagai berikut:

Tabel 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kuningan
Tahun 2021 s.d. 2023

Tahun	Pendapatan Perkapita	Pertumbuhan PDRB Perkapita	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
2020	22,00	-4,99%	0,11%
2021	22,81	3,68%	3,56%
2022	24,68	8,21%	5,53%
2023	27,08	9,08%	5,24%

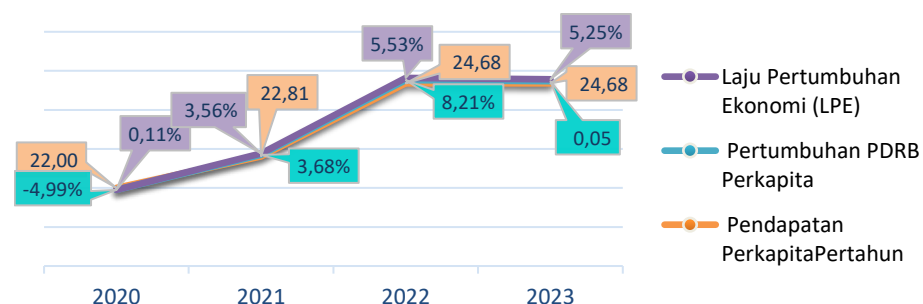
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan

Ket : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Dari Tabel di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan khususnya nilai Pendapatan Per Kapitan dan Pertumbuhan PDRB dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terlihat mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Hanya di nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi yang mengalami sedikit penurunan antara tahun 2022 dengan tahun 2023 sebesar 0,29%.

LPE Kabupaten Kuningan untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 ditampilkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Grafik 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan
Tahun 2021 s.d. 2023





2.1.2 Kemampuan Ekonomi Untuk Memperluas Lapangan Pekerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan orang yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja adalah kelompok penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator untuk melihat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pada Tahun 2023 tercatat TPAK penduduk Kabupaten Kuningan telah mencapai 61,95%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi kenaikan keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, yang pada Tahun 2022 TPAK penduduk Kabupaten Kuningan sekitar 61,80%.

Untuk melihat Pengangguran yaitu orang yang masuk Angkatan Kerja (15 s.d. 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya digunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Tahun 2023 TPT penduduk Kabupaten Kuningan mencapai 9,49 persen, mengalami penurunan sebesar 0,32 persen bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2022. Semakin turun persentase TPT mengindikasikan semakin baik keadaan ketenagakerjaan seiring dengan penguatan ekonomi.

Dari sisi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dari 90,19 persen pada Tahun 2022 menjadi 90,51 persen Tahun 2023. Hal ini menunjukkan penyerapan Angkatan Kerja yang mengalami kenaikan sebesar 0,32 persen.

Tabel 3
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas, Angkatan Kerja,
Bekerja, Mencari Kerja,TPAK, TPT, dan TKK
di Kabupaten Kuningan,
Tahun 2021 – 2023

Indikator	2021			2022			2023		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Penduduk Usia 15 tahun keatas	423.406	427.146	850.552	427.511	431.450	858.961	467.515	459.271	926.786
Angkatan Kerja	348.835	193.947	542.782	346.836	183.989	530.825	382.883	191.286	574.169
Bekerja	309.240	170.165	479.405	308.114	170.636	478.750	345.408	174.250	519.658
Mencari Kerja	39.595	23.782	63.377	38.722	13.353	52.075	37.475	17.036	54.511
Bukan Angkatan Kerja	74.571	233.199	307.770	80.675	247.461	328.136	84.632	267.985	352.617
Sekolah	26.952	26.631	53.583	31.222	26.974	58.196	38.397	35.458	73.855
Mengurus RT	7.335	185.758	193.093	11.901	204.497	216.398	16.349	223.268	239.617
Lainnya	40.284	20.810	61.094	37.552	15.990	53.542	29.886	9.259	39.145
TPAK			63,82			61,80			61,95
TPT			11,68			9,81			9,49
TKK			88,32			90,19			90,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kuningan

Tren meningkatnya tingkat pengangguran dari tahun ketahun akan berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Kuningan. Di bidang ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang.



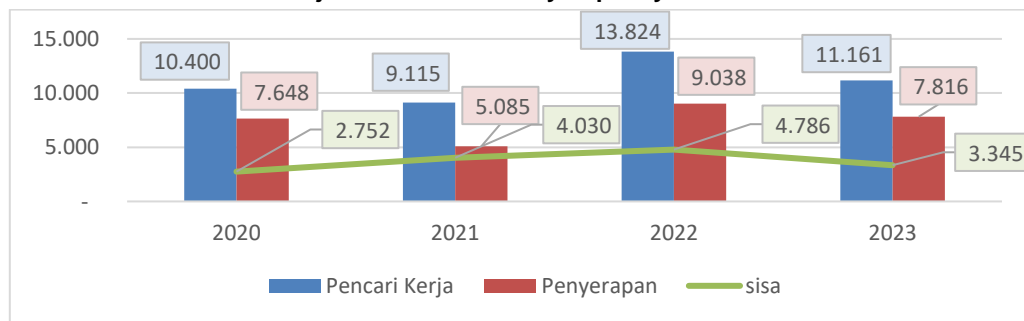
Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Selain itu pengangguran akan menyebabkan meningkatkan kemiskinan, kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pakaian dan lain-lain. Selain dampaknya terhadap perekonomian, pengangguran juga berdampak pada kehidupan sosial yaitu meningkatnya tingkat kriminalitas.

Tabel 4
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penyerapannya
Tahun 2020 s.d. 2023

Tahun	Pencari Kerja			Penyerapan			Sisa		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
2020	4.876	5.524	10.400	2.922	4.726	7.648	2.427	325	2.752
2021	4.277	4.838	9.115	2.851	2.234	5.085	1.831	2.199	4.030
2022	6.706	7.118	13.824	3.941	5.097	9.038	2.843	1.943	4.786
2023	4.969	6.192	11.161	2.136	5.680	7.816	2.833	512	3.345
Jumlah	20.828	23.672	44.500	11.850	17.737	29.587	9.934	4.979	14.913

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Kuningan

Grafik 3
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penyerapannya Tahun 2020 s.d. 2023



2.1.3 Tingkat Perubahan Harga (Inflasi)

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terkait dengan agregat makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan distribusi pendapatan. Inflasi dapat tercermin dari fluktuasi pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dalam konteks regional dipengaruhi kenaikan harga bahan pangan akibat gagal panen dari daerah pemasok pangan, tidak lancarnya distribusi pangan sehingga meningkatkan biaya perjalanan serta biaya risiko spekulasi pasar. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

Pada Desember 2023, Terdapat tujuh Kota di Jawa Barat terjadi Inflasi *year on year* (y-on-y) sebesar 2,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 117,96, Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Bogor sebesar 3,36 persen dengan IHK sebesar 119,42 dan terendah terjadi di Kota Bandung sebesar 0,63 persen dengan IHK sebesar 116,16.

Di wilayah III Cirebon, untuk melihat gambaran inflasi kabupaten sekitar biasanya menggunakan data inflasi Kota Cirebon. Pada Tahun 2023, Inflasi Kota Cirebon adalah 3,32 persen. Angka inflasi tersebut berada di atas Inflasi Jawa Barat dan Nasional pada tahun yang sama yaitu masing-masing 2,48 persen dan 2,57 persen.



Tabel 5
Perbandingan Perkembangan Inflasi Tahun 2021 s.d. 2023

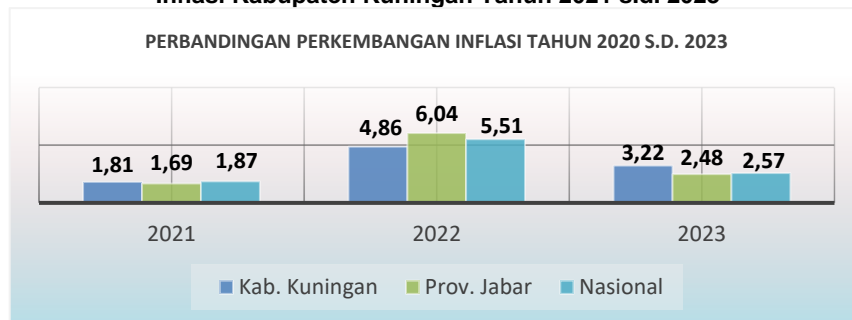
Tahun	Kab. Kuningan	Prov. Jabar	Nasional
2021	1.81	1.69	1.87
2022	4.86	6.04	5.51
2023*	3,22	2,48	2,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

* Angka Sementara

Perbandingan perkembangan inflasi Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan nasional dapat digambarkan sebagaimana grafik di bawah ini:

Grafik 4
Inflasi Kabupaten Kuningan Tahun 2021 s.d. 2023

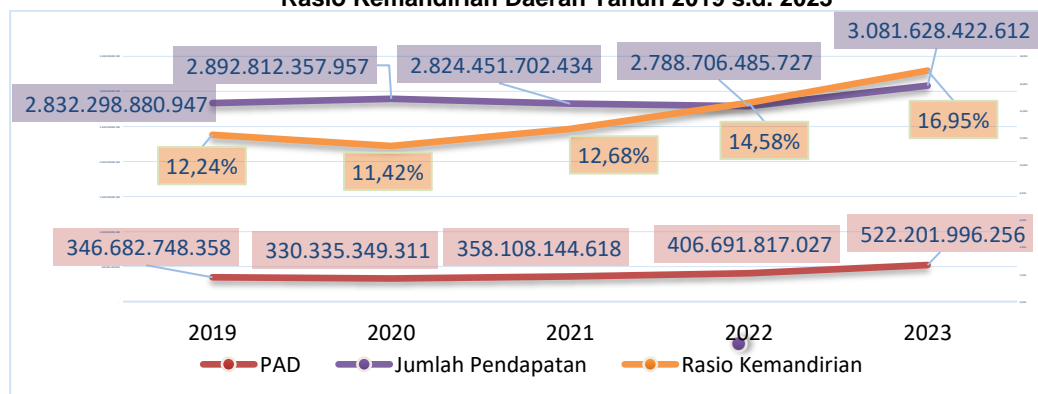


Berdasarkan Grafik 4 diatas terlihat bahwa Inflasi di Kabupaten Kuningan kurun waktu 2021 s.d. 2023 relatif tinggi dibandingkan dengan Inflasi Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

Tabel 6
Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2019 s.d. 2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2019	346.682.748.358,00	2.832.298.880.947,00	12,24%
2020	330.335.349.311,00	2.892.812.357.957,00	11,42%
2021	358.108.144.618,00	2.824.451.702.434,00	12,68%
2022	406.691.817.027,00	2.788.706.485.727,00	14,58%
2023	522.201.996.256,00	3.081.628.422.612,00	16,95%

Grafik 5
Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2019 s.d. 2023



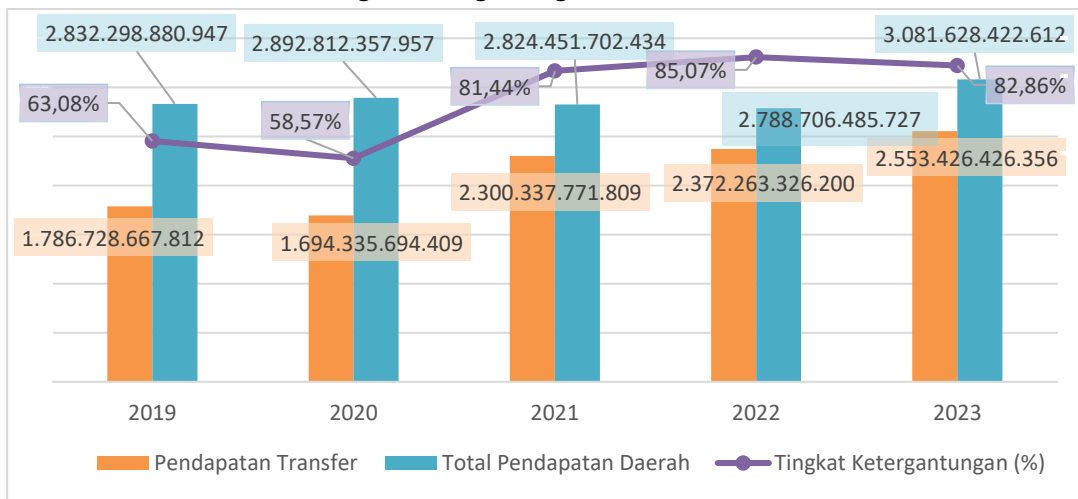
Sedangkan untuk melihat secara rinci Tingkat Ketergantungan Daerah ditampilkan pada Tabel 7 dan Grafik 6 berikut ini.



Tabel 7
Tingkat Ketergantungan Daerah Tahun 2019 s/d 2023

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Tingkat Ketergantungan (%)
2019	1.786.728.667.812,00	2.832.298.880.947,00	63,08%
2020	1.694.335.694.409,00	2.892.812.357.957,00	58,57%
2021	2.300.337.771.809,00	2.824.451.702.434,00	81,44%
2022	2.372.268.326.200,00	2.788.706.485.727,00	85,07%
2023	2.553.426.426.356,00	3.081.628.422.612,00	82,86%

Grafik 6
Tingkat Ketergantungan Daerah Tahun 2019 s.d. 2023



2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi Pembiayaan Daerah.

2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Upaya peningkatan, perluasan basis PAD dan mengupayakan optimalisasi dana perimbangan agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional, maka diperlukan peningkatan dalam hal pengawasan, koordinasi dan upaya penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Langkah-langkah yang ditempuh untuk optimalisasi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi target PAD perlu ditempuh melalui langkah-langkah prioritas sebagai berikut:
 - 1) Pemantapan kelembagaan dan peningkatan operasional pemungutan Pendapatan Daerah;
 - 2) Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi;



- 3) Peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan profesionalisme pegawai dalam pemungutan Pendapatan;
 - 4) Peningkatan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi Pendapatan Daerah;
 - 5) Pengembangan kerjasama baik dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah maupun pengelolaan Aset Daerah;
 - 6) Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - 7) Peningkatan penegakan peraturan daerah yang mengatur Pendapatan Daerah.
- b. Mendorong upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, serta Bagi Hasil Pajak dari Pusat dan Provinsi;
 - c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan;
 - d. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang disebut sebagai *mandatory spending*.

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian <i>Mandatory Spending</i>	Total APBD/APBD diluar Gaji/DTU/Dana Perimbangan (Rp)	% Alokasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
				(Rp)	(Rp)	
1	Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Pada Tahun 2023 Anggaran Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar 35,57% melebihi alokasi belanja wajib Pendidikan	3.022.516.285.984,00	35,57	1.075.023.983.586,00	985.990.090.550,00	91,72
2	Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar Gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Sebesar 20,84% dari Total APBD 2022 di luar Gaji telah dianggarkan untuk kegiatan di Bidang Kesehatan	2.242.835.831.237,00	20,84	467.319.714.799,00	355.332.677.757,00	76,04
3	Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Tahun 2023 telah menganggarkan 50,05% dari Dana Transfer Umum.	889.305.092.633,00	50,05	445.115.990.397,00	314.603.743.542,00	70,68



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian <i>Mandatory Spending</i>	Total APBD/APBD diluar Gaji/DTU/Dana Perimbangan (Rp)	% Alokasi	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
				(Rp)	(Rp)	
4	Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Untuk TA 2023 Alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar Rp125.640.000.000,00 atau sebesar 10,37% dari Dana Perimbangan yang dianggarkan akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.	1.211.069.683.680,00	10,37	125.640.000.000,00	125.603.352.750,00	99,97

Selanjutnya, Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan berpedoman pada Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Regional.

Berkaitan dengan itu, Belanja Daerah tersebut juga harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud, ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan penganggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Upaya tersebut antara lain adalah :



- a. Pengalokasian belanja kegiatan sebagian besar diupayakan kepada kepentingan publik.
- b. Pengalokasian belanja diupayakan agar adanya pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah.
- c. Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan dilaksanakan secara efisien dan efektif, serta memiliki manfaat jangka panjang.
- d. Alokasi belanja berpedoman kepada ketentuan-ketentuan pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat secara sinergis.
- e. Pengalokasian anggaran belanja langsung urusan (Program dan Kegiatan) efektif untuk memenuhi kebutuhan publik.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan penerimaan pinjaman daerah apabila diperlukan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada TA yang bersangkutan maupun pada TA berikutnya, mencakup penyertaan modal (investasi) dan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan ditempuh Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui kebijakan penggunaannya yaitu:

- a. Penyertaan modal kepada PDAM Kuningan;
- b. Pembentukan dana cadangan dalam rangka persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- c. Lain-lain pengeluaran pembiayaan yang dianggap perlu sepanjang pengeluaran tersebut akan berdampak menambah aset daerah.

Dalam pelaksanaan proses pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan menggunakan dua aplikasi pengelolaan keuangan daerah, serta beberapa aplikasi pendukung. Aplikasi tersebut ada yang bersifat wajib digunakan maupun yang bersifat pendamping.

Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersifat wajib digunakan adalah aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Aplikasi ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini digunakan dengan tujuan penggunaan satu aplikasi secara nasional yakni mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan. Aplikasi ini wajib digunakan mulai dari Tahun 2021. Namun sejak awal penggunaan sampai dengan saat ini, aplikasi SIPD masih memerlukan penyempurnaan. Sehingga



penggunaan aplikasi SIPD tersebut menjadi tidak optimal dan malah menjadi salah satu penghambat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pada awal penggunaan SIPD, yaitu pada triwulan ke-4 Tahun 2020, untuk proses penginputan data perencanaan dan penganggaran TA 2021. Namun banyak kendala yang dihadapi antara lain, keterbatasan sosialisasi penggunaan SIPD yang tidak mendatangkan langsung tenaga ahli penyedia aplikasi. Selain itu belum lengkapnya kode kegiatan dan kode akun belanja yang menyebabkan banyaknya penganggaran belanja yang kurang sesuai dengan peruntukan belanja dimaksud, serta tidak adanya *helpdesk* dari pihak penyedia aplikasi. Sehingga hal tersebut membuat kurang lancarnya dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD TA 2021.

Kemudian pada awal pelaksanaan APBD TA 2021 yakni pada tahap penatausahaan SIPD tidak dapat digunakan dikarenakan untuk menu penatausahaan terdapat kekeliruan *system (error)*. Salah satunya adalah tidak dapat menerbitkan SPP, SPM dan SP2D. Hal ini menyebabkan tertundanya pembayaran gaji bulan Januari selama beberapa hari. Selain itu masih banyak menu lainnya pada aplikasi SIPD yang belum berfungsi. Sehingga atas keluhan tersebut, pihak Kementerian Dalam Negeri memberikan kebijakan bahwa aplikasi SIPD tidak digunakan sebagai aplikasi pengelolaan keuangan utama, tetapi bersifat perekaman. Atas dasar hal tersebut, maka pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kuningan memutuskan menggunakan aplikasi lain untuk proses pengelolaan keuangan daerah yakni aplikasi SIPKD90. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi SIPKD yang telah digunakan sebelumnya dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, sehingga dinamakan SIPKD90.

Selanjutnya pada TA 2022, aplikasi SIPD yang disediakan oleh Kemendagri telah mengalami perbaikan menu dan dapat digunakan sebagai aplikasi utama. Namun meski demikian masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti SIPD masih belum bisa menghasilkan SPJ Fungsional dan masih belum berfungsinya menu pelaporan. Sehingga pada TA 2022 SIPD digunakan hanya sampai dengan proses penatausahaan yakni sampai dengan terbitnya SP2D. Sedangkan untuk proses selanjutnya sampai dengan pelaporan, Pemerintah Kabupaten Kuningan menggunakan aplikasi SIPKD90.

Terdapat kemajuan dalam aplikasi SIPD pada Tahun 2023. Yaitu menu pelaporan telah tersedia dan dapat digunakan. Namun dikarenakan pada proses penatausahaan masih belum sempurna, maka nilai transaksi yang termuat dalam menu laporan pun belum seluruhnya akurat. Sehingga meskipun telah terdapat menu pelaporan, aplikasi SIPD belum dapat digunakan sebagai aplikasi keuangan yang utama.

Kelemahan lain dari aplikasi SIPD yakni belum bisa terintegrasi dengan aplikasi lain utamanya dengan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) milik Kementerian Keuangan. Sedangkan SIKD merupakan aplikasi yang digunakan Kementerian Keuangan untuk menerima laporan realisasi bulanan dari pemerintah daerah yang dapat berimplikasi terhadap penyaluran DAU. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan aplikasi SIPKD90 untuk mengirimkan laporan realisasi bulanan secara terintegrasi ke SIKD.



Sampai dengan akhir Tahun 2023 dan sampai saat laporan keuangan TA 2023 dibuat, aplikasi SIPD belum dapat berfungsi secara utuh. Aplikasi SIPD hanya bisa menghasilkan output berupa SP2D, dan hal tersebut juga masih banyak hambatan-hambatan lain seperti jaringan *error* sehingga mengakibatkan keterlambatan penerbitan SP2D. Untuk menu pelaporan sudah tersedia, tetapi nilai realisasinya belum sesuai dengan input nilai belanja (SPJ). Selain itu belum adanya sosialisasi penggunaan menu pelaporan.

Aplikasi lain yang digunakan Pemerintah Kabupaten Kuningan berkaitan dengan proses pengelolaan Keuangan daerah selain SIPKD90 antara lain Atisibada yakni aplikasi pengelolaan aset, Simpad yaitu aplikasi Pendapatan, dan aplikasi retribusi, aplikasi barjas dan aplikasi lainnya.

2.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan

Kebijakan keuangan daerah dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk TA 2023 dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan TA 2023 tanggal 27 Desember 2022, dan yang ke dua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan TA 2023 tanggal 30 Oktober 2023.

APBD TA 2023 telah dilakukan perubahan penjabaran sebanyak dua kali, yaitu dengan:

- a. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan TA 2023 pada tanggal 30 Januari 2023. Hal ini dilakukan karena Kabupaten Kuningan mendapat penambahan pagu anggaran dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Daerah mendapat penambahan Rp233.148.089.500,00
 - 2) Belanja Daerah mendapat penambahan Rp233.148.089.500,00
 - a) Belanja Operasional mendapat penambahan Rp8.983.018.431,00 setelah mendapat perubahan dari nilai semula Rp2.050.556.616.056,00 menjadi 2.059.539.634.487,00;
 - b) Belanja Modal mendapat penambahan Rp181.177.292.283,00 setelah mendapat perubahan dari nilai semula Rp290.731.764.740,00 menjadi Rp471.909.057.023,00;
 - c) Belanja Tidak Terduga mendapat penambahan Rp5.485.912.163,00 setelah mendapat perubahan dari nilai semula Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp15.485.912.163,00; dan
 - d) Belanja Transfer berkurang sebesar Rp.110.000.000,00 setelah mendapat perubahan dari nilai semula Rp474.983.763.424,00 menjadi Rp474.873.763.424,00.
- b. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 368 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan TA 2023 pada tanggal 17 Februari 2023. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman ke PT. Bank Jabar dan Banten, Tbk untuk menyelesaikan kegiatan Tahun 2022 yang belum



terbayar, sehingga menyebabkan Penerimaan Pembiayaan Daerah bertambah menjadi sebesar Rp.60.000.000.000,00.

Tabel 8
Indikator Kinerja Fiskal Daerah TA 2023

Uraian	Perubahan APBD TA 2023 (Rp)				Bertambah/Berkurang	
	I	II	III	IV	(Rp.)	(%)
I. Pendapatan Daerah	2.852.772.144.220	2.978.308.367.097	2.978.308.367.097	3.081.628.422.612	228.856.278.392	7%
1.1 PAD	581.176.795.203	473.564.928.580	473.564.928.580	522.201.996.256	(58.974.798.947)	(11%)
1.2 Pendapatan Transfer	2.265.595.349.017	2.498.743.438.517	2.498.743.438.517	2.553.426.426.356	287.831.077.339	11%
1.3 Lain-lainnya Pendapatan yg Sah	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	-	0%
II. Belanja Daerah	2.826.272.144.220	3.021.808.367.097	3.021.808.367.097	3.107.960.488.660	281.688.344.440	9%
2.1 Belanja Operasi	2.050.556.616.056	2.059.539.634.487	2.059.539.634.487	2.200.548.649.899	149.992.033.843	7%
2.2 Belanja Modal	290.731.764.740	471.909.057.023	471.909.057.023	399.397.428.405	108.665.663.665	27%
2.3 Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	15.485.912.163	15.485.912.163	11.389.280.788	1.389.280.788	12%
2.4 Belanja Transfer	474.983.763.424	474.873.763.424	474.873.763.424	496.625.129.568	21.641.366.144	4%
Surplus/defisit	26.500.000.000	(43.500.000.000)	(43.500.000.000)	(26.332.066.048)	(52.832.066.048)	201%
III. Pembiayaan						-
3.1 Penerimaan	-	70.000.000.000	130.000.000.000	26.332.066.048	26.332.066.048	100%
3.2 Pengeluaran	26.500.000.000	26.500.000.000	86.500.000.000	66.986.789.700	40.486.789.700	60%
SILPA	(26.500.000.000)	43.500.000.000	43.500.000.000	(40.654.723.652)	(14.154.723.652)	35%

2.4 Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan

Tahun 2023 merupakan tahap terakhir atau tahun kelima dari implemetasi RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 yang mempunyai Visi “*Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023*”. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur perencanaan daerah adalah upaya mewujudkan transparansi kebijakan pemerintah, menerapkan asas partisipasif dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan sehingga akan mendukung pencapaian *Good Governance*. Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan lima Misi, sebagai berikut:

- Membangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya dengan Jiwa Kepemimpinan Nu SAJATI;
- Mewujudkan Masyarakat Kuningan Nu SAJATI Dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara dalam Bingkai Kebangsaan dan Kebhinekaan;
- Mewujudkan Manajemen Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata, Adil, Berkualitas dan Berkelanjutan dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia Nu SAJATI;
- Mewujudkan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata, Budaya dan Potensi Lokal untuk Mempercepat Pertumbuhan serta Pemerataan Ekonomi Rakyat; dan
- Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur untuk Mendorong Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja dalam Lingkungan yang Lestari.



Upaya pencapaian Visi-Misi Kabupaten Kuningan ini dilaksanakan dengan menggelorakan semangat dan nilai-nilai SAJATI (SANTANA, BASAJAN, SANTIKA) yang juga diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Kuningan merupakan gambaran Rencana Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan sampai dengan Tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan 2023. Adapun arah kebijakan pada RKPD Tahun 2023 yaitu **“Mencapai Daerah yang Maju dan Unggul”**, yang bermuara pada upaya pemulihan ekonomi. Kebijakan ini berangkat dari kondisi masyarakat yang mulai pulih pasca penanganan Covid-19. Pada masa Covid-19, Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan *refocusing* anggaran pembangunan daerah untuk kebutuhan di bidang kesehatan dalam penanganan Pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi akan diarahkan pada kegiatan yang bersifat dapat membuka peluang usaha baru dan dapat menyediakan lapangan kerja baru bagi tenaga produktif di Kabupaten Kuningan. Pemerintah Kabupaten Kuningan akan mendorong semua sektor untuk menjadi *leading* dalam menciptakan peluang usaha baru dan penyerapan tenaga kerja. Daerah yang maju dan unggul salah satunya dicirikan dengan kemampuan daerah tersebut untuk bangkit dari kondisi krisis dan mampu mempercepat laju pembangunan berdasarkan keunggulan lokal yang dimanfaatkan secara maksimal.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 yang merupakan tahun kelima dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun terakhir untuk mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan. Seluruh Perangkat Daerah pengampu urusan pembangunan harus memastikan target dan sasaran kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan mewujudkan pencapaian indikator akhir masa RPJMD sekaligus menjadi pendorong percepatan pengentasan kemiskinan dan penangguran di Kabupaten Kuningan.

Pada Tahun 2023 ini, prioritas pembangunan diarahkan pada pemenuhan enam program unggulan bupati yaitu:

- a. Percepatan rehabilitasi dan aksesibilitas pendidikan;
- b. Percepatan pembangunan desa khususnya sektor pertanian dan pariwisata, melalui pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur;
- c. Peningkatan produktivitas dan lapangan kerja melalui UMKM/IMKM berbasis teknologi informasi, ketersediaan bantuan permodalan dan pengembangan usaha;
- d. Pengembangan karakter berbangsa dan bernegara serta keluhuran nilai-nilai agama;
- e. Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, manula dan penyandang disabilitas; dan
- f. Peningkatan mutu pelayanan dan transparansi pemerintahan melalui Sistem Informasi Terpadu.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL KABUPATEN KUNINGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada TA 2023, Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan ditetapkan sebesar Rp3.081.628.422.612,00 dan direncanakan didanai melalui Penerimaan Pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp522.201.996.256,00. Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp2.553.426.426.356,00 dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp6.000.000.000,00, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar (Rp26.217.773.476,00) yang ditutup melalui SiLPA tahun sebelumnya. Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan selama Tahun 2023 dapat dilihat secara ringkas pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9
Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan TA 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	
			(Rp)	(%)
I. Pendapatan Daerah	3.081.628.422.612,00	2.842.021.968.214,00	(239.606.454.398,00)	92,22
1.1 PAD	522.201.996.256,00	350.370.182.403,00	(171.831.813.853,00)	67,09
1.2 Pendapatan Transfer	2.553.426.426.356,00	2.486.364.664.961,00	(67.061.761.395,00)	97,37
1.3 Lain-Lain Pendapatan Yg Sah	6.000.000.000,00	5.287.120.850,00	(712.879.150,00)	88,12
II. Belanja Daerah	3.107.960.488.660,00	2.832.406.522.597,00	(275.553.966.063,00)	91,13
2.1 Belanja Operasi	2.200.548.649.899,00	2.071.607.933.939,00	(128.940.715.960,00)	94,14
2.2 Belanja Modal	399.397.428.405,00	254.910.604.687,00	(144.486.823.718,00)	63,82
2.3 Belanja Tidak Terduga	11.389.280.788,00	9.491.497.400,00	(1.897.783.388,00)	83,34
2.4 Belanja Transfer	496.625.129.568,00	496.396.486.571,00	(228.642.997,00)	99,95
Surplus/defisit	26.332.066.048,00	9.615.445.617,00	35.947.511.665,00	36,52
III. Pembiayaan	26.332.066.048,00	5.725.071.348,13	(20.606.994.699,87)	21,74
3.1 Penerimaan	93.318.855.748,00	72.294.861.048,13	(21.023.994.699,87)	77,47
3.2 Pengeluaran	66.986.789.700,00	66.569.789.700,00	(417.000.000,00)	99,38
SiLPA		15.340.516.965,13		

Tabel 9 diatas memperlihatkan bahwa Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.842.021.968.214,00 dengan target yang ditetapkan sebesar Rp3.081.628.422.612,00 atau 92,22%. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi Penerimaan PAD dari Tahun 2019 s.d. 2023 dapat dilihat dari Tabel 10 berikut.



Tabel 10
Perkembangan PAD TA 2019 s.d. 2023

Tahun	Target (Rp)	Perkembangan Target (%)	Realisasi (Rp)	Perkembangan Realisasi (%)
2019	346.682.748.358,00	0,65%	346.682.748.358,00	14,33%
2020	330.335.349.311,00	(4,72%)	298.726.080.629,00	(13,83%)
2021	358.108.144.618,00	8,41%	343.864.589.959,00	15,11%
2022	551.997.494.428,00	54,14%	346.599.936.096,66	0,80%
2023	522.201.996.256,00	(5,40%)	350.370.182.403,00	1,09%

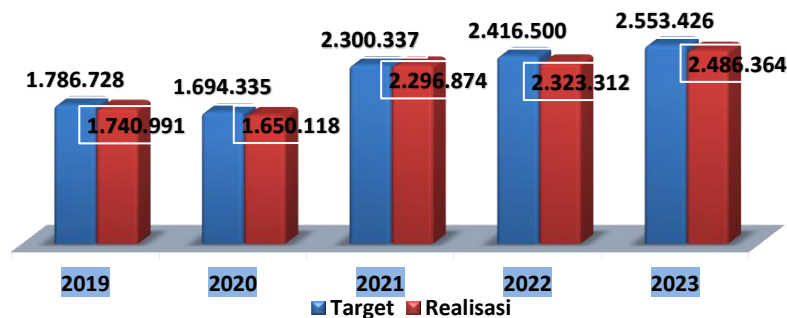
Dilihat dari Tabel 10 di atas, TA 2020 Target PAD mengalami penurunan, Tahun 2021 mengalami kenaikan, Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan tetapi pada Tahun 2023 target PAD mengalami penurunan. Dilihat dari sisi target anggaran yaitu: a) Dari TA 2019 dengan TA 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp16.347.399.047,00) atau (4,72)%. b) Tahun 2020 dengan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp27.772.795.307,00 atau 8,41% c) Tahun 2021 dengan TA 2022 mengalami kenaikan yang sangat besar sebesar Rp193.889.349.810,00 atau 54,14%. d) TA 2022 dengan TA 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp29.795.498.172,00) atau (5,40)%.

Untuk Pendapatan Transfer, realisasi penerimaan adalah sebesar Rp2.486.364.664.961,00 atau 97,37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.553.426.426.356,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer dari Tahun 2019 s.d. Tahun 2023 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 11 dan Grafik 7 berikut.

Tabel 11
Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2019 – 2023

Tahun	Target (Rp)	Perkembangan Target (%)	Realisasi (Rp)	Perkembangan Realisasi (%)
2019	1.786.728.667.812,00	6,09%	1.740.991.070.659,00	4,75%
2020	1.694.335.694.409,00	(5,17%)	1.650.118.409.167,00	(5,22%)
2021	2.300.337.771.809,00	35,77%	2.296.874.103.593,00	39,19%
2022	2.416.500.656.398,00	5,05%	2.323.312.627.999,00	1,15%
2023	2.553.426.426.356,00	5,67%	2.486.364.664.961,00	7,02%

Grafik 7
Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2019 – 2023





Dilihat dari Tabel 11 dan Grafik 7 di atas, dari TA 2019 sampai dengan TA 2020 target Pendapatan Transfer mengalami penurunan target. TA 2021 target mengalami kenaikan yang cukup besar dan TA 2022 target Pendapatan Transfer kembali mengalami kenaikan yang besar. Begitu pula di sisi realisasi yang mengalami kenaikan.

Dilihat dari sisi target anggaran, yaitu: a). TA 2019 dengan TA 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp92.392.973.403,00) atau (5,17)%. b). TA 2020 dengan TA 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar Rp606.002.077.400,00 atau 35,77%. c). TA 2021 dengan TA 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp116.162.884.589 atau 5,05% d). Tahun 2022 dengan Tahun 2023 pun mengalami kenaikan sebesar Rp136.925.769.958,00 atau sebesar 5,67%. Selain itu, dilihat dari sisi realisasi kenaikan yang terjadi pada TA 2022 dengan TA 2023 sebesar Rp163.052.036.962,00 atau 7,02%.

Untuk pos Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target penerimaan sebesar Rp6.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp5.287.120.850,00 atau 88,12%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

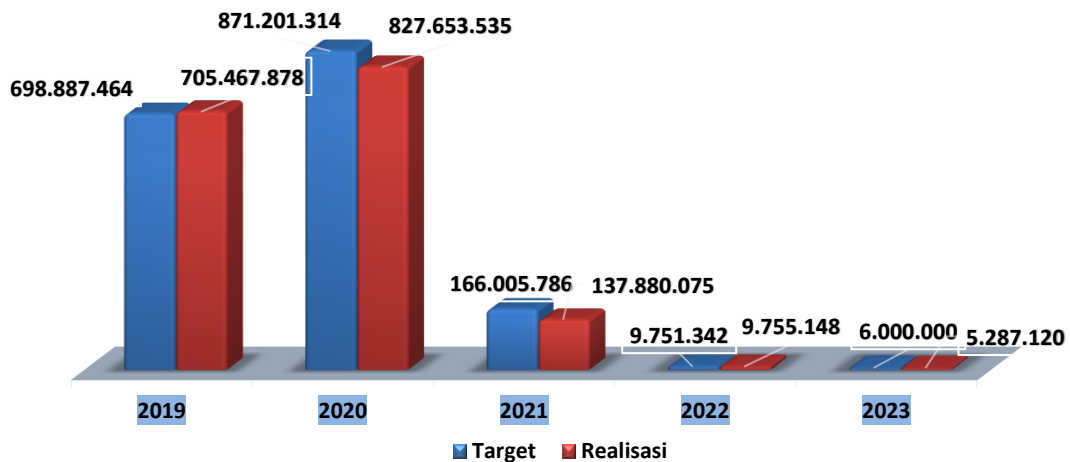
Adapun Tabel Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:

Tabel 12
Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2019 - 2023

Tahun	Target (Rp)	Perkembangan Target (%)	Realisasi (Rp)	Perkembangan Realisasi (%)
2019	698.887.464.777,00	22,90%	705.467.878.355,00	24,99%
2020	871.201.314.237,00	24,66%	827.653.535.245,00	17,32%
2021	166.005.786.007,00	(80,95)%	137.880.075.200,00	(83,34)%
2022	9.751.342.500,00	(94,12)%	9.755.148.890,00	(92,92)%
2023	6.000.000.000,00	(38,47)%	5.287.120.850,00	(45,80)%



Grafik 8
Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
TA 2019 - 2023



Berdasarkan Tabel 12 dan Grafik 8 diatas untuk perkembangan target Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk TA 2023 terdapat penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2022, yaitu berkurang sebesar (Rp3.751.342.500,00) atau (38,47)%. Tidak tercapainya Target Tahun 2023 dikarenakan besaran dana yang ditransfer ke Daerah sepenuhnya adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Selain itu penyebab menurunnya nilai Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah karena adanya reklas rincian akun tersebut. Contoh yang konkrit adalah pada tahun 2019 dan 2020, rincian dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Hibah Pusat dan Hibah Dana BOS. Nilai Hibah Dana BOS tersebut menyebabkan tingginya nilai anggaran maupun realisasi akun pendapatan ini.

Namun pada tahun 2021 sampai 2023, akun dana BOS tersebut direklas menjadi Pendapatan Transfer Pusat. Sehingga pada tahun 2021 sampai 2023, nampak nilai realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah seolah mengalami penurunan.

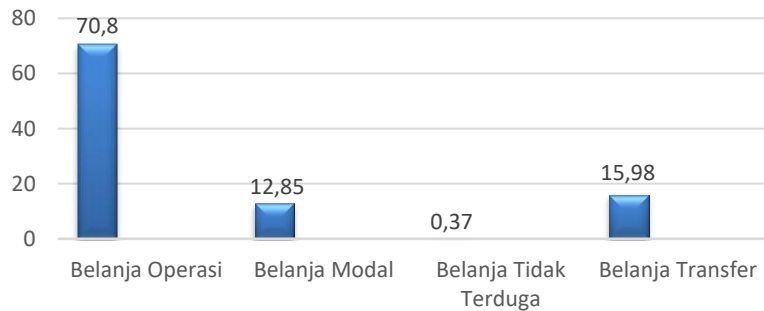
Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA 2023 Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp3.107.846.196.088,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.832.406.522.597,00 atau 91,13%, sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja Daerah sebesar (Rp275.439.673.491,00) atau (9,77)%.

Tabel 13
Proporsi Belanja Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)
Belanja Daerah	3.107.960.488.660,00	100,00%
I. Belanja Operasi	2.200.548.649.899,00	70,80%
II. Belanja Modal	399.397.428.405,00	12,85%
III. Belanja Tidak Terduga	11.389.280.788,00	0,37%
IV. Belanja Transfer	496.625.129.568,00	15,98%



Grafik 9
Proporsi Belanja Daerah



Berdasarkan Tabel 13 dan Grafik 9 di atas tampak bahwa Belanja Operasi mendapat alokasi dana yang terbesar dibandingkan dengan Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, yaitu sebesar 70,80% dari total APBD Tahun Anggaran 2023.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.200.548.649.899,00 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp2.071.607.933.939,00 atau 94,14%. Anggaran Belanja Operasi ini terdiri atas:

Tabel 14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.248.571.524.797,00	1.236.027.150.638,00	99,00
2	Belanja Barang dan Jasa	851.238.937.094,00	740.038.445.929,00	86,94
3	Belanja Bunga	2.870.630.258,00	2.619.236.622,00	91,24
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-
5	Belanja Hibah	88.066.532.750,00	83.430.575.750,00	94,74
6	Belanja Bantuan Sosial	9.801.025.000,00	9.492.525.000,00	96,85
	Jumlah	2.200.548.649.899,00	2.071.607.933.939,00	94,14

Belanja Modal diperuntukan membiayai pelaksanaan kegiatan dan program pada TA 2023. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp399.397.428.405,00 dan realisasi sebesar Rp254.910.604.687,00 atau 63,82%, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	11.225.542.130,00	11.192.050.724,00	99,70
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.460.032.188,00	67.447.867.808,00	34,33
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.715.786.106,00	81.763.034.176,00	94,29
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.731.312.150,00	86.485.838.150,00	96,38
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.760.417.444,00	7.989.804.829,00	54,13
6	Belanja Modal Aset Lainnya	504.338.387,00	32.009.000,00	6,35
	Jumlah	399.397.428.405,00	254.910.604.687,00	63,82



Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp11.389.280.788,00 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp9.491.497.400,00 atau 83,34%.

Tabel 16
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Terduga	11.389.280.788,00	9.491.497.400,00	83,34%
	Jumlah	11.389.280.788,00	9.491.497.400,00	83,34%

Belanja Transfer diperuntukan membiayai pelaksanaan kegiatan dan program pada TA 2023. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp496.625.129.568,00 dan realisasi sebesar Rp496.396.486.571,00 atau 99,95%, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA. 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil	18.381.838.818,00	18.185.397.238,00	98,93%
2	Belanja Bantuan Keuangan	478.243.290.750,00	478.211.089.333,00	99,99%
	Jumlah	496.625.129.568,00	496.396.486.571,00	99,95%

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp93.318.855.748,00 dapat direalisasikan sebesar Rp72.294.861.048,13 atau 77,48%. Sedangkan, anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp66.986.789.700,00 realisasi sebesar Rp66.569.789.700,00 atau 99,38%.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Secara umum faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pencapaian kinerja keuangan TA 2023, yaitu:

- Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan, dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
- Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya; dan
- Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.



Sedangkan, faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja adalah:

- a. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dalam menyusun analisis beban kerja dan target SKPD;
- b. Kualitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur belum memadai;
- c. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal; dan
- d. Belum optimalnya pengelolaan aset.



BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan, kegiatan merupakan representasi dan peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan pada TA 2023, alokasi Belanja Daerah tersebar untuk menunjang pelaksanaan urusan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.107.846.196.088,00 dan realisasi sebesar Rp2.832.406.522.597,00. Tabel 18 dibawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap Urusan, yaitu:

**Tabel 18
Alokasi Belanja Daerah Per Urusan TA 2023**

NO	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
				Jumlah(Rp)	
1	2	3	4	5=4-3	6
I	PELAYANAN UMUM	801.541.123.571,00	785.348.033.784,00	(16.193.089.787,00)	97,98
1	Kearsipan	4.617.054.554,00	4.382.856.171,00	(234.198.383,00)	94,93
2	Komunikasi Dan Informatika	10.289.658.310,00	9.962.317.094,00	(327.341.216,00)	96,82
3	Perencanaan Pembangunan	10.272.123.906,00	9.168.685.679,00	(1.103.438.227,00)	89,26
4	Keuangan	549.751.026.390,00	544.403.179.877,00	(5.347.846.513,00)	99,03
5	Kepegawaian	11.780.080.947,00	10.720.512.039,00	(1.059.568.908,00)	91,01
6	Sekretariat Daerah	60.889.010.752,00	58.176.933.433,00	(2.712.077.319,00)	95,55
7	Sekretariat DPRD	59.390.364.344,00	58.865.749.179,00	(524.615.165,00)	99,12
8	Inspektorat	15.662.395.193,00	13.391.915.854,00	(2.270.479.339,00)	85,50
9	Kewilayahan	78.889.409.175,00	76.275.884.458,00	(2.613.524.717,00)	96,69
II	KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN	51.927.082.850,00	51.360.181.538,00	(566.901.312,00)	98,91
1	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Ketenteraman, Ketertiban	28.951.933.035,00	28.562.604.665,00	(389.328.370,00)	98,66
2	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.975.149.815,00	22.797.576.873,00	(177.572.942,00)	99,23
III	EKONOMI	266.447.976.105,00	130.976.071.722,00	(135.471.904.383,00)	49,16
1	Perhubungan	151.853.910.226,00	31.395.926.657,00	(120.457.983.569,00)	20,68



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NO	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
				Jumlah(Rp)	
1	2	3	4	5=4-3	6
2	Tenaga Kerja	11.407.140.701,00	11.220.041.159,00	(187.099.542,00)	98,36
3	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.443.522.330,00	18.912.213.974,00	(2.531.308.356,00)	88,20
4	Penanaman Modal	7.260.856.239,00	7.043.414.633,00	(217.441.606,00)	97,01
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31.642.115.846,00	29.406.653.224,00	(2.235.462.622,00)	92,94
6	Pertanian	11.763.216.321,00	6.353.445.521,00	(5.409.770.800,00)	54,01
7	Kelautan dan Perikanan	28.408.854.264,00	24.032.674.376,00	(4.376.179.888,00)	84,60
8	Perdagangan	1.828.245.178,00	1.812.871.178,00	(15.374.000,00)	99,16
9	Perindustrian	840.115.000,00	798.831.000,00	(41.284.000,00)	95,09
10	Transmigrasi	-	-	-	-
IV	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	89.443.659.776,00	64.768.637.876,00	(24.675.021.900,00)	72,41
1	Lingkungan Hidup	19.572.225.415,00	18.661.548.924,00	(910.676.491,00)	95,35
2	Pertanahan	69.871.434.361,00	46.107.088.952,00	(23.764.345.409,00)	65,99
V	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	190.763.213.465,00	178.694.660.827,00	(12.068.552.638,00)	93,67
1	Pekerjaan Umum	180.338.497.365,00	169.572.021.940,00	(10.766.475.425,00)	94,03
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.424.716.100,00	9.122.638.887,00	(1.302.077.213,00)	87,51
VI	KESEHATAN	496.255.017.460,00	430.683.555.875,00	(65.571.461.585,00)	86,79
1	Kesehatan	463.559.401.750,00	404.212.383.211,00	(59.347.018.539,00)	87,20
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.695.615.710,00	26.471.172.664,00	(6.224.443.046,00)	80,96
VII	PARIWISATA	13.793.759.497,00	13.131.400.649,00	(662.358.848,00)	95,20
1	Kebudayaan	2.846.672.300,00	2.280.147.300,00	(566.525.000,00)	80,10
2	Pariwisata	10.947.087.197,00	10.851.253.349,00	(95.833.848,00)	99,12
VIII	PENDIDIKAN	1.153.627.014.777,00	1.136.062.276.539,00	(17.564.738.238,00)	98,48
1	Pendidikan	1.136.891.036.171,00	1.120.632.852.584,00	(16.258.183.587,00)	98,57
2	Kepemudaan dan Olah Raga	16.285.978.606,00	14.986.903.475,00	(1.299.075.131,00)	92,02
3	Perpustakaan	450.000.000,00	442.520.480,00	(7.479.520,00)	98,34
IX	PERLINDUNGAN SOSIAL	44.161.641.159,00	41.381.703.787,00	(2.779.937.372,00)	93,71



NO	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
				Jumlah(Rp)	
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	179.122.990,00	177.539.322,00	(1.583.668,00)	99,12
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.328.025.000,00	942.003.000,00	(386.022.000,00)	70,93
3	Sosial	8.721.639.031,00	8.200.520.415,00	(521.118.616,00)	94,02
4	Pangan	30.135.941.595,00	28.686.560.623,00	(1.449.380.972,00)	95,19
5	BPBD	3.796.912.543,00	3.375.080.427,00	(421.832.116,00)	88,89
JUMLAH		3.107.960.488.660,00	2.832.406.522.597,00	(275.553.966.063,00)	91,13

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung (kantor, sekolah, dan puskesmas), pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya mebeulair dan alat kantor (termasuk sekolah), penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi penerangan jalan umum, dan rehabilitasi taman.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terhadap beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja, antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- Penerapan teknologi lebih lanjut pada beberapa sektor program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja; dan
- Meningkatnya partisipasi masyarakat/stakeholder dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga tingkat Kabupaten.

Disamping adanya faktor-faktor pendukung, tentunya terdapat juga faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja program, antara lain:

- Kurangnya pemahaman para stakeholder terhadap sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- Dukungan anggaran terhadap kegiatan prioritas belum maksimal;
- Kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali; dan
- Lemahnya tingkat koordinasi antar perangkat daerah atau instansi terkait.



BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang, yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sementara, entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan entitas akuntansi menjadi laporan keuangan daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan daerah. Entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

5.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati Kuningan Nomor 278 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, basis akuntansi adalah basis akrual.

Basis Akruwal artinya pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sedangkan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi, walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas. Artinya pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

A. PENDAPATAN

1) Pendapatan – LO

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.



Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan Pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat *variabel* terhadap Pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan-LO untuk PPKD dan Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan-LO Non Operasional berasal dari surplus dari kegiatan non operasional seperti penjualan asset non lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang dan kegiatan non operasional lainnya. Pendapatan-LO Luar Biasa adalah pendapatan yang bukan berasal dari tugas pokok dan fungsi atau operasi biasa, tidak diperkirakan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh dari entitas bersangkutan.

a) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

(1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

(2) Pendapatan Transfer

Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD.

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Pendapatan ini diakui sebagai Pendapatan-LO saat diterimanya kas pada RKUD.

b) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif pengakuan Pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi enam, yaitu :

(1) Kelompok Pendapatan Pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

(2) Kelompok Pendapatan Pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar



untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa SK atas pendapatan terkait.

- (3) Kelompok Pendapatan Retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan Retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima baik dengan SK Retribusi (*official assessment*) maupun tidak (*realized*).
- (4) Kelompok Pendapatan Retribusi yang didahului oleh penerbitan SK Retribusi Daerah (SKR Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib retribusi yang bersangkutan. Pendapatan Retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa SK atas pendapatan terkait.
- (5) Kelompok hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai Pendapatan. Pengakuan Pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
- (6) Kelompok Pendapatan yang tidak melalui Transfer langsung ke RKUD yang terdiri atas:
 - (a) Dana Kapitasi JKN diakui berdasarkan diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dilengkapi dengan Laporan/Berita Acara penggunaan Dana Hibah tersebut saat inventarisasi Pendapatan Hibah tersebut setiap periode pelaporan.
 - (b) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diakui berdasarkan Surat Pengesahan Telah Menerima Hibah (SPTMH) dari Kepala Satuan Pendidikan Negeri yang dilengkapi dengan Laporan/Berita Acara penggunaan Dana Hibah tersebut saat inventarisasi pendapatan hibah tersebut setiap periode pelaporan.
 - (c) Pendapatan Bunga/Jasa Giro dari pengelolaan Dana BOS diakui setelah diterima di RKUD.
 - (d) Dana BLUD diakui Pendapatan-LO BLUD berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) yang dilengkapi dengan Laporan/Berita Acara penggunaan Dana Hibah tersebut saat inventarisasi Pendapatan Hibah tersebut setiap periode pelaporan.
 - (e) Penerimaan lainnya yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD diakui berdasarkan SP2B dari BUD yang dilengkapi dengan Laporan/Berita Acara penggunaan Dana Hibah tersebut saat inventarisasi Pendapatan Hibah tersebut setiap periode pelaporan.

2) Pendapatan – LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.



Pendapatan diakui pada saat:

- a) Kas atas pendapatan telah diterima di RKUD;
- b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Diantaranya Dana Kapitasi, Dana BOS dan penerimaan lainnya yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD diakui pada saat terbit SP2B dari BUD dan/atau SPB bagi Kepala Satuan Pendidikan Negeri. Sementara untuk Pendapatan LRA BLUD diakui berdasarkan SP2BP.
- e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan-LRA:

- a) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu Pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan Belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh Pendapatan tersebut.
- c) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

B. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi Aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

1) Pengakuan Beban pada PPKD

a) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan Biaya Denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo.

b) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual



produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c) **Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD dan/atau BAST karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

d) **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

e) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

f) **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir TA terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

2) **Pengakuan Beban Pada SKPD**

a) **Beban Pegawai**

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti Honorarium Non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti Beban Gaji dan Tunjangan.



Beban Pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, Beban Pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban Pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal bukti pembayaran honor) telah disahkan Pengguna Anggaran.

b) **Beban Barang**

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau BAST ditandatangani. Dalam hal, pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Pengakuan beban atas penggunaan Dana JKN, Dana BOS, dan Dana Hibah lainnya yang tidak melalui pengelolaan APBD adalah pada saat inventarisasi beban tersebut dan pada tanggal pelaporan, yaitu ketika diterbitkan :

- (1) SP2B atas penggunaan Dana JKN;
- (2) SPB atas penggunaan Dana BOS; dan/atau
- (3) SP2BP atas penggunaan Dana BLUD.

c) **Beban Persediaan**

Beban Persediaan dicatat sebagai pemakaian persediaan. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam metode periodik, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan menggunakan jumlah satuan kuantitas akhir dengan pendekatan ke bawah (sesuai yang diatur dalam standar harga/biaya per jenis persediaan) dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan yaitu harga pembelian terakhir.

C. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diklasifikasikan menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga.

1) **Pengakuan Belanja**

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD, dan atau pada saat diterbitkan SP2D;
- b) Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.



- c) Pengakuan Belanja atas penggunaan Dana JKN, Dana BOS, dan Dana Hibah lainnya yang tidak melalui pengelolaan APBD adalah pada saat inventarisasi belanja tersebut dan pada tanggal pelaporan, yaitu ketika diterbitkan SP2B dan/atau SPB oleh BUD, termasuk dokumen pertanggungjawaban BLUD untuk pengakuan belanja BLUD.
- 2) Pengukuran Belanja
 - a) Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
 - b) Pengukuran Beban dan Belanja atas penggunaan Dana JKN, Dana BOS dan transaksi penerimaan lain yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD berdasarkan jumlah uang yang keluar dari rekening entitas penerima dana yang tertera di SP2B serta dokumen pertanggungjawaban BLUD untuk pengukuran beban dan belanja atas penggunaan Dana BLUD.

Belanja, baik berupa barang dan/atau jasa dinilai sebesar nilai tercatat pada tanggal transaksi dan disajikan pada laporan realisasi anggaran serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja atas Dana BLUD, Dana JKN, Dana BOS dan transaksi penerimaan lain yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD masuk kedalam masing-masing kategori Belanja, baik Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja Modal.

D. TRANSFER

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah daerah, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

- 1) Pengakuan Transfer

Transfer diakui pada saat terjadinya penerimaan/pengeluaran dari RKUD.

- 2) Pengukuran Transfer

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima/dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada kas daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.

F. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar yaitu:

1) Aset lancar

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Sedangkan Aset Nonlancar mencakup Aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintahan Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

a) Kas

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara JKN dan Kas Lainnya. Termasuk dalam kategori kas adalah Setara Kas yang merupakan investasi yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari tiga bulan tanggal perolehannya.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki tiga bulan sampai dengan 12 bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.

c) Piutang

Piutang diakui saat:

- (1) Diterbitkan surat ketetapan; atau
- (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- (3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang dicatat dan diukur sebesar:

- (1) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
- (2) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Klasifikasi piutang terdiri atas:

- (1) Piutang Pajak;
- (2) Piutang Retribusi;
- (3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- (4) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (5) Piutang Dana Bagi Hasil;
- (6) Piutang Dana Alokasi Umum;
- (7) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD;
- (8) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- (9) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi; dan
- (10) Piutang Lainnya.



Beberapa peristiwa yang menimbulkan piutang adalah sebagai berikut:

- (1) Piutang Berdasarkan Pungutan
- (2) Piutang Berdasarkan Perikatan
- (3) Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan. Penyisihan Piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Nilai Penyisihan Piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyisihan Piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang.

Berikut adalah klasifikasi piutang berdasarkan umur jatuh temponya:

Kualifikasi	Pajak Daerah		Piutang Retribusi	Selain Pajak dan Retribusi
	Self Assessment	Official Assessment		
Kualitas Lancar	umur piutang \leq 1 tahun	umur piutang \leq 1 tahun	umur piutang 0 - 1 bulan	Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
Kualitas Kurang Lancar	umur piutang 1 - 2 tahun	umur piutang 1 - 2 tahun	umur piutang 3 bulan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
Kualitas Diragukan	umur piutang $>$ 2 - 5 tahun	umur piutang $>$ 2 - 5 tahun	umur piutang 3 - 12 bulan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
Kualitas Macet	umur piutang $>$ 5 tahun	umur piutang $>$ 5 tahun	umur piutang $>$ 12 bulan	Apabila dalam jangka waktu 1 terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara

Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Besarnya persentase Penyisihan Piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 16
Persentase Piutang Tertagih

Kualifikasi	Besaran Penyisihan
Piutang Lancar	nilai penyisihan sebesar 0.5%
Piutang Kurang Lancar	nilai penyisihan sebesar 10%
Piutang Diragukan	50% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
Piutang Macet	100% setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

Penyisihan Piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan sesuai tabel berikut.



Tabel 17
Kebijakan Persentasi Penyisihan Piutang
Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

No	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		≤ 1 Tahun	>1 s.d. 2 Tahun	>2 s.d. 5 Tahun	>5 Tahun
1	Piutang Pajak	0.5%	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi	0.5%	10%	50%	100%
3	Piutang Lainnya	0.5%	10%	50%	100%

Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Penghapusan Piutang dikenal dengan dua cara yaitu Penghapusan Bersyarat dan Penghapusan Mutlak. Penghapusan secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (*revenue*). Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang. Substansi ekonomik piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.

d) Akuntansi Beban Dibayar di muka

Beban dan/atau Belanja diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran Kas Daerah dan pengakuan Beban dan/atau Belanja, dimana pengakuan Beban dan/atau Belanja dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan Beban dan/atau Belanja dapat dilakukan pada saat Barang atau Jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat Barang atau Jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban dan/atau Belanja. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

e) Persediaan

Persediaan mencakup:

- (1) Barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tidak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.



- (2) Barang dan jasa yang akan diserahkan/dijual ke masyarakat/pihak lain. Penilaian persediaan menggunakan metoda harga pembelian terakhir.

Pengakuan:

Persediaan diakui

- (1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- (2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepemenguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat menggunakan metode periodik, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap akhir tahun berdasarkan sisa persediaan dalam hasil inventarisasi secara fisik (*stock opname*). Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Dalam metode periodik, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

2) Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Kuningan atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi:

a) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Investasi non permanen pemerintah daerah dicatat dalam neraca menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Penyertaan Modal Pemerintah adalah jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga keuangan lainnya dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang dinyatakan dalam perjanjian. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca menggunakan metode biaya dan metode ekuitas.

c) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian dan atau pembangunan yang sumber dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap dicatat dengan nilai historis.

- (1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



- (2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- (3) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap sesuai tabel berikut:

Tabel 19
Besaran Biaya Perolehan Aset

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak, kegiatan detail engineering desain (DED)
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

d) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.

e) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat.

f) Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

3) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Jangka Pendek adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka



pendek dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- a) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang Kepada Pemerintah Pusat. Merupakan bagian kewajiban jangka panjang kepada Pemerintah Pusat, yang telah jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b) Kewajiban Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*.
- c) Kewajiban Bunga adalah bagian beban bunga yang telah jatuh tempo dan harus dibayar dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban bunga dicatat sebesar persentase tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.
- d) Denda adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kewajiban pokok pinjaman dan atau bunganya yang tidak dapat dilunasi tepat waktu sesuai perjanjian.
- e) *Commitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar sebesar persentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum atau tidak ditarik sampai batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
- f) Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga merupakan kewajiban jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kewajiban jangka panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dicatat berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

- a) Kewajiban Kepada Pemerintah adalah bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- b) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang merupakan kewajiban atas bunga pinjaman serta jasa bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

4) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.



BAB VI

PENJELASAN POS –POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada Laporan Keuangan didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan TA 2023.

6.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

6.1.1 PENDAPATAN – LRA

Pada TA 2023 Pendapatan Daerah dianggarkan dalam APBD-P sebesar Rp3.081.628.422.612,00 dan direalisasi sebesar Rp2.842.021.968.214,00, atau hanya mencapai 92,22% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Lebih (Kurang) (Rp)	
			Rp	%	Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah	522.201.996.256,00	350.370.182.403,00	67,09	(171.831.813.853,00)	(32,91)
2	Pendapatan Transfer	2.553.426.426.356,00	2.486.364.664.961,00	97,37	(67.061.761.395,00)	(2,63)
3	Pendapatan Lain-lain	6.000.000.000,00	5.287.120.850,00	88,12	(712.879.150,00)	(11,88)
	Jumlah Pendapatan	3.081.628.422.612,00	2.842.021.968.214,00	92,22	(239.606.454.398,00)	(7,78)

Adapun perbandingan Pendapatan TA 2023 dengan TA 2022 terlihat dalam tabel berikut ini :

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Lebih (kurang) (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	350.370.182.403,00	346.599.936.096,66	3.770.246.306,34	1,09
2	Pendapatan Transfer	2.486.364.664.961,00	2.323.312.627.999,00	163.052.036.962,00	7,02
3	Pendapatan Lain-lain	5.287.120.850,00	9.755.148.980,00	(4.468.028.130,00)	(45,80)
	Jumlah Pendapatan	2.842.021.968.214,00	2.679.667.713.075,66	162.354.255.138,34	6,06

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp2.842.021.968.214,00, mengalami kenaikan sebesar Rp162.354.255.138,34 dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.679.667.713.075,66. Kenaikan tertinggi diperoleh dari Pendapatan Transfer sebesar Rp163.052.036.962,00 atau 7,02% dari tahun sebelumnya.



6.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah untuk TA 2023 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Lebih (Kurang)	
			Rp	%	Rp	%
1	Pajak Daerah– LRA	135.645.749.600,00	122.612.598.317,00	90,39	(13.033.151.283,00)	(9,61)
2	Retribusi Daerah– LRA	156.634.653.646,00	55.688.506.176,00	35,55	(100.946.147.470,00)	(64,45)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan – LRA	7.371.500.000,00	6.674.861.370,00	90,55	(696.638.630,00)	(9,45)
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	222.550.093.010,00	165.394.216.540,00	74,32	(57.155.876.470,00)	(25,68)
	Jumlah PAD :	522.201.996.256,00	350.370.182.403,00	67,09	(171.831.813.853,00)	(32,91)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dianggarkan dalam APBD-P sebesar Rp522.201.996.256,00, dengan realisasi sebesar Rp350.370.182.403,00 atau hanya mencapai 67,09% dari anggaran. Dari angka pencapaian realisasi Pendapatan tersebut terlihat bahwa untuk capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target sesuai pagu yang ditetapkan. Pencapaian target pendapatan tertinggi diperoleh dari Pendapatan Pajak daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan nilai persentase pencapaian sebesar 90% lebih. Sedangkan Nilai pencapaian terendah diperoleh dari Retribusi Daerah yang hanya mencapai 35,55% atau sebesar Rp55.688.506.176,00 dari anggaran sebesar Rp156.634.653.646,00.

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	
				(Rp)	%
1	Pajak Daerah	122.612.598.317,00	107.678.513.745,00	14.934.084.572,00	13,87
2	Retribusi Daerah	55.688.506.176,00	77.253.777.415,66	(21.565.271.239,66)	(27,91)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	6.674.861.370,00	7.138.783.168,00	(463.921.798,00)	(6,50)
4	Lain-lain PAD Yang Sah	165.394.216.540,00	154.528.861.768,00	10.865.354.772,00	7,03
	Jumlah PAD	350.370.182.403,00	346.599.936.096,66	3.770.246.306,34	1,09



Namun bila dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2022, maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.770.246.306,34 atau sebesar 1,09%. Kenaikan tertinggi yakni Pajak Daerah sebesar 13,87%.

6.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Pajak Hotel – LRA	6.205.749.600,00	4.742.794.515,00	76,43	4.243.232.654,00
2	Pajak Restoran – LRA	12.240.000.000,00	14.564.384.833,00	118,99	11.397.453.588,00
3	Pajak Hiburan – LRA	2.150.000.000,00	1.898.565.951,00	88,31	1.489.411.240,00
4	Pajak Reklame – LRA	4.150.000.000,00	3.595.832.718,00	86,65	3.317.865.342,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LRA	29.100.000.000,00	29.762.656.861,00	102,28	28.227.793.411,00
6	Pajak Parkir – LRA	1.000.000.000,00	531.626.962,00	53,16	429.620.274,00
7	Pajak Air Tanah – LRA	3.500.000.000,00	612.153.777,00	17,49	179.534.344,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	15.000.000.000,00	2.568.132.000,00	17,12	2.338.240.000,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan P2– LRA	43.100.000.000,00	43.499.745.516,00	100,93	35.092.436.321,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	19.200.000.000,00	20.836.705.184,00	108,52	20.962.926.571,00
	Jumlah	135.645.749.600,00	122.612.598.317,00	90,39	107.678.513.745,00

Berdasarkan tabel rincian diatas, Pajak Daerah dianggarkan APBD-P sebesar Rp135.645.749.600,00, dengan realisasi sebesar Rp122.612.598.317,00 atau 90,39%. Terdapat empat akun pajak melampaui target pendapatan yang ditetapkan, yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, PBB dan BPHTB dengan pelampauan target tertinggi pada realisasi Pajak Restoran sebesar 118,99% atau melebihi target sebesar Rp2.324.384.833,00. Apabila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi terbesar peningkatan realisasi Pajak Daerah adalah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp43.499.745.516,00.

Dari seluruh akun Pajak Daerah, terdapat dua akun dengan pencapaian target APBD-P TA 2023 terendah, yaitu Pajak Air Tanah sebesar 17,49% dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 17,12%. Penyebab penurunan realisasi Pajak Air Tanah yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah melaksanakan optimalisasi penggalan potensi, monitoring dan pengawasan maupun penagihan dan pemungutan Pajak Air Tanah. Namun capaian realisasi Pajak Air Tanah berdasarkan kondisi dan potensi yang ada. Sedangkan penyebab Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan hanya mencapai sebesar 17,12% dikarenakan:

1. Penambangan tidak berizin, tidak dapat dipungut pajak;
2. Proses Perizinan sangat lama sehingga mengganggu realisasi pencapaian realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;



3. Pengendalian dan penindakan terhadap penambangan MBLB yang tidak berizin masih belum efektif;
4. Penurunan jumlah permintaan pasir atau ritasi pasir karena konsumen lebih memilih membeli pasir dikabupaten tetangga yang lebih murah karena tidak berizin (tidak membayar pajak); dan
5. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuningan sudah sangat berkurang, sehingga dibutuhkan pengendalian yang optimal.

Tidak tercapainya akun pajak ini pun menyebabkan rata-rata keseluruhan Penerimaan Pajak Daerah hanya mencapai 90,39%.

Apabila dibandingkan dengan TA 2023, Pajak Daerah secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp14.934.084.572,00 (Rp122.612.598.317,00 - Rp107.678.513.745,00) atau 13,87%. Terdapat 4 jenis Pajak yang melebihi target 100%, kenaikan tertinggi dilihat dari sisi nilai dialami oleh Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 19,33% atau Rp8.407.309.195,00 (Rp43.499.745.516,00 - Rp35.092.436.321,00) dari realisasi TA 2023. Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah tersebut tidak terlepas dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah di setorkan ke Kas Daerah selama TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022
			Rp	%	Rp
1	Retribusi Jasa Umum	83.933.800.199,00	42.019.139.884,00	50,06	54.603.473.381,66
2	Retribusi Jasa Usaha	66.498.688.299,00	11.833.968.925,00	17,80	17.987.373.496,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	6.202.165.148,00	1.835.397.367,00	29,59	4.662.930.538,00
	Jumlah	156.634.653.646,00	55.688.506.176,00	35,55	77.253.777.415,66

Salah satu Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target di Tahun 2023 adalah Pendapatan Retribusi Daerah yang hanya mencapai 35,55%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 pun pencapaiannya lebih kecil yaitu sebesar 38,72% atau sebesar Rp77.253.777.415,66. Harus ada evaluasi untuk mengidentifikasi kendala yang menjadi penyebab rendahnya capaian target.

Dari tiga jenis Retribusi, Retribusi Jasa Umum memperoleh capaian target tertinggi yaitu 50,06% atau senilai Rp42.019.139.884,00 dari APBD-P. Namun nilai tersebut belum dapat mendongkrak nilai pencapaian Retribusi secara keseluruhan. Hal tersebut karena dua jenis Retribusi lainnya memiliki target APBD-P cukup tinggi, namun pencapaian realisasinya masih sangat rendah. Retribusi Perizinan Tertentu capaian hanya sebesar 29,59% dari APBD-P. Penyebabnya adalah Retribusi Ijin Trayek yang hanya mencapai 23,79% dari APBD-P. Realisasi Retribusi yang terendah adalah Retribusi Jasa Usaha, yang hanya mencapai sebesar 17,80% dari APBD-P. Penyebabnya dua Retribusi dalam kategori Retribusi Jasa Usaha capaian masih dibawah 30%, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya mencapai 16,67% dari APBD-P dan Retribusi Terminal yang mencapai 24,55% dari APBD-P.



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022
			Rp	%	Rp
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	75.320.129.500,00	38.633.965.834,00	51,29	51.735.470.931,66
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	600.003.000,00	600.039.000,00	100,01	491.105.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.500.000.000,00	573.340.000,00	10,42	170.125.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	679.873.624,00	533.868.550,00	78,52	490.223.450,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	747.560.000,00	558.750.000,00	74,74	629.505.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	18.892.500,00	18.892.500,00	100,00	13.350.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	52.341.575,00	54.880.000,00	104,85	44.104.000,00
8	Retribusi Pelayanan Pendidikan	15.000.000,00	7.560.000,00	50,40	7.910.000,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	1.037.844.000,00	103,78	1.021.680.000,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	64.417.786.040,00	10.741.508.425,00	16,67	17.300.096.496,00
11	Retribusi Terminal	440.000.000,00	108.000.000,00	24,55	116.985.000,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	574.865.500,00	334.850.000,00	58,25	-
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	46.513.540,00	31.516.500,00	67,76	28.894.000,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	925.709.756,00	557.714.000,00	60,25	504.051.000,00
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	93.813.463,00	60.380.000,00	64,36	37.347.000,00
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.000.000.000,00	1.787.297.367,00	29,79	4.599.195.038,00
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	202.165.148,00	48.100.000,00	23,79	63.735.500,00
	Jumlah	156.634.653.646,00	55.688.506.176,00	35,55	77.253.777.415,66

Dari 17 jenis Retribusi yang dikelola pada TA 2023, terdapat empat jenis Retribusi melebihi 100% capaian dari APBD-P. Adapun pelampauan realisasi tertinggi pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar 104,85%. Sedangkan pencapaian terendah dari anggaran adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 10,42%. Namun secara nilai, Pendapatan Retribusi tertinggi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu sebesar Rp38.633.965.834,00, dengan persentase capaian 51,29%.



6.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 berasal dari Pendapatan Deviden dari BUMD, yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Bank Kuningan	1.800.000.000,00	1.585.490.018,00	88,08	1.210.963.389,00
2	PDAM Tirta Kamuning	2.491.500.000,00	1.885.736.870,00	75,69	1.939.865.548,00
3	Bank Jabar	3.080.000.000,00	3.203.634.482,00	104,01	2.757.035.311,00
	Jumlah	7.371.500.000,00	6.674.861.370,00	90,55	5.907.864.248,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 seluruhnya mencapai anggaran APBD-P. Secara nilai, pencapaian target tertinggi yaitu dari penerimaan deviden dari Bank Jabar. Selain ketiga BUMD tersebut, terdapat satu BUMD lainnya yaitu PDAU Darma Putra Kerta Raharja dan PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kuningan yang belum memberikan kontribusi pada TA 2022. PDAU Darma Putra Kerta Raharja pada TA 2021 mengalami restrukturisasi internal. Pada TA 2022, PDAU Darma Putra Kerta Raharja sudah beroperasi kembali, namun belum dapat memberikan kontribusi. PT LKM Kuningan sejak TA 2020 mengalami kerugian akibat adanya kredit macet sebagai dampak pandemi Covid-19.

6.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pada TA 2023, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	828.905.699,00	1.062.593.973,00	128,19	321.358.287,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	9.675.000.000,00	7.346.363.183,00	75,93	6.703.873.334,00
3	Jasa Giro	46.639.949.295,00	1.766.964.697,00	3,79	1.907.392.832,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.550.000.000,00	18.136.900,00	1,17	236.124.800,00
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	82.698.780,00	325.476.419,00	393,57	205.807.320,00
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	9.350.615,00	15.204.265,00	162,60	23.790.167,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	1.608.750.000,00	4.953.985.894,00	307,94	1.754.926.353,00
8	Pendapatan BLUD	115.601.132.998,00	105.524.787.104,00	91,28	109.526.163.026,00
9	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	46.554.305.623,00	44.380.704.105,00	95,33	33.849.425.649,00
	Jumlah	222.550.093.010,00	165.394.216.540,00	74,32	154.528.861.768,00



Pada TA 2023, Pencapaian realisasi Lain-Lain PAD yang Sah mencapai 74,32% atau senilai Rp165.394.216.540,00 dari APBD-P. Penyebab utama kecilnya capaian adalah Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah yang ditargetkan dalam APBD-P sebesar Rp1.550.000.000,00, namun realisasi hanya sebesar Rp18.136.900,00 atau 1,17% dari APBD-P. Hal ini dikarenakan dana yang ada pada rekening di Kas Daerah maupun rekening di Bendahara Pengeluaran SKPD tidak mengalami pengendapan. Sehingga dengan arus kas yang tinggi tersebut tidak memberikan Jasa Giro atas rekening.

Capaian persentase realisasi Lain-Lain PAD yang Sah terbesar adalah pendapatan dari Denda Pajak Daerah, yaitu 393,57% dari APBD-P. Dilihat dari nilai realisasi, Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp3.338.377.567,00. Apabila dibandingkan dengan capaian TA 2022, Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah mengalami TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.857.835.490,00 (Rp165.386.697.258,00 - Rp154.528.861.768,00) atau (6,57%).

6.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer pada TA 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022
			Rp	%	Rp
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.156.778.483.113,00	2.124.497.547.732,00	98,50	2.072.355.555.913,00
2	Transfer Pemerintah Daerah	396.647.943.243,00	361.867.117.229,00	91,23	250.957.072.086,00
	Jumlah	2.553.426.426.356,00	2.486.364.664.961,00	97,37	2.323.312.627.999,00

Pada TA 2023, realisasi Pendapatan Transfer mencapai target APBD-P sebesar 97,37%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2022, maka terjadi kenaikan sebesar Rp163.052.036.962,00 (Rp2.486.364.664.961,00 - Rp2.323.312.627.999,00) atau 6,56%. Kenaikan tersebut diperoleh dari kenaikan Pendapatan Transfer Pusat sebesar Rp52.141.991.819,00 dan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp110.910.045.143,00.

6.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pada TA 2023, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022
			Rp	%	(Rp)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.156.778.483.113,00	2.124.497.547.732,00	98,50	2.072.355.555.913,00
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	73.516.906.113,00	60.719.699.944,00	82,59	83.910.077.498,00
	Pajak Bumi & Bangunan	7.815.551.175,00	4.538.628.386,00	58,07	7.855.720.733,00
	PPh Pasal 21	32.076.039.738,00	31.167.410.407,00	97,17	32.197.016.415,00
	DBHCHT	9.521.550.432,00	9.521.550.432,00	100,00	6.237.564.434,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	9.053.311.132,00	6.182.223.527,00	68,29	13.278.723.953,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	262.262.063,00	845.734.513,00	322,48	-
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	12.652.193.423,00	6.336.529.811,00	50,08	20.613.333.652,00
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	363.354.609,00	355.311.599,00	97,79	1.443.936.099,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	300.949.330,00	300.617.058,00	99,89	325.471.212,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.471.694.211,00	1.471.694.211,00	100,00	1.958.311.000,00
2	Dana Alokasi Umum	1.151.041.030.000,00	1.150.587.239.500,00	99,96	1.107.697.897.206,00
	DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	856.244.644.000,00	855.790.853.500,00	99,96	1.107.697.897.206,00
	DAU Penggajian Formasi PPPK	66.812.880.000,00	66.812.880.000,00	100,00	-
	DAU Pendanaan Kelurahan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-
	DAU Bidang Pendidikan	153.677.275.000,00	153.677.275.000,00	100,00	-
	DAU Bidang Kesehatan	49.712.229.000,00	49.712.229.000,00	100,00	-
	DAU Bidang Pekerjaan Umum	21.594.002.000,00	21.594.002.000,00	100,00	-
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	91.389.992.000,00	90.399.118.635,00	98,92	132.248.120.897,00
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	475.288.347.000,00	457.249.281.653,00	96,20	433.297.752.312,00
6	Dana Desa	352.599.938.000,00	352.599.938.000,00	100,00	315.201.708.000,00
7	Insentif Fiskal	12.942.270.000,00	12.942.270.000,00	100,00	-
	Jumlah	2.156.778.483.113,00	2.124.497.547.732,00	98,50	2.072.355.555.913,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar 98,50% dari APBD-P. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada TA 2022, terjadi kenaikan sebesar Rp52.141.991.819,00 atau 2,52%. Untuk TA 2023, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tertinggi secara persentase yaitu dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi yang mencapai realisasi sebesar 322,48% dari APBD-P.

Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan termasuk pendapatan yang disalurkan tidak melalui Kas Daerah seperti DAK Non Fisik BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Dana tersebut disalurkan langsung ke SD dan



SMP serta Kelompok Belajar. Pada TA 2023, pendapatan BOS dianggarkan pada Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Selain itu Dana Non Kas Daerah lainnya berupa JKN yaitu Dana yang disalurkan langsung ke BLUD Puskesmas lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan. Terdapat pula pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan lainnya yang tidak melalui Kas Daerah adalah Dana Desa. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang langsung diterima pada Rekening Kas Desa.

6.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Untuk realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
I	Bagi Hasil Pajak	163.249.853.743,00	134.832.812.856,00	82,59	143.009.228.224,00
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	39.629.779.612,00	64.304.539.228,00	162,26	37.823.680.243,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.860.743.836,00	8.630.337.750,00	43,45	17.397.949.020,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.805.507.685,00	14.786.176.261,00	45,07	28.584.071.117,00
4	Dana Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	1.156.165.150,00	339.851.800,00	29,39	1.259.849.650,00
5	Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok	69.797.657.460,00	46.771.907.817,00	67,01	57.943.678.194,00
II	Bantuan Keuangan	233.398.089.500,00	227.034.304.373,00	97,27	107.947.843.862,00
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	233.398.089.500,00	227.034.304.373,00	97,27	107.947.843.862,00
	Jumlah	396.647.943.243,00	361.867.117.229,00	91,23	250.957.072.086,00

Pada TA 2023, Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp361.867.117.229,00 atau 91,23% dari Anggaran sebesar Rp396.647.943.243,00. Nilai tersebut terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi yang terealisasi sebesar Rp134.832.812.856,00 ditambah Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp227.034.304.373,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022, dengan total kenaikan senilai Rp110.910.045.143,00. Kenaikan tersebut diperoleh dari nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp361.867.117.229,00 dikurangi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp250.957.072.086,00.

6.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dapat dirinci sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
			Rp	%		
1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	5.287.120.850,00	88,12	9.755.148.980,00	(4.468.028.130,00)
	Jumlah	6.000.000.000,00	5.287.120.850,00	88,12	9.755.148.980,00	(4.468.028.130,00)

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp5.287.120.850,00, atau 88,12% dari APBD-P. Jika dibandingkan dengan TA 2022 terdapat penurunan sebesar (Rp4.468.028.130,00).

6.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
			Rp	%		
1	Hibah Air minum Perkotaan dan Perdesaan	6.000.000.000,00	5.287.120.850,00	88,12	5.166.000.000,00	121.120.850,00
2	Hibah <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program</i> (IPDMIP)	-	-	-	4.589.148.980,00	(4.589.148.980,00)
	Jumlah	6.000.000.000,00	5.287.120.850,00	88,12	9.755.148.980,00	(4.468.028.130,00)

Pendapatan Hibah TA 2023 merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp5.287.120.850,00 atau 88,12% dari APBD-P. Pendapatan Hibah ditujukan untuk membiayai kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022, terdapat kenaikan nilai Pendapatan Hibah Air minum Perkotaan dan Perdesaan sebesar Rp121.120.850,00. Sedangkan Hibah IPDMIP mengalami penurunan sebesar Rp4.589.148.980,00 dikarenakan tidak adanya Hibah IPDMIP pada Tahun 2023.

6.1.2 BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah dalam APBD-P dialokasikan sebesar Rp3.107.960.488.660,00 dan direalisasikan sebesar Rp 2.832.406.522.597,00 atau 91,13% dari APBD-P. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Operasi	2.200.548.649.899,00	2.071.607.933.939,00	94,14	2.010.061.509.032,00
2	Belanja Modal	399.397.428.405,00	254.910.604.687,00	63,82	229.856.933.449,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
3	Belanja Tak Terduga	11.389.280.788,00	9.491.497.400,00	83,34	11.870.504.527,00
4	Belanja Transfer	496.625.129.568,00	496.396.486.571,00	99,95	456.726.703.588,00
	Jumlah	3.107.960.488.660,00	2.832.406.522.597,00	91,13	2.708.515.650.596,00

Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer seluruhnya berada dibawah alokasi anggaran yang disediakan, dan realisasi tertinggi adalah Belanja Transfer yaitu sebesar 99,95% dari APBD-P.

6.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (TA)
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.248.571.524.797,00	1.236.027.150.638,00	99,00	1.146.569.988.635,00
2	Belanja Barang dan Jasa	851.238.937.094,00	740.038.445.929,00	86,94	787.351.371.791,00
3	Belanja Bunga	2.870.630.258,00	2.619.236.622,00	91,24	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	1.408.740.156,00
5	Belanja Hibah	88.066.532.750,00	83.430.575.750,00	94,74	66.576.805.450,00
6	Belanja Bantuan Sosial	9.801.025.000,00	9.492.525.000,00	96,85	8.154.603.000,00
	Jumlah	2.200.548.649.899,00	2.071.607.933.939,00	94,14	2.010.061.509.032,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp2.071.607.933.939,00 atau 94,14% APBD-P. Apabila dibandingkan dengan Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp2.010.061.509.032,00 maka terjadi kenaikan realisasi belanja operasional sebesar Rp61.546.424.907,00 atau 3,06% dari APBD-P. Berikut penjelasan ringkas mengenai Belanja Operasi TA 2023:

6.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp1.236.027.150.638,00 atau 99,00% dari APBD-P. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
			Rp	%		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	798.231.825.385,00	792.250.178.562,00	99,25	768.880.426.518,00	23.369.752.044,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	131.831.252.606,00	126.664.423.167,00	96,08	129.158.370.461,00	(2.493.947.294,00)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
			Rp	%		
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	279.262.049.420,00	278.621.173.515,00	99,77	210.623.187.049,00	67.997.986.466,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.892.503.939,00	32.864.924.736,00	99,92	32.611.601.021,00	253.323.715,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH	711.479.552,00	592.696.003,00	83,30	549.298.198,00	43.397.805,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ KWH	1.200.000.000,00	1.150.000.000,00	95,83	600.000.000,00	550.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	4.442.413.895,00	3.883.754.655,00	87,42	4.147.105.388,00	(263.350.733,00)
	Jumlah	1.248.571.524.797,00	1.236.027.150.638,00	99,00	1.146.569.988.635,00	89.457.162.003,00

Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp89.457.162.003,00 bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2022. Realisasi Belanja Pegawai LRA per SKPD disajikan pada lampiran 1.

6.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa untuk TA 2023 direalisasi sebesar Rp740.038.445.929,00 atau 86,94% dari APBD-P.

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Barang	296.260.092.803,00	244.297.513.759,00	82,46	256.698.547.752,00
2	Belanja Jasa	214.254.105.317,00	176.318.218.149,00	82,29	221.838.509.019,00
3	Belanja Pemeliharaan	5.308.149.658,00	4.461.094.234,00	84,04	10.015.401.643,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	33.452.311.000,00	30.130.567.343,00	90,07	64.990.197.476,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	1.909.300.000,00	1.771.750.000,00	92,80	4.401.400.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	111.400.490.802,00	116.773.864.788,00	104,82	115.201.551.998,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	188.654.487.514,00	166.285.437.656,00	88,14	114.205.763.903,00
	Jumlah	851.238.937.094,00	740.038.445.929,00	86,94	787.351.371.791,00

Nilai realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp47.312.925.862,00 atau 6,01% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada lampiran 2 s.d.4.

6.1.2.1.3 Belanja Bunga Utang Pinjaman pada Lembaga Keuangan Bank

Belanja Bunga Utang Pinjaman pada Lembaga Keuangan Bank yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan pada TA 2023 sebesar Rp2.870.630.258,00 dengan realisasi sebesar Rp2.619.236.622,00 atau 91,24%.



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat belanja bunga utang pinjaman, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman pada Lembaga Keuangan Bank	2.870.630.258,00	2.619.236.622,00	91,24	0,00
	Jumlah	2.870.630.258,00	2.619.236.622,00	91,24	0,00

6.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat Belanja Subsidi. Berbeda dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat realisasi Belanja Subsidi seperti tergambar dalam tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Subsidi	-	-	-	1.408.740.156,00
	Jumlah	-	-	-	1.408.740.156,00

6.1.2.1.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp88.066.532.750,00 realisasi sebesar Rp83.430.575.750,00 atau 94,73%. Belanja Hibah ini yaitu untuk:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
I	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
II	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	86.418.637.500,00	81.782.680.500,00	94,64	65.028.910.200,00
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	75.455.057.500,00	73.260.180.500,00	97,09	50.741.146.200,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat KeteranganTerdaftar	6.127.500.000,00	4.667.500.000,00	76,17	10.425.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.501.080.000,00	1.945.000.000,00	77,77	3.462.764.000,00
4	Belanja Hibah kepada Koperasi	350.000.000,00	275.000.000,00	78,57	400.000.000,00
5	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	1.410.000.000,00	1.160.000.000,00	82,27	-
6	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	575.000.000,00	475.000.000,00	82,61	-
III	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.547.895.250,00	1.547.895.250,00	100,00	1.547.895.250,00
	Jumlah	88.066.532.750,00	83.430.575.750,00	94,73	66.576.805.450,00

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terdapat kenaikan realisasi belanja hibah sebesar Rp16.853.770.300,00 atau 25,31% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Rincian atas Belanja Hibah dan penerima hibah dapat dilihat pada lampiran 5.a dan lampiran 5.b.

6.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dialokasikan sebesar Rp9.801.025.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.492.525.000,00 atau 96,85% dari APBD-P. Namun jika dibandingkan dengan TA 2022, Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp1.337.922.000,00. Realisasi Belanja ini diperuntukan untuk:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
			Rp	%		
1	Bantuan Sosial kepada Individu	5.266.525.000,00	5.266.525.000,00	100,00	5.185.802.000,00	80.723.000,00
2	Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
3	Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	50.000.000,00	33,33	494.801.000,00	(444.801.000,00)
4	Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan)	4.384.500.000,00	4.176.000.000,00	95,24	2.424.000.000,00	1.752.000.000,00



No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
			Rp	%		
	dan Bidang Lainnya)					
	Jumlah	9.801.025.000,00	9.492.525.000,00	96,85	8.154.603.000,00	1.337.922.000,00

Belanja Bantuan Sosial dapat berupa uang maupun barang. Untuk Bantuan Sosial berupa uang ditujukan kepada kelompok masyarakat atau pun individu untuk biaya pengobatan, kegiatan pembinaan mental dan spiritual serta bantuan stimulan rumah tidak layak huni. Sementara Bantuan Sosial berupa barang diantaranya berupa bahan material untuk rumah korban bencana, bahan pangan, bibit ternak dan tanaman, alat bantu bagi penyandang disabilitas dan sebagainya. Untuk rincian belanja bantuan sosial dapat dilihat pada *lampiran 6*.

6.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Tanah	11.225.542.130,00	11.192.050.724,00	99,70	26.751.824.467,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.460.032.188,00	67.447.867.808,00	34,33	49.977.556.706,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.715.786.106,00	81.763.034.176,00	94,29	66.623.156.876,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	89.731.312.150,00	86.485.838.150,00	96,38	79.711.956.467,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.760.417.444,00	7.989.804.829,00	54,13	6.792.438.933,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	504.338.387,00	32.009.000,00	6,35	-
	Jumlah	399.397.428.405,00	254.910.604.687,00	63,82	229.856.933.449,00

Pada TA 2023, Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar 399.397.428.405,00 dan direalisasikan sebesar Rp254.878.595.687,00 atau 63,82%. Jika dibandingkan dengan TA 2022, realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp25.053.671.238,00 (Rp254.910.604.687,00-Rp229.856.933.449,00) atau 10,90%. Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Realisasi Belanja Modal Per SKPD sebesar Rp254.910.604.687,00 pada *lampiran 7*.

6.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022
			Rp	%	Rp
1	Belanja Modal Tanah				
-	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	11.225.542.130,00	11.192.050.724,00	99,70	26.751.824.467,00
	Jumlah	11.225.542.130,00	11.192.050.724,00	99,70	26.751.824.467,00



Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp11.225.542.130,00 dengan realisasi sebesar Rp11.192.050.724,00 atau 99,70%. Realisasi Belanja Modal Tanah ini digunakan untuk pengadaan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS). Jika dibandingkan dengan Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022, Belanja Modal Tanah ini mengalami penurunan sebesar Rp15.559.773.743,00 yang diperoleh dari nilai realisasi tahun 2023 sebesar Rp11.192.050.724,00 dikurangi realisasi tahun 2022 sebesar Rp26.751.824.467,00 atau menurun sekitar 139,03%

6.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp196.460.032.188,00 dan terealisasi sebesar Rp67.447.867.808,00 atau hanya sebesar 34,33%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut digunakan untuk:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022
			Rp	%	Rp
1	Belanja Modal Alat Besar	86.280.400,00	76.694.000,00	88,89	874.452.350,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	1.353.420.000,00	1.084.843.000,00	80,16	4.038.272.880,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	39.420.000,00	39.420.000,00	100,00	64.280.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	50.226.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.653.136.005,00	2.383.135.525,00	89,82	4.805.933.630,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	137.833.505,00	96.157.000,00	69,76	655.113.400,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.212.642.063,00	9.506.117.407,00	93,08	12.115.802.903,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	6.021.400.000,00	6.021.400.000,00	100,00	651.742.500,00
9	Belanja Modal Komputer	26.886.125.500,00	26.278.971.730,00	97,74	6.038.941.177,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	6.000.000,00
11	Belanja Modal Alat Peraga	360.000.000,00	234.800.000,00	65,22	7.560.000.000,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	125.708.623.950,00	8.150.647.950,00	6,48	-
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.214.952.326,00	6.582.963.823,00	43,27	7.705.167.296,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.786.198.439,00	6.992.717.373,00	89,81	5.122.158.520,00
	Jumlah	196.460.032.188,00	67.447.867.808,00	34,33	49.977.556.706,00

Berdasarkan tabel di atas, nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 34,96% atau Rp17.470.311.102,00, yaitu Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp67.447.867.808,00 dikurangi Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp49.977.556.706,00.



6.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp81.763.034.176,00 atau 94,29% dari anggaran sebesar Rp86.715.786.106,00. Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	85.543.901.506,00	80.584.149.676,00	94,20	64.235.321.076,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	859.902.100,00	859.902.000,00	100,00	2.188.294.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	311.982.500,00	318.982.500,00	102,24	199.541.800,00
	Jumlah	86.715.786.106,00	81.763.034.176,00	94,29	66.623.156.876,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 22,72% atau sebesar Rp15.139.877.300,00 yaitu dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp81.763.034.176,00 dikurangi realisasi Tahun 2022 sebesar Rp66.623.156.876,00.

6.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	77.740.284.750,00	75.347.502.150,00	96,92	55.087.467.100,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	10.981.960.000,00	10.302.843.600,00	93,82	10.491.101.000,00
3	Belanja Modal Instalasi	34.678.700,00	34.678.700,00	100,00	3.194.714.300,00
4	Belanja Modal Jaringan	974.388.700,00	800.813.700,00	82,19	10.938.674.067,00
	Jumlah	89.731.312.150,00	86.485.838.150,00	96,38	79.711.956.467,00

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp89.731.312.150,00 dengan realisasi sebesar Rp86.485.838.150,00 atau sebesar 96,38%. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.773.881.683,00 atau senilai 8,50%, yakni realisasi Tahun 2023 sebesar Rp86.485.838.150,00 dikurangi realisasi Tahun 2022 sebesar Rp79.711.956.467,00.

6.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp7.989.804.829,00 atau 52,95% dari alokasi anggaran sebesar Rp14.760.417.444,00 Belanja tersebut ditujukan untuk:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	39.450.000,00	39.450.000,00	100,00	48.203.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	100.000.000,00	-	-	210.853.500,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	84.918.000,00	81.918.000,00	96,47	55.684.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.421.756.872,00	7.868.436.829,00	54,56	6.477.698.433,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	114.292.572,00	-	-	-
	Jumlah	14.760.417.444,00	7.989.804.829,00	54,13	6.792.438.933,00

Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.197.365.896,00 (Rp7.989.804.829,00 - Rp6.792.438.933,00) atau senilai 17,63%.

6.1.2.3 Belanja Modal Aset Lainnya

Nilai realisasi Belanja Modal Aset lainnya sebesar Rp32.009.000,00 dari anggaran sebesar Rp 504.338.387,00 atau sebesar 6,35%. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	17.010.000,00	17.010.000,00	100	-
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	487.328.387,00	14.999.000,00	3,08	-
	Jumlah	504.338.387,00	32.009.000,00	6,35	-

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya per SKPD dapat dilihat pada lampiran 8.

6.1.2.4 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga diperuntukan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pada TA 2023 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp11.389.280.788,00 dan direalisasikan sebesar Rp9.491.497.400,00 atau 83,34%.

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
A	Anggaran Belanja Tak Terduga	11.389.280.788,00			
1	Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Covid 19 Tahun Anggaran 2022		-		5.765.999.832,00
2	Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Non Covid-19		-		6.097.944.200,00
3	Pembayaran Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2021		3.750.000.000,00		6.560.495,00
4	Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana kebakaran hutan dan lahan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dan lahan lainnya		152.260.000,00		-



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
5	Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Tanah Longsor, Kebakaran Rumah, Rumah Ambruk dan Pencarian Orang Hanyut		5.589.237.400,00		
	Jumlah	11.389.280.788,00	9.491.497.400,00	83,34	11.870.504.527,00

6.1.2.5 Belanja Transfer

Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Kuningan mengalokasikan Belanja Transfer sebesar Rp496.625.129.568,00 dan direalisasikan sebesar Rp496.396.486.571,00 atau 99,95%. Rincian Belanja Transfer TA 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
A	BAGI HASIL	18.381.838.818,00	18.185.397.238,00	98,93	15.921.642.838,00
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.695.987.684,00	7.595.987.684,00	98,70	6.769.979.323,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	10.685.851.134,00	10.589.409.554,00	99,10	9.151.663.515,00
B	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	478.243.290.750,00	478.211.089.333,00	99,99	440.805.060.750,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	478.243.290.750,00	478.211.089.333,00	99,99	440.805.060.750,00
	JUMLAH	496.625.129.568,00	496.396.486.571,00	99,95	456.726.703.588,00

6.1.2.5.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil TA 2023 dianggarkan sebesar Rp18.381.838.818,00 dan direalisasikan sebesar Rp18.185.397.238,00 atau 98,93% dari APBD-P, Rincian Belanja Bagi Hasil untuk:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa	7.695.987.684,00	7.595.987.684,00	98,70	6.769.979.323,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	10.685.851.134,00	10.589.409.554,00	99,10	9.151.663.515,00
	Jumlah	18.381.838.818,00	18.185.397.238,00	98,93	15.921.642.838,00



6.1.2.5.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp478.243.290.750,00 dan direalisasikan sebesar Rp478.211.089.333,00 atau 99,99%. Rincian Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	315.201.708.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	478.243.290.750,00	478.211.089.333,00	99,99	125.603.352.750,00
	Jumlah	478.243.290.750,00	478.211.089.333,00	99,99	440.805.060.750,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp478.211.089.333,00, terdiri dari Dana Desa Rp352.599.938.000,00 dan Siltap sebesar Rp125.611.151.333,00.

Rincian Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dapat dilihat pada lampiran 9.

6.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan baik Penerimaan maupun Pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Kuningan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.725.071.348,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.918.855.748,00	15.908.071.348,13	99,93	65.266.792.658,47
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	17.400.000.000,00	17.400.000.000,00	100,00	-
6.1.03	Penerimaan Pinjaman Daerah	60.000.000.000,00	38.986.789.700,00	64,98	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	93.318.855.748,00	72.294.861.048,13	77,47	65.266.792.658,47
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00	4.083.000.000,00	90,73	5.499.999.390,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	38.986.789.700,00	38.986.789.700,00	100,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	66.986.789.700,00	66.569.789.700,00	99,38	20.499.999.390,00
	Pembiayaan Netto	26.332.066.048,00	5.725.071.348,13	21,74	44.766.793.268,47



6.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp93.318.855.748,00 dan terealisasi sebesar Rp72.294.861.048,13 atau 77,47%. Rincian dari Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

6.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp15.918.855.748,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.908.071.348,13 atau 99,93%. Terdapat selisih sebesar Rp10.784.399,87 yang merupakan koreksi saldo awal BOS SMP karena penutupan salah satu sekolah.

6.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Dana Cadangan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Berdasarkan Bab III, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati ditetapkan sebesar Rp38.500.000.000,00. Selanjutnya masih pada pasal 4 ayat (2) ditetapkan bahwa pemenuhan Dana Cadangan tersebut dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.500.000.000,00.

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 menyatakan bahwa pencairan Dana Cadangan untuk Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 adalah sebesar 40% di Tahun Anggaran 2023 dan 60% di Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian pada Tahun Anggaran 2023 Penerimaan Pembiayaan berupa Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp17.400.000.000,00 atau 40% dari Total Nilai Pembentukan Dana Cadangan, serta terealisasi sebesar Rp17.400.000.000,00 (100%). Pencairan Dana Cadangan tersebut digunakan untuk membiayai Kegiatan Belanja Hibah ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

6.1.3.1.3 Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp60.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp38.986.789.700,00. Pinjaman tersebut digunakan untuk menjaga ketersediaan Kas di RKUD dalam rangka persiapan pembayaran Gaji ke-14 Tahun 2023.

6.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2023, Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp66.986.789.700,00 dan direalisasikan sebesar Rp66.569.789.700,00 atau 99,38%. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah sebesar Rp23.500.000.000, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD sebesar Rp4.083.000.000,00 dan Pembayaran



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pinjaman Daerah sebesar Rp38.986.789.700,00. Rincian dari Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)
			Rp	%	
1	Pembentukan Dana Cadangan	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD	4.500.000.000,00	4.083.000.000,00	90,73	5.499.999.390,00
	PT Bank BJB	-	-	-	2.499.999.390,00
	PAM Tirtakamuning	3.000.000.000,00	2.583.000.000,00	86,10	3.000.000.000,00
	PT. Lembaga Keuangan Mikro	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	
3	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	38.986.789.700,00	38.986.789.700,00	100,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	66.986.789.700,00	66.569.789.700,00	99,38	20.499.999.390,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pembentukan Dana Cadangan yang direalisasikan sebesar Rp23.500.000.000,00(100%) sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Dana Cadangan tersebut disimpan dalam bentuk Deposito Milik Pemerintah Kabupaten Kuningan di Bank BJB Cabang Kuningan.

Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.083.000.000,00 atau 90,73% dari Anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00. Investasi tersebut kepada PAM Tirta Kamuning sebesar Rp2.583.000.000,00 dan PT Lembaga Keuangan Mikro sebesar Rp1.500.000.000,00.

Pengeluaran pembiayaan selanjutnya adalah Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank yang direalisasi sebesar Rp38.986.789.700,00 (100%). Pengeluaran tersebut untuk membayar Pinjaman Jangka Pendek dari Bank BJB Cabang Kuningan.

6.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran TA 2023.

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	SILPA	-	15.340.516.965,13	-	15.918.855.748,13

SILPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp15.340.516.965,13. Apabila dibandingkan dengan realisasi SiLPA TA 2022, maka terjadi penurunan SiLPA di TA 2023 sebesar Rp578.338.783,00 (Rp15.340.516.965,13-Rp15.918.855.748,13) atau 3,63%. SILPA TA 2023 terdiri dari:

a.	Kas di Kas Daerah	Rp	2.101.955.329,00
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	45.455.966,00
c.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	10.882.668,00
d.	Kas di Bendahara BLUD RSUD 45	Rp	13.168.966.760,13
e.	Kas di Bendahara BOS	Rp	5.736.960,00
f.	Kas Lainnya di Bend Bidang	Rp	7.519.282,00
	Jumlah	Rp	15.340.516.965,13



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

a. Rincian Kas di Kas Daerah sebesar Rp2.101.955.329,00 sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
1	Retribusi Daerah	-	523.880.243,00	(523.880.243,00)
2	Jasa Giro	-	42.249.778,00	(42.249.778,00)
3	Bantuan Keuangan Provinsi	2.101.955.329,00	-	2.101.955.329,00
	Jumlah	2.101.955.329,00	566.130.021,00	1.535.825.308,00

b. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp45.455.966,00 terdiri dari:

1.	RSUD Linggajati	Rp	2.636.500,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp	14.465.000,00
3.	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Rp	28.354.000,00
4.	Dinas Kesehatan (Labkesda 2022)	Rp	466,00
	Jumlah	Rp	45.455.966,00

c. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.882.668,00 terdiri dari:

1.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	10.500.000,00
2.	Kec. Kuningan	Rp	342,00
3.	Kec. Cigugur	Rp	279.750,00
4.	Kec. Cidahu	Rp	96.576,00
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	10.882.668,00

d. Kas di BLUD sebesar Rp13.168.966.760,13,00 terdiri dari:

1.	Kas di BLUD Puskesmas	Rp	2.857.532.652,13
2.	Kas di BLUD RSUD 45	Rp	6.635.295.208,00
3.	Kas di BOK Puskesmas	Rp	3.676.138.900,00
	Jumlah	Rp	13.168.966.760,13

e. Kas di BOS sebesar Rp5.736.960,00

f. Kas Lainnya di Bendahara Bidang Rp7.519.282,00

Selain itu Kas Lainnya terdiri dari PFK yang merupakan utang pajak senilai Rp658.930.940,52, Kas Lainnya di Bidang-Bidang pada beberapa SKPD sebesar Rp491.153,00 dan Kas Lainnya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp63.670.426,00.

Selain dari SILPA yang telah dijelaskan di atas, seharusnya terdapat sisa dana dari Pendapatan Transfer yang merupakan belanja wajib. Sisa dana tersebut pada Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang didanai dari PAD karena tidak tercapainya target PAD. Rincian sisa dana tersebut sebagai berikut:

NO	URAIAN	PER 31 DES 2022 (Rp)	KAS MASUK (Rp)	PENGUNAAN (Rp)	PER 31 DES 2023 (Rp)
	PENDAPATAN DAERAH	86.905.552.460,00	1.735.329.757.211,00	1.633.796.524.121,00	190.540.740.879,00
	PENDAPATAN TRANSFER	86.905.552.460,00	1.735.329.757.211,00	1.633.796.524.121,00	190.540.740.879,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	62.222.537.346,00	1.508.295.452.838,00	1.500.536.187.774,00	69.981.802.410,00
	DANA PERIMBANGAN	62.222.537.346,00	1.508.295.452.838,00	1.500.536.187.774,00	69.981.802.410,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-	60.719.699.944,00	60.719.699.944,00	-
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	-	4.538.628.386,00	4.538.628.386,00	-
	DBH PPh Pasal 21	-	31.167.410.407,00	31.167.410.407,00	-



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023*

NO	URAIAN	PER 31 DES 2022 (Rp)	KAS MASUK (Rp)	PENGGUNAAN (Rp)	PER 31 DES 2023 (Rp)
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		9.521.550.432,00	9.521.550.432,00	-
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi		6.182.223.527,00	6.182.223.527,00	-
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi		845.734.513,00	845.734.513,00	-
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi		6.336.529.811,00	6.336.529.811,00	-
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty		355.311.599,00	355.311.599,00	-
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		300.617.058,00	300.617.058,00	-
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan		1.471.694.211,00	1.471.694.211,00	-
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1.150.587.239.500,00	1.102.627.307.414,00	47.959.932.086,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)		1.080.774.359.500,00	1.080.774.359.500,00	-
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		66.812.880.000,00	18.852.947.914,00	47.959.932.086,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	13.991.054.005,00	9.976.127.735,00	23.892.517.677,00	74.664.063,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	3.129.850.000,00	3.129.850.000,00	-
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	27.975.672.000,00	27.975.672.000,00	-
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	36.666.783.900,00	36.666.783.900,00	-
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	-	-	-
1	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.506.528.887,00		2.506.528.887,00	-
2	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	3.202.848,00	848.000.000,00	851.202.848,00	-
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	-	-	-
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Keluarga Berencana	-	1.736.099.240,00	1.728.774.327,00	7.324.913,00
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Pemukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-			-
4	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	74.172.471,00	-	74.172.471,00	-
5	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.465.976.902,00		5.465.976.902,00	-
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	2.319.682.400,00		2.319.682.400,00	-
7	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	384.957.850,00	7.033.220.000,00	7.418.177.850,00	-
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	9.747.165.000,00	9.747.165.000,00	-
8	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	376.463.200,00	-	376.463.200,00	-
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	2.903.520.000,00	2.903.520.000,00	-
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	2.860.069.447,00	358.808.495,00	3.151.538.792,00	67.339.150,00



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023*

NO	URAIAN	PER 31 DES 2022 (Rp)	KAS MASUK (Rp)	PENGUNAAN (Rp)	PER 31 DES 2023 (Rp)
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	48.231.483.341,00	287.012.385.659,00	313.296.662.739,00	21.947.206.261,00
3	DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	40.146.233.320,00	237.474.250.680,00	267.562.719.300,00	10.057.764.700,00
4	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD	100.500.000,00	5.996.250.000,00	5.042.750.000,00	1.054.000.000,00
	DAK Non Fisik-Tunjangan Kinerja Guru (TKG) PNSD	-	-	-	-
	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	-	700.000.000,00	700.000.000,00	-
5	DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	5.743.771.076,00	6.019.569.924,00	5.998.631.639,00	5.764.709.361,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	-	25.475.623.000,00	25.475.623.000,00	-
	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	-	-	-	-
6	DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.202.208.945,00	10.880.937.055,00	8.188.717.800,00	4.894.428.200,00
	DAK Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	-	406.770.000,00	406.770.000,00	-
	DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal	-	406.900.000,00	406.900.000,00	-
7	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	438.800.000,00	426.675.000,00	12.125.000,00
8	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	38.770.000,00	726.955.000,00	601.546.000,00	164.179.000,00
		-	-	-	-
	Insentif Fiskal		12.942.270.000,00	12.942.270.000,00	-
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	24.683.015.114,00	227.034.304.373,00	133.260.336.347,00	120.558.938.469,00
	Pendapatan Bagi Hasil	-	134.832.812.856,00	134.832.812.856,00	-
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	134.832.812.856,00	134.832.812.856,00	-
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	64.304.539.228,00	64.304.539.228,00	-
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	8.630.337.750,00	8.630.337.750,00	-
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	14.786.176.261,00	14.786.176.261,00	-
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	-	339.851.800,00	339.851.800,00	-
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	46.771.907.817,00	46.771.907.817,00	-
		-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	24.683.015.114,00	227.034.304.373,00	131.158.381.018,00	120.558.938.469,00
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	24.683.015.114,00	227.034.304.373,00	131.158.381.018,00	120.558.938.469,00
9	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat	24.683.015.114,00	227.034.304.373,00	131.158.381.018,00	120.558.938.469,00
		-	-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	5.287.120.850,00	5.287.120.850,00	-
	PENDAPATAN HIBAH	-	5.287.120.850,00	5.287.120.850,00	-
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	5.287.120.850,00	5.287.120.850,00	-
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	5.287.120.850,00	5.287.120.850,00	-
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	5.287.120.850,00	5.287.120.850,00	-
	JUMLAH	86.905.552.460,00	1.735.329.757.211,00	1.633.796.524.121,00	190.540.740.879,00



Pendapatan Transfer Tahun 2023 yang digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang seharusnya dibayar dari PAD telah dianggarkan kembali di Tahun 2024 untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan peruntukan dana-dana tersebut.

6.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023 adalah Rp15.340.516.965,13. Nilai tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan TA 2022. Penyajian LPSAL TA 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	15.918.855.748,13	65.266.792.658,47
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	15.908.071.348,13	65.266.792.658,47
3	Sub Total (1-2)	10.784.400,00	-
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	15.340.516.965,13	15.918.855.748,13
5	Sub Total (3+4)	15.351.301.365,13	15.918.855.748,13
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(10.784.400,00)	-
7	Lain-Lain	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	15.340.516.965,13	15.918.855.748,13

6.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.918.855.748,13 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Kas di Kas Daerah	566.130.021,00
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran (UYHD)	24.545.838,00
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	28.180.384,66
d.	Kas di Bendahara BOS (UYHD)	27.478.806,00
e.	Kas di Bendahara BLUD	13.477.341.729,00
f.	Kas di Bendahara Kapitasi JKN (UYHD)	1.792.619.266,47
g.	Kas Lainnya (Jasa Giro)	2.559.703,00
	Jumlah	15.918.855.748,13

6.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih TA 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan APBD TA 2023, yaitu sebesar Rp15.908.071.348,13.

No.	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	15.918.855.748,13	65.266.792.658,47
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	15.908.071.348,13	65.266.792.658,47
3	Sub Total (1-2)	10.784.400,00	-

Pada tabel diatas terdapat selisih antara SILPA Tahun 2022 dengan Penggunaan SILPA tersebut di Tahun 2023 sebesar Rp10.784.400,00. Selisih tersebut adalah koreksi atas Kas di BOS Sekolah yang telah ditutup yaitu SMP Satu Atap Kawung



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Sari sebesar Rp10.752.000,00, SDN 2 Padabeunghar sebesar Rp13.000,00 dan Koreksi Saldo awal SMPN 2 Kramatmulya sebesar Rp19.400,00 .

Per 31 Desember 2022 uang tersebut masih tercatat sebagai Sisa Kas BOS dan menjadi saldo awal BOS di Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut dikarenakan Sisa Kas BOS SMP Kawung Sari tersebut disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 7 Juli 2022 setelah Audit LKPD, SDN 2 Padabeunghar tanggal 10 Juli 2023 dan SMPN 2 Kramatmulya melalui surat pernyataan bahwa telah melakukan koreksi belanja BOS berupa Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2022. Dengan demikian pada Tahun Anggaran 2023 Sisa Kas BOS tersebut dikoreksi menjadi pengurang Saldo Awal Kas BOS Tahun Anggaran 2023.

6.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 menghasilkan SiLPA sebesar Rp15.340.516.965,13 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	2.842.021.968.214,00
b.	Belanja dan Transfer	Rp	2.832.406.522.597,00
c.	Surplus (Defisit) (a-b)	Rp	9.615.445.617,00
d.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	72.294.861.048,13
e.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	66.569.789.700,00
f.	Pembiayaan Netto (d-e)	Rp	5.725.071.348,13
g.	SiLPA (c+f)	Rp	15.340.516.965,13

6.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 sebesar Rp15.340.516.965,13 yang diperoleh dari:

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	15.918.855.748,13	65.266.792.658,47
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	15.908.071.348,13	65.266.792.658,47
3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	15.340.516.965,13	15.918.855.748,13
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(10.784.400,00)	-
5	Saldo Anggaran Lebih Akhir (1-2+3+4)	15.340.516.965,13	15.918.855.748,13

Adapun rincian dari Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk TA 2023 sebesar Rp15.340.516.965,13 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Kas di Kas Daerah	2.101.955.329,00
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	10.882.668,00
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	45.455.966,00
d.	Kas di Bendahara BOS	5.736.960,00
e.	Kas di Bendahara BLUD	13.168.966.760,13
g.	Kas Lainnya (Kas di Bidang)	7.519.282,00
	Jumlah	15.340.516.965,13



6.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Gambaran Neraca Kabupaten Kuningan Per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Akun	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	ASET				
1.1	Aset Lancar	89.165.522.482,11	72.115.093.408,34	17.050.429.073,77	23,64
1.2	Investasi Jangka Panjang	94.694.267.200,75	95.915.104.233,68	(1.220.837.032,93)	(1,27)
1.3	Aset Tetap	2.800.387.375.830,83	2.702.590.287.639,78	97.797.088.191,05	3,62
1.4	Dana Cadangan	21.100.000.000,00	15.000.000.000,00	6.100.000.000,00	40,67
1.5	Aset Lainnya	41.131.810.099,22	42.349.640.092,28	(1.217.829.993,06)	(2,88)
1.6	Aset Properti Investasi	22.830.409.813,40	-	22.830.409.813,40	-
	Jumlah Aset	3.069.309.385.426,31	2.927.970.125.374,08	141.339.260.052,23	4,83
2	KEWAJIBAN				
	Kewajiban Jangka Pendek	283.252.861.571,86	270.571.782.849,16	12.681.078.722,70	4,69
	Jumlah Kewajiban	283.252.861.571,86	270.571.782.849,16	12.681.078.722,70	4,69
3	Ekuitas	2.786.056.523.854,45	2.657.398.342.524,93	128.658.181.329,53	4,84
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.069.309.385.426,31	2.927.970.125.374,08	141.339.260.052,23	4,83

6.3.1 ASET

Total Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kuningan Per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp3.069.309.385.426,31. Rincian Aset adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Aset Lancar	89.165.522.482,11	72.115.093.408,34	17.050.429.073,77	23,64
2	Investasi Jangka Panjang	94.694.267.200,75	95.915.104.233,68	(1.220.837.032,93)	(1,27)
3	Aset Tetap	2.800.387.375.830,83	2.702.590.287.639,78	97.797.088.191,05	3,62
4	Dana Cadangan	21.100.000.000,00	15.000.000.000,00	6.100.000.000,00	40,67
5	Aset Lainnya	41.131.810.099,22	42.349.640.092,28	(1.217.829.993,06)	(2,88)
6	Aset Properti Investasi	22.830.409.813,40	-	22.830.409.813,40	-
	Jumlah Aset	3.069.309.385.426,31	2.927.970.125.374,08	141.339.260.052,23	4,83

Berdasarkan tabel di atas, nilai aset tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp141.339.260.052,23 atau 4,83%, jika dibandingkan dengan Aset Tahun 2022 senilai Rp2.927.970.125.374,08. Nilai kenaikan tertinggi yaitu pada Aset Tetap sebesar Rp97.797.088.191,05 dan adanya tambahan aset baru yaitu properti investasi sebesar Rp22.830.409.813,40. Berikut penjelasan setiap akun Aset.

6.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp89.165.522.482,11. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp17.050.429.073,77 atau 23,64% bila dibandingkan dengan Aset lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp72.115.093.408,34. Rincian Aset Lancar terdiri dari:



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Kas dan Setara Kas	16.063.609.484,65	16.278.489.290,13	(214.879.805,48)	(1,32)
2	Piutang Pendapatan	54.814.187.788,65	37.442.840.272,74	17.371.347.515,91	46,39
3	Penyisihan Piutang	(15.698.345.109,55)	(14.252.149.670,66)	(1.446.195.438,89)	10,15
4	Beban dibayar dimuka	789.195.032,97	365.348.351,65	423.846.681,32	116,01
5	Persediaan	33.196.875.285,39	32.280.565.164,48	916.310.120,91	2,84
	Jumlah Aset Lancar	89.165.522.482,11	72.115.093.408,34	17.050.429.073,77	23,64

6.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.063.609.484,65 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Kas di Kas Daerah	2.101.955.329,00	566.130.021,00	1.535.825.308,00	271,28
2	Kas di Bendahara Penerimaan	45.455.966,00	28.180.384,66	17.275.581,34	61,30
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	10.882.668,00	24.545.838,00	(13.663.170,00)	(55,66)
4	Kas di BLUD	13.168.966.760,13	13.477.341.729,00	(308.374.968,87)	(2,29)
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	1.792.681.766,47	(1.792.681.766,47)	(100,00)
6	Kas di Bendahara BOS	5.736.960,00	27.478.806,00	(21.741.846,00)	(79,12)
7	Kas Lainnya	730.611.801,52	362.130.745,00	368.481.056,52	101,75
	Jumlah Kas dan Setara Kas	16.063.609.484,65	16.278.489.290,13	(214.879.805,48)	(1,32)

6.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah pada Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.101.955.329,00. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan nilai kas di Kas Daerah sebesar Rp1.535.825.308,00. Rincian dari Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
A	Kas di Kas Daerah Terdiri dari:			
	Kas di Rek BJB:			
	Retribusi Daerah	-	523.880.243,00	(523.880.243,00)
	Jasa Giro	-	42.249.778,00	(42.249.778,00)
	Bantuan Keuangan Provinsi	2.101.955.329,00	-	2.101.955.329,00
	Jumlah	2.101.955.329,00	566.130.021,00	1.535.825.308,00

Kas di Kas Daerah disimpan di rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan di PT. Bank BJB Kantor Cabang Kuningan yang merupakan Bank Persepsi Pemerintah Kabupaten Kuningan, dengan nomor Rekening 150010012255. Kas di Kas daerah tersebut merupakan SILPA berupa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Selain dari SILPA yang telah dijelaskan di atas, seharusnya terdapat sisa dana dari Pendapatan Transfer yang merupakan belanja wajib sebesar Rp190.540.740.879,00. Namun sisa dana tersebut di kas daerah hanya



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

terdapat sebesar Rp2.101.955.329,00 yang merupakan sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi.

Sisa dana yang seharusnya ada pada Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang didanai dari PAD karena tidak tercapainya target PAD. Rincian sisa dana tersebut sebagai berikut:

NO	URAIAN	PER 31 DES 2022 (Rp)	KAS MASUK (Rp)	PENGUNAAN (Rp)	PER 31 DES 2023 (Rp)
	PENDAPATAN TRANSFER	86.905.552.460,00	590.835.697.767,00	489.302.464.677,00	190.540.740.879,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	62.222.537.346,00	363.801.393.394,00	356.042.128.330,00	69.981.802.410,00
	DANA PERIMBANGAN	62.222.537.346,00	363.801.393.394,00	356.042.128.330,00	69.981.802.410,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	-	66.812.880.000,00	18.852.947.914,00	47.959.932.086,00
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		66.812.880.000,00	18.852.947.914,00	47.959.932.086,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	13.991.054.005,00	9.976.127.735,00	23.892.517.677,00	74.664.063,00
1	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.506.528.887,00		2.506.528.887,00	-
2	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.202.848,00	848.000.000,00	851.202.848,00	-
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Keluarga Berencana	-	1.736.099.240,00	1.728.774.327,00	7.324.913,00
4	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	74.172.471,00	-	74.172.471,00	-
5	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.465.976.902,00		5.465.976.902,00	-
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	2.319.682.400,00		2.319.682.400,00	-
7	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	384.957.850,00	7.033.220.000,00	7.418.177.850,00	-
8	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	376.463.200,00	-	376.463.200,00	-
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	2.860.069.447,00	358.808.495,00	3.151.538.792,00	67.339.150,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	48.231.483.341,00	287.012.385.659,00	313.296.662.739,00	21.947.206.261,00
3	DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	40.146.233.320,00	237.474.250.680,00	267.562.719.300,00	10.057.764.700,00
4	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD	100.500.000,00	5.996.250.000,00	5.042.750.000,00	1.054.000.000,00
5	DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	5.743.771.076,00	6.019.569.924,00	5.998.631.639,00	5.764.709.361,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.202.208.945,00	10.880.937.055,00	8.188.717.800,00	4.894.428.200,00
7	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	438.800.000,00	426.675.000,00	12.125.000,00
8	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	38.770.000,00	726.955.000,00	601.546.000,00	164.179.000,00
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	24.683.015.114,00	227.034.304.373,00	133.260.336.347,00	120.558.938.469,00
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	24.683.015.114,00	227.034.304.373,00	131.158.381.018,00	120.558.938.469,00
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	24.683.015.114,00	227.034.304.373,00	131.158.381.018,00	120.558.938.469,00
9	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat	24.683.015.114,00	227.034.304.373,00	131.158.381.018,00	120.558.938.469,00
	JUMLAH	86.905.552.460,00	590.835.697.767,00	489.302.464.677,00	190.540.740.879,00

Pendapatan transfer yang digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang seharusnya dibayar dari PAD telah dianggarkan kembali di tahun 2024 untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan peruntukan dana-dana tersebut.



6.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.455.966,00.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	45.455.966,00	28.180.384,66	17.275.581,34	61,30

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terjadi kenaikan nilai kas di bendahara penerimaan sebesar Rp17.275.581,34 bila dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan tersebut diperoleh dari nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun 2023 sebesar Rp45.455.966,00 dikurangi kas Tahun 2022 sebesar Rp28.180.384,66.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan Retribusi Daerah pada tanggal 30 dan 31 Desember 2023 yang jatuh pada hari libur sehingga sampai tgl 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah. Selain itu terdapat pula kas di bendahara penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan tahun 2022 yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Rincian kas di bendahara penerimaan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	RSUD LINGGAJATI (Retribusi Pelayanan Kesehatan)	2.636.500,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG (Retribusi Lab PUTR)	14.465.000,00
3	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA (Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga)	28.354.000,00
4	DINAS KESEHATAN (Retribusi Laboratorium Kesda tahun 2022)	466,00
	Jumlah	45.455.966,00

6.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.882.668,00 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
	Kas di Bendahara Pengeluaran	10.882.668,00	24.545.838,00	(13.663.170,00)	(55,66)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bila dibandingkan dengan tahun 2022, nilai kas di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp13.663.170,00 atau 55,66%. Penurunan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut menunjukkan semakin baiknya pengelolaan kas di bendahara pengeluaran. Penyebab masih terdapatnya kas di bendahara dikarenakan pada tanggal 30 Desember 2023 masih



terdapat transaksi belanja yang menyebabkan keterlambatan penyetoran sisa kas di bendahara pengeluaran.

Adapun rincian kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp10.882.668,00 per SKPD adalah sebagai berikut :

No.	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	10.500.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.000,00
3	Kecamatan Kuningan	342,00
4	Kecamatan Cigugur	279.750,00
5	Kecamatan Cidahu	96.576,00
Jumlah		10.882.668,00

Perlu diketahui bersama bahwa selain Kas di Bendahara Pengeluaran sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) sebesar Rp63.670.426,00. Kas tersebut tidak dicatat sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran karena uang tersebut merupakan uang Pihak Ketiga yaitu CV Kian Jaya Pratama.

Uang Pihak ketiga tersebut terdapat di Rekening Bendahara Pengeluaran DPKPP diakibatkan kesalahan Pencatuman Nomor Rekening di SP2D LS. Seharusnya nomor Rekening di SP2D adalah nomor rekening CV Kian Jaya Pratama tetapi karena sistem *error* di aplikasi, yang tercantum otomatis adalah nomor rekening Bendahara Pengeluaran DPKPP. Sehingga terjadi kesalahan transfer di Bank.

Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2024, uang tersebut telah ditransfer ke rekening yang seharusnya yaitu CV Kian Jaya Pratama, sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran DPKPP periode Januari 2024.

6.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.168.966.760,13. Rincian dari kas di BLUD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Kas di BLUD RSUD 45	6.635.295.208,00
2	Kas di BLUD Puskesmas:	6.533.671.552,13
	- Kas di BLUD Puskesmas	2.857.532.652,13
	- Kas di BOK Puskesmas	3.676.138.900,00
Jumlah		13.168.966.760,13

Rincian Kas di BLUD RSUD 45 Kuningan adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Kas BLUD RSUD 45 Per 31 Desember 2022	13.477.341.729,00
2	Pendapatan BLUD RSUD 45 Tahun 2023	97.855.843.966,00
3	Belanja BLUD RSUD 45 Tahun 2023	104.697.890.487,00
	Kas BLUD RSUD 45 per 31 Desember 2023	6.635.295.208,00



Kas BLUD RSUD 45 tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kas Tunai	26.282.600,00
2.	Kas Penerimaan Bank BJB No.0150010015883	5.581.228.241,00
3.	Kas Bantu Penerimaan Bank BJB No.00226603153001	866.067.266,00
4.	Kas Penerimaan Jasaraharja Bank BRI No.13301002059301	161.717.101,00
Jumlah		6.635.295.208,00

Selanjutnya rincian Kas di BLUD Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Kas di FKTP JKN Puskesmas per 31 Desember 2022 yang menjadi BLUD	1.792.619.266,47
2	Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas per 31 Desember 2022 yg menjadi BLUD	13.782.739,66
3	Pendapatan BLUD Puskesmas Tahun 2023	52.049.647.243,00
4	Belanja BLUD Puskesmas Tahun 2023	50.998.516.597,00
Kas BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 (1+2+3-4)		2.857.532.652,13

Pada tabel di atas terdapat Kas di Bendahara penerimaan Puskesmas yang menjadi Saldo awal BLUD Puskesmas. Kas tersebut pada Neraca tahun 2022 dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas. Sedangkan pada Tahun 2023 dengan ditetapkannya Puskesmas menjadi BLUD, maka Kas di Bendahara Penerimaan tersebut tidak disetor ke Kas Daerah tetapi dicatat sebagai Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas.

Untuk rincian Saldo Kas BLUD di 37 Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dapat di lihat pada lampiran 10.

6.3.1.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 adalah Nihil. Hal tersebut dikarenakan Kas di FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.792.681.766,47 dialihkan pencatatan nya menjadi Saldo Awal BLUD Puskesmas dikarenakan perubahan status Puskesmas menjadi BLUD.

6.3.1.1.1.6 Kas Di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.736.960,00. Rincian mengenai Dana BOS tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenjang	PENERIMAAN		BELANJA	Saldo BOS 2023
		Saldo Awal	Penerimaan Dana BOS 2023	Total Belanja	
A	SD Reguler	13.941.882,00	86.099.898.118,00	86.108.430.540,00	5.409.460,00
	SMP Reguler	2.752.524,00	39.684.409.876,00	39.686.834.900,00	327.500,00
	Total Reguler	16.694.406,00	125.784.307.994,00	125.795.265.440,00	5.736.960,00
B	SD Kinerja	-	4.160.000.000,00	4.160.000.000,00	-
	SMP Kinerja	-	1.270.000.000,00	1.270.000.000,00	-
	Total Kinerja	-	5.430.000.000,00	5.430.000.000,00	-
A + B	Total SD	13.941.882,00	90.259.898.118,00	90.268.430.540,00	5.409.460,00
	Total SMP	2.752.524,00	40.954.409.876,00	40.956.834.900,00	327.500,00
	Total BOS	16.694.406,00	131.214.307.994,00	131.225.265.440,00	5.736.960,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Berdasarkan tabel tersebut, Kas di Bendahara BOS sebesar Rp5.736.960,00 yang terdiri dari:

- a. Sisa Dana BOS dari 635 SD Negeri sebesar Rp5.409.460,00
- b. Sisa Dana BOS dari 78 SMP Negeri sebesar Rp327.500,00

Rekap Realisasi Dana BOS terdapat pada lampiran 11.

Perlu diketahui bahwa selain Realisasi Dana BOS SD dan SMP Negeri, di kabupaten Kuningan terdapat pula realisasi dana BOS untuk 20 SD swasta dan 32 SMP Swasta. Realisasi BOS Sekolah SD dan SMP swasta yaitu pendapatan sebesar Rp9.401.160.000,00 terdiri dari Pendapatan BOS SD sebesar Rp4.013.960.000,00 dan Pendapatan BOS SMP sebesar Rp5.387.200.000,00. Sedangkan realisasi Belanja BOS Swasta sebesar Rp9.400.427.700,00 terdiri dari Belanja BOS SD sebesar Rp4.013.227.700,00 dan realisasi Belanja BOS SMP sebesar Rp5.387.200.000,00.

Rincian dari realisasi BOS SD Swasta dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	NAMA SD SWASTA	PENDAPATAN	BELANJA	SISA KAS
1	SD IT BINAUL UMMAH KUNINGAN	245.640.000,00	245.640.000,00	-
2	SD IT TUNAS QUR'ANI	123.280.000,00	123.280.000,00	-
3	SD YOS SUDARSO CIGUGUR	316.480.000,00	316.213.920,00	266.080,00
4	SD YOS SUDARSO CISANTANA	74.520.000,00	74.520.000,00	-
5	SD ISLAM TERPADU AL-ADHA	123.280.000,00	123.280.000,00	-
6	SD IT AL-FATTAH	129.720.000,00	129.720.000,00	-
7	SD YOS SUDARSO	57.040.000,00	57.040.000,00	-
8	SD IT AL MULTAZAM	670.680.000,00	670.680.000,00	-
9	SD IT AL-KAUTSAR	23.920.000,00	23.920.000,00	-
10	SD AISIYIAH KUNINGAN	66.240.000,00	66.198.660,00	41.340,00
11	SD ISLAM PLUS BAITUSSALAM	357.880.000,00	357.455.130,00	424.870,00
12	SD IT AL-IMAM	207.920.000,00	207.920.000,00	-
13	SD IT AL ISTIQOMAH	563.960.000,00	563.960.000,00	-
14	SD IT DARUL AMANAH	97.520.000,00	97.519.990,00	10,00
15	SD LINIMASA	66.240.000,00	66.240.000,00	-
16	SD TAHFIDZ GRAHA QURAN	254.840.000,00	254.840.000,00	-
17	SDIT AL-BASYAR	169.280.000,00	169.280.000,00	-
18	SD BUDI BHAKTI	93.840.000,00	93.840.000,00	-
19	SD IT AL-HUDA	143.520.000,00	143.520.000,00	-
20	SD IT AL MADANI	228.160.000,00	228.160.000,00	-
	JUMLAH	4.013.960.000,00	4.013.227.700,00	732.300,00

Selanjutnya rincian Realisasi BOS SMP Swasta yaitu:

NO	NAMA SMP SWASTA	PENDAPATAN	BELANJA	SISA KAS
1	SMP AMAL BAKTI MANISLOR	143.360.000	143.360.000	-
2	SMP ITUS JALAKSANA	61.600.000	61.600.000	-
3	SMP PLUS NURUL HIDAYAH	15.680.000	15.680.000	-
4	SMP IT BANI SYAHIR	236.320.000	236.320.000	-
5	SMP IT DARUL HUDA	35.840.000	35.840.000	-
6	SMP IT NUR BAROKAH AL-WADANI	26.880.000	26.880.000	-
7	SMP IT AN NUR	213.920.000	213.920.000	-
8	SMP IT AL-HUDA	473.760.000	473.760.000	-
9	SMP IT RAUDLOTUL UMMAH	56.000.000	56.000.000	-



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NO	NAMA SMP SWASTA	PENDAPATAN	BELANJA	SISA KAS
10	SMP ISLAM TERPADU AL GOZALI	26.880.000	26.880.000	-
11	SMP ISLAM TERPADU CIHIRUP	118.720.000	118.720.000	-
12	SMP IT AL-ISTIQOMAH	2.240.000	2.240.000	-
13	SMP IT MATHOLIUL ANWAR	164.640.000	164.640.000	-
14	SMP IT AL-KHOERiyAH	310.240.000	310.240.000	-
15	SMP NURUL HUDA CIPUTAT	137.760.000	137.760.000	-
16	SMP TRI MULYA	40.320.000	40.320.000	-
17	SMP IIBS EL-AZAM	219.520.000	219.520.000	-
18	SMP IT ANWARUL HUDA	43.680.000	43.680.000	-
19	SMP IT NAJIB RASYID	118.720.000	118.720.000	-
20	SMP IT AL-MULTAZAM 2	553.280.000	553.280.000	-
21	SMP YOS SUDARSO	224.000.000	224.000.000	-
22	SMP AL IHYA	174.720.000	174.720.000	-
23	SMP IT AL MADANI	77.280.000	77.280.000	-
24	SMP AL IDRUS LENGKONG	147.840.000	147.840.000	-
25	SMP ISLAM AINURRAFIQ	165.760.000	165.760.000	-
26	SMP PLUS MIFTAHUL FALAH	137.760.000	137.760.000	-
27	SMP BINAUL UMMAH	461.440.000	461.440.000	-
28	SMP PERTIWI CILIMUS	119.840.000	119.840.000	-
29	SMP IT AL KAAFFAH	84.000.000	84.000.000	-
30	SMP IP BAITUSSALAM	114.240.000	114.240.000	-
31	SMP ISLAM AL BAROKAH	126.560.000	126.560.000	-
32	SMP ISLAM TERPADU AL MULTAZAM	554.400.000	554.400.000	-
JUMLAH		5.387.200.000,00	5.387.200.000,00	-

Nilai realisasi belanja BOS SD dan SMP swasta tersebut seharusnya dicatat dalam APBD 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah, Bab IV Pengelolaan Dana BOSP Satuan Pendidikan Swasta. Namun karena terbitnya Permendagri tersebut pada tahun anggaran berjalan, maka pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk realisasi BOS sekolah swasta belum dianggarkan sehingga belum bisa dicatat nilai realisasinya dalam face laporan.

6.3.1.1.1.7 Kas Lainnya

Pada Neraca Tahun 2023 terdapat Kas lainnya sebesar Rp730.611.801,52. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp368.481.056,52 dibandingkan dengan nilai Kas Lainnya tahun 2022 sebesar Rp362.130.745,00. Penurunan tertinggi yaitu dari PFK, seperti terlihat pada tabel berikut:

NO	URAIAN	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Lebih/ kurang	%
				(Rp)	
a	PFK	658.930.940,52	359.571.042,00	299.359.898,52	83,25
b	Kas Lainnya di Bidang pada SKPD	8.010.435,00	-	8.010.435,00	-
c	Jasa giro	-	2.559.703,00	(2.559.703,00)	(100,00)
d	Kas di DKPP	63.670.426,00	-	63.670.426,00	
Jumlah		730.611.801,52	362.130.745,00	368.481.056,52	101,75

Kas Lainnya terdiri dari PFK yang merupakan utang pajak senilai Rp658.930.940,52, Kas Lainnya di Bidang-Bidang pada beberapa SKPD



*Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023*

sebesar Rp8.010.435,00 dan Kas Lainnya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp63.670.426,00. Nilai Kas Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp368.481.056,52 dibandingkan dengan Tahun 2022.

Kas lainnya berupa FPK terdiri dari utang Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023. Rincian Kas Lainnya per SKPD antara lain sebagai berikut:

NO	SKPD	Utang Pajak Daerah th. 2023	Utang Pajak Pusat	Total Utang PFK
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	57.948.060,00		57.948.060,00
2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	385.000,00		385.000,00
3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.825.373,00		3.825.373,00
4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	99.000,00		99.000,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	1.955.500,00	3.153.152,00	5.108.652,00
6	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	18.782.000,00		18.782.000,00
7	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	10.685.000,00	15.134.055,00	25.819.055,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	19.513.315,00	46.384.445,00	65.897.760,00
9	SEKRETARIAT DPRD	440.405.500,00		440.405.500,00
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	800.000,00		800.000,00
11	DINAS SOSIAL PEMB PEREMPUAN & PERLIND ANAK	50.000,00		50.000,00
12	KECAMATAN KADUGEDE	2.705.000,00	2.077.883,00	4.782.883,00
13	KECAMATAN KARANGKANCANA	6.810.000,00		6.810.000,00
14	KECAMATAN SINDANGAGUNG	440.000,00		440.000,00
15	KECAMATAN CIGUGUR	7.437.500,00	7.284.149,52	14.721.649,52
16	KECAMATAN CIMAHI	848.000,00		848.000,00
17	KECAMATAN CINIRU	2.264.500,00		2.264.500,00
18	KECAMATAN KALIMANGGIS	960.000,00	4.640.200,00	5.600.200,00
19	KECAMATAN NUSAHERANG	687.500,00		687.500,00
20	KECAMATAN PASAWAHAN	749.200,00	951.008,00	1.700.208,00
21	KECAMATAN CIDAHU	1.955.600,00		1.955.600,00
	Jumlah	579.306.048,00	79.624.892,52	658.930.940,52

Kas Lainnya berupa Kas di Bidang-Bidang pada SKPD sebesar Rp8.010.435,00 merupakan kas yang berada pada Rekening di Bidang-Bidang pada SKPD. Rekening tersebut di luar SK Bupati, sehingga kas tersebut harus disetor ke Kas Daerah serta rekening tersebut harus ditutup atau diusulkan untuk dicantumkan pada SK Bupati mengenai kepemilikan rekening sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya Kas Lainnya berupa Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) sebesar Rp63.670.426,00. Kas tersebut tidak dicatat sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran karena uang tersebut merupakan uang Pihak Ketiga yaitu CV. Kian Jaya Pratama.

Uang Pihak ketiga tersebut terdapat di Rekening Bendahara Pengeluaran DPKPP diakibatkan kesalahan Pencatuman Nomor Rekening di SP2D LS. Seharusnya nomor Rekening di SP2D adalah nomor rekening



CV Kian Jaya Pratama tetapi karena sistem *error* di aplikasi, yang tercantum otomatis adalah nomor rekening Bendahara Pengeluaran DPKPP. Sehingga terjadi kesalahan transfer di Bank.

Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2024, uang tersebut telah ditransfer ke rekening yang seharusnya yaitu CV Kian Jaya Pratama, sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran DPKPP periode Januari 2024.

6.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan dalam Neraca Tahun 2023 adalah sebesar Rp54.814.187.788,65, terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian dan Piutang Lainnya.

6.3.1.1.2.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.469.732.583,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
	Piutang Pajak	21.469.732.583,00	18.616.302.358,00	2.853.430.225,00	15,33
1	Pajak Hotel	197.922.644,00	110.109.850,00	87.812.794,00	79,75
2	Pajak Restoran	361.385.835,00	341.681.127,00	19.704.708,00	5,77
3	Pajak Hiburan	258.011.140,00	237.120.685,00	20.890.455,00	8,81
4	Pajak Reklame	480.995.299,00	537.044.523,00	(56.049.224,00)	(10,44)
5	Pajak Penerangan Jalan	2.654.067.884,00	2.425.990.298,00	228.077.586,00	9,40
6	Pajak Parkir	41.477.450,00	32.677.400,00	8.800.050,00	26,93
7	Pajak Air Tanah	131.947.589,00	11.045.780,00	120.901.809,00	1.094,55
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	969.191.960,00	961.671.960,00	7.520.000,00	0,78
9	Pajak Bumi dan Bangunan	16.374.732.782,00	13.958.960.735,00	2.415.772.047,00	17,31
	Jumlah Piutang Pajak :	21.469.732.583,00	18.616.302.358,00	2.853.430.225,00	15,33

Dari tabel diatas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan tahun 2022, piutang pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp2.853.430.225,00 atau 15,33%. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan piutang di hampir seluruh sektor pajak kecuali pajak reklame yang mengalami penurunan. Kenaikan piutang pajak tertinggi adalah PBB sebesar Rp2.415.772.047,00, Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp228.077.586,00 dan piutang pajak air tanah sebesar Rp120.901.809,00.

6.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi sebesar Rp16.603.099.633,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah/ Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)		
	Piutang Retribusi				
1	Retribusi Sewa Tanah	266.306.968,00	109.069.496,00	157.237.472,00	144,16
2	Retribusi Sewa Pertokoan Siliwangi Timur dan Barat	12.185.460.600,00	67.500.000,00	12.117.960.600,00	17.952,53
3	Retribusi Kesehatan	4.132.112.065,00	1.813.944.914,00	2.318.167.151,00	127,80
4	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	8.820.000,00	8.496.000,00	324.000,00	3,81



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah/ Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5	Retribusi Pelayanan Kebersihan	10.400.000,00	-	10.400.000,00	100,00
	Jumlah	16.603.099.633,00	1.999.010.410,00	14.604.089.223,00	730,57

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2023 terdapat kenaikan piutang retribusi daerah yakni dari hampir seluruh retribusi, dengan nilai total kenaikan sebesar Rp14.604.089.223,00 atau sebesar 730,57%. Kenaikan tertinggi yakni dari piutang retribusi Pemakaian Kekayaan daerah berupa sewa pertokoan Siliwangi. Rincian penambahan dan pengurangan Piutang retribusi dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian	31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Sewa Tanah	109.069.496,00	213.905.732,00	56.668.260,00	266.306.968,00
2	Retribusi Sewa Pertokoan Siliwangi Timur dan Barat	67.500.000,00	12.162.960.600,00	45.000.000,00	12.185.460.600,00
3	Retribusi Kesehatan	1.813.944.914,00	38.956.087.382,00	36.637.920.231,00	4.132.112.065,00
4	Retribusi Menara	8.496.000,00	1.037.520.000,00	1.037.196.000,00	8.820.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kebersihan	-	610.439.000,00	600.039.000,00	10.400.000,00
	Jumlah Piutang Retribusi	1.999.010.410,00	52.980.912.714,00	38.376.823.491,00	16.603.099.633,00

Pada tabel dapat dijelaskan bahwa nilai piutang retribusi daerah sebesar sebesar Rp16.603.099.633,00 diperoleh dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.999.010.410,00 ditambah penambahan piutang sebesar Rp52.980.912.714,00 kemudian dikurangi penerimaan retribusi sebesar Rp38.376.823.491.

Dalam catatan laporan keuangan RSUD Linggajati tahun 2023, selain dari piutang Asuransi Kesehatan Lainnya dan Piutang Umum, terdapat pula piutang Program Layanan Kesehatan Lainnya berupa Jamkesda dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan sebesar Rp856.908.591,00. Namun karena piutang tersebut merupakan piutang antar SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan, maka piutang tersebut tidak dapat diakui sebagai piutang Retribusi kesehatan dalam Laporan Keuangan Pemda.

6.3.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.773.120.576,00. Uraian dari piutang tersebut antara lain sebagai berikut:

No.	URAIAN	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Bertambah/ berkurang	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Piutang Denda Pajak	234.352.824,00	235.463.424,00	(1.110.600,00)	(0,47)
2	Piutang Denda Retribusi	6.803.456,00	6.803.456,00	-	-



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	URAIAN	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Bertambah/ berkurang	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	Piutang dari Pengembalian	30.052.597,00	45.058.260,00	(15.005.663,00)	(33,30)
4	Piutang BLUD	4.369.529.615,00	10.459.118.688,00	(6.089.589.073,00)	(58,22)
5	Piutang Kompensasi Pemanfaatan Sumber Daya Air	132.382.084,00	1.469.663.990,00	(1.337.281.906,00)	(90,99)
6	Piutang Remunerasi DBH TDF	-	1.910.370,08	(1.910.370,08)	(100,00)
	Jumlah	4.773.120.576,00	12.218.018.188,08	(7.444.897.612,08)	(60,93)

Pada Tahun 2023 nilai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah mengalami penurunan yang cukup besar dari nilai Piutang Tahun 2022 sebesar Rp7.444.897.612,08. Penurunan ini terjadi di semua akun Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Piutang Denda Pajak Daerah

Rincian Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp234.352.824,00 terdiri dari:

No	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Bertambah/ berkurang	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Pajak Hotel	24.695.899,00	24.695.899,00	-	
2.	Pajak Restoran	42.959.225,00	42.959.225,00	-	
3.	Pajak Hiburan	36.182.647,00	37.293.247,00	(1.110.600,00)	(2,98)
4.	Pajak Reklame	19.451.369,00	19.451.369,00		
5.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	97.020.613,00	97.020.613,00	-	-
6.	Pajak Parkir	10.702.007,00	10.702.007,00		
7.	Pajak Peng. Pengusahaan Srg Brg Walet	7.000,00	7.000,00	-	-
8.	Pajak Air Tanah	3.334.064,00	3.334.064,00		
	Jumlah	234.352.824,00	235.463.424,00	(1.110.600,00)	(0,47)

Dalam tabel di atas, apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, Piutang Denda Pajak Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.110.600,00. Hal ini dikarenakan adanya penurunan piutang dari denda pajak hiburan. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam pembayaran pajak-pajak tersebut sehingga nilai piutang denda pajak dapat direalisasikan. Namun di sisi lain, semua akun piutang lain-lain PAD yang sah memiliki nilai yang sama. Hal ini dapat diartikan tidak ada perubahan nilai piutang tersebut.

2. Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.803.456,00 yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan berupa Denda Retribusi Sewa Tanah. Nilai tersebut masih sama dengan nilai piutang denda retribusi Tahun



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

2022. Hal ini disebabkan masih belum adanya pembayaran piutang denda retribusi sewa tanah tahun 2013, 2015 dan 2016 seperti yang tercatat pada laporan keuangan tahun 2023.

No.	URAIAN	SALDO AKHIR Per 31 Des 2023 (Rp)	SALDO AWAL Per 31 Des 2022 (Rp)	Bertambah/ berkurang (Rp)	%
1	Piutang Denda Retribusi	6.803.456,00	6.803.456,00	-	-
	Jumlah	6.803.456,00	6.803.456,00	-	-

Rincian dari Piutang Denda Retribusi sebesar Rp6.803.456,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Sisa Piutang Denda Retribusi Sewa Tanah Tahun 2016 sebesar	4.033.432,00
2.	Sisa Piutang Denda Retribusi Sewa Tanah Tahun 2015 sebesar	2.222.418,00
3.	Sisa Piutang Denda Retribusi Sewa Tanah Tahun 2013 sebesar	547.606,00
	Jumlah	6.803.456,00

3. Piutang dari Pengembalian

Besaran Piutang dari Pengembalian pada Tahun 2023 adalah Rp30.052.597,00. Rincian perhitungan akun Piutang dari pengembalian, sebagai berikut:

No.	URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Pengembalian Lain-lain - Pengembalian dari PT. Taspen	45.058.260,00	9.215.377,00	24.221.040,00	30.052.597,00
	Jumlah	45.058.260,00	9.215.377,00	24.221.040,00	30.052.597,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai piutang dari pengembalian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.052.597,00. Piutang ini merupakan piutang dari Pengembalian PT. Taspen atas kelebihan penyetoran tunjangan taspen dari pembayaran gaji PNS yang pensiun.

4. Piutang BLUD

Piutang Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kuningan dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah '45 Kuningan adalah sebesar Rp4.369.529.615,00. Rincian Piutang BLUD sebagai berikut:

No.	SKPD	Per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Asuransi Kesehatan	6.666.874.631,00	33.850.024,00	6.649.755.777,00	50.968.878,00
2	Piutang Umum	3.792.244.057,00	4.318.560.737,00	3.792.244.057,00	4.318.560.737,00
	Jumlah	10.459.118.688,00	4.352.410.761,00	10.441.999.834,00	4.369.529.615,00



Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa piutang BLUD tahun 2023 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2022. Yaitu dari Rp10.459.118.688,00 menjadi Rp4.369.529.615,00.

Dalam catatan laporan keuangan RSUD'45, selain dari piutang Asuransi Kesehatan Lainnya dan Piutang Umum, terdapat pula piutang Program Layanan Kesehatan Lainnya berupa Jamkesda dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan sebesar Rp3.478.021.879,00. Namun karena piutang tersebut merupakan piutang antar SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan, maka piutang tersebut tidak dapat diakui sebagai piutang BLUD dalam Laporan Keuangan Pemda.

5. Piutang Kompensasi Pemanfaatan Sumber Daya Air

Piutang Kompensasi Pemanfaatan Sumber Daya Air per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp132.382.084,00. Rinciannya sebagai berikut:

No.	URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	PT. Pertamina Cirebon	1.918.884,00	23.026.608,00	23.026.608,00	1.918.884,00
2	PT. Indocement Cirebon	-	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00	-
3	Pemerintah Kota Cirebon	1.238.013.856,00	3.812.949.419,00	5.050.963.275,00	-
4	Pemerintah Kabupaten Cirebon	229.731.250,00	898.105.250,00	997.373.300,00	130.463.200,00
	JUMLAH	1.469.663.990,00	6.009.081.277,00	7.346.363.183,00	132.382.084,00

Tabel kenaikan atau penurunan piutang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	URAIAN	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Bertambah/ berkurang	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PT. Pertamina Cirebon	1.918.884,00	1.918.884,00	-	-
2	Pemerintah Kota Cirebon	-	1.238.013.856,00	(1.238.013.856,00)	(100,00)
3	Pemerintah Kabupaten Cirebon	130.463.200,00	229.731.250,00	(99.268.050,00)	(43,21)
	JUMLAH	132.382.084,00	1.469.663.990,00	(1.337.281.906,00)	(90,99)

Dari tabel di atas terlihat bahwa piutang kompensasi pemanfaatan sumber daya air Tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat drastis dibanding dengan piutang tahun 2022. Hal ini karena adanya penurunan piutang dari Pemerintah Kota Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hanya PT. Pertamina yang masih memiliki nilai piutang sama dengan Tahun 2022.



6. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Per 31 Desember 2023 tidak terdapat Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) seperti terlihat dalam tabel berikut:

No.	URAIAN	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Bertambah/ berkurang	%
1	Piutang Remunerasi DBH TDF	-	1.910.370,08	(1.910.370,08)	(100,00)
	Jumlah	-	1.910.370,08	(1.910.370,08)	(100,00)

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022 terdapat piutang remunerasi TDF sebesar Rp1.910.370,08 dan telah terealisasi penerimaannya pada tahun 2023. Sedangkan untuk tahun 2023, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 Serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/Km.7/2023 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kuningan memiliki piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pusat-Dana Perimbangan berupa TDF TKD. Namun dalam keputusan tersebut belum mencantumkan nilai remunerasi atas nilai TDF TKD tersebut. Sehingga nilai piutang TDF per 31 Desember 2023 adalah nihil.

6.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per 31 Desember 2023 adalah Rp6.339.966.412,00. Dibandingkan dengan tahun 2022 nilai piutang transfer naik sebesar nilai piutang tahun 2023. Hal ini dikarenakan nilai piutang tahun 2022 nihil. Penyebabnya adalah nilai piutang tahun 2022 tersebut tidak memiliki dokumen yang memadai untuk dijadikan dasar pengakuan piutang.

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 Serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/Km.7/2023 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kuningan memiliki piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp6.339.966.412,00. Yaitu dari perhitungan kurang dan lebih bayar seperti dalam tabel berikut:

No.	URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Lebih Bayar (Rp)	Kurang Bayar (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	12.797.204.169,00	6.457.237.757,00	6.339.966.412,00
	JUMLAH	-	12.797.204.169,00	6.457.237.757,00	6.339.966.412,00



6.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang ini merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rincian dari piutang tersebut dapat dijelaskan pada Tabel Berikut ini:

No.	URAIAN	Per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurang (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	%
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya						
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.787.069.220,00	1.416.081.420,00	1.787.069.220,00	1.416.081.420,00	(370.987.800,00)	(20,76)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	947.304.300,00	842.128.200,00	947.304.300,00	842.128.200,00	(105.176.100,00)	(11,10)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.271.027.855,00	2.773.284.595,00	1.271.027.855,00	2.773.284.595,00	1.502.256.740,00	118,19
4	Pajak Air Permukaan (AP)	109.732.850,00	133.951.050,00	109.732.850,00	133.951.050,00	24.218.200,00	22,07
	JUMLAH PIUTANG DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI	4.115.134.225,00	5.165.445.265,00	4.115.134.225,00	5.165.445.265,00	1.050.311.040,00	25,52

Berdasarkan Tabel tersebut, pertanggal 31 Desember 2023 piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp5.165.445.265,00. Nilai piutang tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 973/Kep.116-Bapenda/2024 Tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2023 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6.3.1.1.2.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan per 31 Desember 2023 sebesar Rp223.780.319,65. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Bagian Lancar TGR	223.780.319,65	255.332.091,66	(31.551.772,01)	(12,36)
	Jumlah	223.780.319,65	255.332.091,66	(31.551.772,01)	(12,36)

Pada Tahun 2023 terdapat nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp223.780.319,65. Bila nilai tersebut dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terjadi penurunan nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian sebesar Rp31.551.772,01. Penurunan tersebut dikarenakan tidak adanya penambahan TGR berdasarkan SK TJM di tahun 2023 serta dikarenakan adanya pelunasan atau cicilan pembayaran TGR.



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	NAMA / CV	TAHUN SKTJM	NILAI TGR (Rp)	Yang sudah disetor s.d 31 Des 2023 (Rp)	Kewajiban (Yang Menjadi Bagian Lancar) (Rp)	Sisa (Bagian Tidak Lancar) (Rp)
Yang Bersumber dari PNS						
1	DEDE SUTARDI, S. IP	Jul-18	57.415.200,00	57.415.200,00	-	-
2	Drs. SUNARDI, MM	Apr-21	60.000.000,00	13.200.000,00	10.000.000,00	36.800.000,00
3	DJUANDA	2018	60.000.000,00	10.000.000,00	-	50.000.000,00
4	DUDIANA, S. IP	Des 2021	60.000.000,00	23.400.000,00	30.000.000,00	6.600.000,00
5	WAWAN SUPMAR HADIWIJAYA	Des 2021	10.565.625,00	4.450.000,00	5.282.812,50	832.812,50
6	Drs. JAJA MOHAMAD PAOJAN	2018	26.000.000,00	1.500.000,00	-	24.500.000,00
7	YAYAN JUNIANDRANI, SE., ST., M. Si	Apr-21	240.647.234,09	145.500.000,00	40.107.872,35	55.039.361,74
8	DEDI FRISTIADI, S.H.	Jan-22	88.636.900,00	88.636.900,00	-	-
9	JAJANG JAMALUDIN, S. Sos.	Jan-22	91.960.000,00	91.960.000,00	-	-
10	DUDUNG ABDUROHMAN	Jan-22	113.450.500,00	-	56.725.250,00	56.725.250,00
11	TOTO SAPTORI	Jan-22	20.080.200,00	2.500.000,00	10.040.100,00	7.540.100,00
	JUMLAH		828.755.659,09	438.562.100,00	152.156.034,85	238.037.524,24
Yang Bersumber dari Penyedia Jasa						
1	Anugerah Jaya	Feb-21	24.631.075,65	24.631.075,65	-	-
2	Multi Agung Sedaya	Mei 2021	312.025.000,00	312.025.000,00	-	-
3	Gloria	Apr-22	8.954.370,67	8.954.370,67	-	-
4	Barra Pratama	Maret 2022	17.320.603,22	17.320.603,22	-	-
5	Cahaya Fajar Utama	Apr-22	17.763.345,91	7.763.345,00	8.881.672,95	1.118.327,96
6	Putri Jaya	Maret 2022	5.079.344,00	-	2.539.672,00	2.539.672,00
7	Surya Berkah Utama	Apr-22	15.572.622,88	15.572.622,88	-	-
8	Dian Varista	Jun-22	17.476.735,21	5.400.000,00	8.738.367,61	3.338.367,60
9	Limar Pelangi	Jun-22	45.475.844,94	17.465.100,00	22.737.922,47	5.272.822,47
10	Kelompok Tani Mekar Saluyu	Des 2022	28.040.141,87	28.040.141,87	-	-
11	Kelompok Tani Rahayu	Mei 2022	43.646.922,58	1.000.000,00	21.823.461,29	20.823.461,29
12	Kuda Mas	Jun-22	14.111.800,00	14.111.800,00	-	-
13	Vidya Karya	Jul-22	13.806.376,96	2.806.377,00	6.903.188,48	4.096.811,48
	JUMLAH		563.904.183,89	455.090.436,29	71.624.284,80	37.189.462,80
	JUMLAH TOTAL		1.392.657.562,98	893.652.536,29	223.780.319,65	275.226.987,04

6.3.1.1.2.7 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp239.043.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Kurang Setor Kontribusi Pembangunan Pasar Baru	239.043.000,00	-	-	239.043.000,00
J U M L A H		239.043.000,00	-	-	239.043.000,00

Akun Piutang Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah Piutang yang timbul dari perjanjian kerjasama Pembangunan Pengelolaan Pasar Baru di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2013. Berdasarkan perjanjian tersebut bahwa Pihak pengelola wajib membayar kompensasi atas pembangunan Pasar Baru kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Piutang ini dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pada Per 31 Desember 2022 yang merupakan saldo awal piutang, terdapat piutang sebesar Rp239.043.000,00, yang merupakan Piutang Kurang Setor Kontribusi Pembangunan Pasar Baru sebesar Rp239.043.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2023 nilai piutang tersebut masih tetap sebesar Rp239.043.000,00.

Piutang tersebut timbul akibat adanya kurang setor oleh pejabat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang pada saat itu masih menjabat. Setoran Kontribusi Pembangunan Pasar Baru tersebut telah diserahkan oleh PT. ASP Land kepada Pejabat tersebut. Namun pejabat tersebut belum menyetorkan uang tersebut ke kas daerah. Pejabat tersebut telah meninggal pada tahun 2015.

6.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp15.698.345.109,55) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah/ Berkurang	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah Non PBB	(11.371.059.704,56)	(10.496.386.805,56)	(874.672.899,00)	8,33
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(213.160.132,46)	(90.765.707,96)	(122.394.424,50)	134,85
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.215.258.405,00)	(3.425.954.157,14)	210.695.752,14	(6,16)
4	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(239.043.000,00)	(239.043.000,00)	-	-
5	Piutang Transfer Pusat - Dana Perimbangan	(659.823.867,53)	-	(659.823.867,53)	100,00
Jumlah		(15.698.345.109,55)	(14.252.149.670,66)	(1.446.195.438,89)	10,15

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terdapat kenaikan nilai penyisihan piutang sebesar Rp1.446.195.438,89 atau 10,15% jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Perhitungan penyisihan piutang secara lengkap terdapat pada lampiran 12.

6.3.1.1.4 Beban dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp789.195.032,97. Nilai ini lebih besar dibanding dengan tahun 2022 dikarenakan masa awal sewa tanah pada bulan Agustus 2023. Berbeda dengan tahun 2022 masa awal sewa pada triwulan pertama. Sehingga nilai



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

beban dibayar di muka tahun 2023 menjadi lebih besar. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (sewa tanah kas desa)	785.733.494,51	360.156.043,96	425.577.450,55	118,16
2	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian (Sewa Pasar Domba)	3.461.538,46	5.192.307,69	(1.730.769,23)	(33,33)
	Jumlah	789.195.032,97	365.348.351,65	423.846.681,32	116,01

6.3.1.1.5 Persediaan

Persediaan untuk 31 Desember 2023 sebesar Rp33.196.875.285,39 dengan rincian sebagai berikut :

Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
33.196.875.285,39	32.280.565.164,48	916.310.120,91	2,84

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat kenaikan nilai persediaan di Tahun 2023 sebesar 916.310.120,91 atau 2,84%. Berikut adalah rincian persediaan per jenis barang:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Alat Tulis Kantor	118.712.290,00
2	Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	5.388.000,00
3	Kertas dan Cover	88.221.850,00
4	Cetakan	139.149.487,00
5	Alat Listrik	57.445.550,00
6	Perangko, materai	1.941.000,00
7	Perabot Kantor	29.686.935,00
8	Bibit Tanaman	1.520.866.800,00
9	Obat-obatan Lainnya	7.932.327.067,78
10	Obat/Alat KB	493.314.910,00
11	Alat medis pakai habis (Hibah)	845.912.256,02
12	- Bahan Medis pakai habis Farmasi	872.665.873,10
13	- Bahan Medis pakai habis UPTD Puskesmas	5.793.086.441,34
14	- Obat-obatan Gudang Farmasi (Hibah)	2.907.957.725,60
15	obat-obatan	10.012.078.706,55
16	Makanan Minum pasien	8.277.382,00
17	Barang yang akan diserahkan Ke Masyarakat	1.506.007.461,00
18	Bahan Kimia	79.486.400,00
19	Bahan Komputer	743.959.000,00
20	Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir / Cendra Mata	1.800.000,00
21	Kegiatan Kantor Lainnya	2.255.150,00
22	Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga	32.577.000,00
23	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.758.000,00
	JUMLAH TOTAL	33.196.875.285,39

Adapun rincian persediaan per SKPD pada lampiran 13.



6.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2023 Investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam bentuk investasi Jangka Panjang sebesar Rp94.694.267.200,75. Nilai Investasi di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp1.220.837.032,93) dari investasi Jangka Panjang per 2022. Rincian nilai investasi tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

No	Uraian	31-Des-2023	31-Des-2022	Bertambah/ Berkurang	%
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	202.042.068,00	202.042.068,00	-	-
2	Dana bergulir Tak tertagih	(202.042.068,00)	(202.042.068,00)	-	-
3	Investasi Jangka Panjang Permanen	94.694.267.200,75	95.915.104.233,68	(1.220.837.032,93)	(1,27)
	Jumlah	94.694.267.200,75	95.915.104.233,68	(1.220.837.032,93)	(1,27)

6.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp202.042.068,00 merupakan kategori macet, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Dinas Pertanian	500.000,00	500.000,00	-
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	146.774.268,00	146.774.268,00	-
3	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	54.767.800,00	54.767.800,00	-
	Jumlah Katagori Macet	202.042.068,00	202.042.068,00	-

Perlu kami sampaikan bahwa dana bergulir tersebut sebagai *leading* sektornya adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan. Serta untuk penyimpanannya atas hasil pengembalian dana bergulir tersebut dikerjasamakan dengan PD.BPR Kabupaten Kuningan. Proyek Dana Bergulir tersebut merupakan Proyek Pengembangan Ekonomi yang dimulai pada tahun 2002 sampai dengan 2006.

6.3.1.2.2 Dana Bergulir Tak Tertagih

Dana Bergulir Tak Tertagih merupakan Investasi Dana Bergulir yang tidak tertagis sebesar nilai Invesatsi Non Permanen Lainnya yaitu minus (Rp202.042.068,00). Nilai ini merupakan nilai penyesihan atas Investasi Non Permanen berupa Dana bergulir tak tertagih yang terdapat di Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Nilai tersebut masih sama dengan nilai tahun 2022 seperti terlihat pada tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	Dana bergulir Tak tertagih	(202.042.068,00)	(202.042.068,00)	-	-
	Jumlah	(202.042.068,00)	(202.042.068,00)	-	-

6.3.1.2.3 Investasi Jangka Panjang Permanen

Sampai dengan 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Kuningan memiliki Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp94.694.267.200,75, sesuai dengan Laporan BUMD yang telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Berikut daftar Investasi Jangka Panjang Permanen:

NO	NAMA PERUSAHAAN DAERAH	TAHUN	JUMLAH PENYERTAAN MODAL S.D 2023 (Rp)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL S.D 2022 (Rp)	PENAMBAHAN/PENGURANGAN (Rp)	%
1	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (Bank Kuningan)	1973 / 1974	27.310.307.361,00	28.637.380.059,00	(1.327.072.698,00)	(4,63)
2	PT Lembaga Keuangan Mikro Kuningan	2015	554.393.295,75	3.017.284.401,68	(2.462.891.105,93)	(81,63)
3	Perusahaan Air Minum Tirta Kemuning	1989 / 1990	50.768.193.003,00	47.100.138.594,00	3.668.054.409,00	7,79
4	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan	2010	4.235.263.151,00	5.334.190.789,00	(1.098.927.638,00)	(20,60)
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	1981 / 1982	11.826.110.390,00	11.826.110.390,00	-	-
	JUMLAH		94.694.267.200,75	95.915.104.233,68	(1.220.837.032,92)	1,27

Adapun penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Metode Penilaian Investasi

No.	Nama Investee	Komposisi Kepemilikan Saham		Persentase Kepemilikan Akhir (%)	Metode Penilaian*		Kriteria Metode Penilaian Investasi
		Pemerintah Kabupaten Kuningan (Rp)	Total Kepemilikan Saham (Rp)		Biaya (Cost)	Ekuitas (Equity)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Seri A	7.199.277.500,00	2.630.360.921.500,00	0,29%	✓		Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya
	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Seri B	461.254.500,00			✓		



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Nama Investee	Komposisi Kepemilikan Saham		Persentase Kepemilikan Akhir (%)	Metode Penilaian*		Kriteria Metode Penilaian Investasi
		Pemerintah Kabupaten Kuningan (Rp)	Total Kepemilikan Saham (Rp)		Biaya (Cost)	Ekuitas (Equity)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan	17.035.000.000,00	17.035.000.000,00	100,00%		✓	Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
3	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (Bank Kuningan)	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00%		✓	Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
4	PT Lembaga Keuangan Mikro Kuningan	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	60,00%		✓	Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
5	Perusahaan Air Minum Tirta Kemuning	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00	100,00%		✓	Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
	Jumlah	115.195.532.000,00	2.739.895.921.500,00				

b. Perhitungan Nilai Investasi

No.	Nama Investee	Akumulasi Penyertaan Modal (Rp)	Akumulasi Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya (Rp)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Rp)	Bagian Laba Yang Disetorkan Ke Kasda (Rp)	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	11.826.110.390,00	-	-	3.203.634.482,00	11.826.110.390,00
2	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan	9.496.801.470,00	(5.116.655.107,00)	(144.883.212,00)	-	4.235.263.151,00
3	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (Bank Kuningan)	20.882.446.303,00	5.448.030.100,00	2.565.320.976,00	1.585.490.018,00	27.310.307.361,00
4	PT Lembaga Keuangan Mikro Kuningan	3.274.684.241,00	(1.581.924.075,63)	(1.138.366.869,62)	-	554.393.295,75
5	Perusahaan Air Minum Tirta Kemuning	87.634.456.067,00	(39.201.403.425,00)	4.220.877.231,00	1.885.736.870,00	50.768.193.003,00
	Jumlah	133.114.498.471,00	(40.451.952.507,63)	5.502.948.125,38	6.674.861.370,00	94.694.267.200,75

Berdasarkan perhitungan tabel di atas, nilai investasi total tahun 2023 adalah sebesar Rp94.694.267.200,75. Sebagai catatan,



khusus untuk PT. Bank BJB nilai penyeteroran bagian laba tidak menjadi pengurang dikarenakan metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode biaya.

6.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.800.387.375.830,83 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	%
	Aset Tetap				
1	Tanah	817.290.040.659,00	802.105.752.403,00	15.184.288.256,00	1,89
2	Peralatan dan Mesin	927.486.902.667,67	870.181.347.747,67	57.305.554.920,00	7,10
3	Gedung dan Bangunan	1.535.058.960.107,99	1.487.226.086.352,40	47.832.873.755,59	3,22
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.272.705.014.924,58	2.217.973.923.924,58	54.731.091.000,00	2,47
5	Aset Tetap Lainnya	79.708.521.185,70	78.468.569.935,70	1.239.951.250,00	1,58
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	116.731.440.000,00	-	116.731.440.000,00	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset	(2.948.593.503.714,11)	(2.753.365.392.723,57)	(195.228.110.990,54)	7,09
	Jumlah Aset	2.800.387.375.830,83	2.702.590.287.639,78	97.797.088.191,05	3,62

6.3.1.3.1 Tanah

Aset Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp817.290.040.659,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Tanah	817.290.040.659,00	802.105.752.403,00	15.184.288.256,00	1,89

Penambahan Aset Tanah sebesar Rp15.184.288.256,00 diperoleh dari Nilai Aset Tanah Tahun 2023 sebesar Rp817.290.040.659,00 dikurangi nilai Aset Tanah Tahun 2022 sebesar Rp802.105.752.403,00. Rincian Aset Tanah Per SKPD terdapat pada lampiran 14.

Nilai tersebut terbentuk dari mutasi tambah dan kurang selama periode berjalan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Penambah	Pengurang	Per 31 Des 2023
			(Rp)	(Rp)	
1	Tanah				
a.	Penambah:				
	Penambahan dari belanja modal tahun 2023 sebesar		11.192.050.724,00		11.192.050.724,00
	Utang Belanja Modal Tanah Tahun 2023 sebesar		23.156.240,00		23.156.240,00
	Hibah		10.375.805.000,00		10.375.805.000,00
	Mutasi Antar SKPD		529.200.000,00		529.200.000,00
	Aset tanah yang belum tercatat		84.287.000,00		84.287.000,00
b.	Pengurang:				
	Mutasi Antar SKPD			529.200.000,00	(529.200.000,00)
	Pembayaran Utang Belanja Modal Tanah tahun 2023			186.080.708,00	(186.080.708,00)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Penambah	Pengurang	Per 31 Des 2023
			(Rp)	(Rp)	
	Koreksi			4.015.900.000,00	(4.015.900.000,00)
	Reklas Properti Investasi			2.289.030.000,00	(2.289.030.000,00)
	Jumlah	802.105.752.403,00	22.204.498.964,00	7.020.210.708,00	817.290.040.659,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tanah sebesar Rp22.204.498.964,00 berasal dari:
 - Belanja Modal pengadaan tanah sebesar Rp11.192.050.724,00 dipergunakan untuk pembebasan lahan jalan lingkaran timur selatan;
 - Utang Tunda Bayar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkaran Cigugur-Cisantana Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.156.240,00;
 - Hibah tanah untuk sarana Pendidikan dari Yayasan Kosgoro Kuningan Tahun 2023 Sebesar Rp10.375.805.000,00;
 - Mutasi antar SKPD sebesar Rp529.200.000,00; dan
 - Koreksi Neraca Aset Tetap tanah yang belum tercatat sebesar Rp84.287.000,00 berupa Jalan Lingkungan Winduhaji – Citangtu yang berlokasi di Kecamatan Kuningan berdasarkan Dokumen Pembebasan Lahan berupa Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor: 594/151/Pem.um Tanggal 16 November 2006.
- b. Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp7.020.210.708,00 terdiri dari:
 - Mutasi antar SKPD sebesar Rp529.200.000,00
 - Pembayaran utang tunda bayar tahun 2023 sebesar Rp186.080.708,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengadaan Tanah Jalan Akses Kantor Kemenag di Komplek KIC.
 - Koreksi Neraca Aset Tetap tanah berupa tanah Desa yang tercatat pada buku inventaris Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, yang dipergunakan Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp4.015.900.000,00;
 - Reklasifikasi aset tanah ke akun property investasi berupa pemanfaatan aset tanah yang dikerjakkan PT. BAMBOE TIGA GLOBAL PERSADA dan Objek Wisata Linggarjati Kuningan sebesar Rp2.289.030.000,00.

Perlu kami sampaikan sebanyak 32 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) telah diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dari pengembang perumahan dengan nilai sebesar Rp524.890.904.051,32. Bahwa pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri



Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) merupakan fasilitas yang wajib disediakan oleh setiap pengembang perumahan dengan proporsi paling sedikit 40% dari luas lahan perumahan. PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan sejumlah 32 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang telah Serah Terima melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, baru 6 pengembang yang sudah dicatat pada buku inventaris dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebesar Rp95.508.742.318,00 Dengan uraian sebagai berikut :

No.	Nama Pengembang	Nilai (Rp)
1	Perumahan Alam Asri Ciawigebang	11.691.759.533,00
2	Perumahan Alam Asri Desa Kasturi	36.680.587.525,00
3	Perumahan Griya Kuningan Permai	15.713.288.000,00
4	Perumahan Griya Nuansa Lestari	7.249.291.160,00
5	Perumahan Griya Nuansa Lestari Ancaran	12.223.952.100,00
6	Perumahan Taman Jananuraga Asri Kelurahan Cirendang	11.949.864.000,00
Jumlah		95.508.742.318,00

Sedangkan sejumlah 26 Pengembang / Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebesar Rp429,382.161.733,32 belum dicatat pada Buku Inventaris dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan disebabkan dokumen berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) belum dilengkapi dokumen yang memadai berupa Sertifikat Induk Hak Guna Bangunan (HGB) dan Surat Pelepasan Hak (SPH), dokumen tersebut merupakan dokumen yang harus dilengkapi oleh pengembang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Daftar aset yang belum dicatat pada Buku Inventaris dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan bersumber dari Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dengan uraian sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Nama Pengembang	Nilai (Rp)
1	PT. Kibar Buana Persada /Buana Cigadung Residence	10.041.828.535,20
2	PT. Mutiara Mulia Sentosa /Taman Ciharendong Kencana	7.585.584.250,00
3	PT. Cipta Graha Harapan/Graha Pesona Caracas	1.913.513.548,00
4	PT. Mutiara Mulia Sentosa/Pesona Mutiara Kasturi	23.642.848.567,20
5	PT. Mutiara Mulia Senotosa/Tugu Mutiara	2.806.799.066,92
6	PT. Mutiara Mulia Sentosa / Graha Mutiara Sidaraja	12.489.836.016,00
7	PT. Duta Intiland/Griya Wisata Kuningan	12.794.628.610,00
8	PT. Duta Intiland/Griya Sindang Asri	11.720.783.880,00
9	PT. Grage Abadi/Grage Manoa Estate	37.382.334.180,00
10	PT.Primadona Cipager Indah / Primadona Regency	6.376.154.000,00
11	PT.Multi Agung Sedaya/Pesona Alam Kuningan	27.356.235.740,00
12	PT. Wahana Bina Puma / Wahana Indah Cigugur	23.677.477.200,00
13	PT.Bumi Cipta Arthasena / Puri Pelangi Gandasoli	4.121.403.300,00
14	PT.Rejeki Agung Sedaya / Pesona Ancaran Kuningan	35.084.205.000,00
15	PT Jakarta Baru Cosmopolitan/Perum Korpri RSS	12.482.860.100,00
16	PT/CV/ Alfana Adhi Baskoro / Bima Agung Regency	2.991.175.900,00
17	PT.Mitra Panorama Indah/Panorama Bandorasa	8.337.067.760,00
18	Griya Bojong Indah/PT.Anugrah Tiga Utama	11.839.669.810,00
19	PT.Bintang Ciremai Abadi / Kalapagunung Regency	12.530.225.800,00
20	PT.Charbon Prima Abadi/Taman Luragung Lestari	28.742.986.940,00
21	PT Maha Daya Sentosa / Grand Sindang Asri	2.258.512.500,00
22	PT.Maha Daya Sentosa / Grand Kasturi	4.317.867.600,00
23	PT Charbon Prima Abadi/ Grand Lebakwangi Lestari	27.851.324.000,00
24	PT. Bumi Jaya Purnama / Bumi Kasturi Perdana	20.396.399.040,00
25	PT. Bumi Mas Nusantara / Bumi Kuningan Mas	9.127.380.000,00
26	PT. Perum Perumnas / Perum Perumnas	71.513.060.390,00
Jumlah		429.382.161.733,32

6.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp927.486.902.667,67 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Peralatan dan Mesin	927.486.902.667,67	870.181.347.747,67	57.305.554.920,00	6,59

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp57.305.554.920,00 yaitu nilai peralatan mesin tahun 2023 sebesar Rp927.486.902.667,67 dikurangi nilai peralatan dan mesin tahun 2022



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

sebesar Rp870.181.347.747,67 dengan rincian aset peralatan dan mesin per SKPD pada lampiran 15.

Sedangkan rincian mutasi aset peralatan mesin dapat dilihat pada tabel berikut beserta penjelasannya.

Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Peralatan dan Mesin	870.181.347.747,67	78.343.422.209,00	19.812.888.117,00	928.711.881.839,67
Penambah:				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	-	67.447.867.808,00	-	67.447.867.808,00
Tambahan Aset dari Utang Belanja Modal	-	491.156.000,00	-	491.156.000,00
Mutasi antar SKPD	-	4.338.295.271,00	-	4.338.295.271,00
Reklas dari KIB C	-	247.941.900,00	-	247.941.900,00
Reklas dari KIB E	-	367.397.600,00	-	367.397.600,00
Reklas dari Ekstrakomtable	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
Reklas dari ATB	-	14.999.000,00	-	14.999.000,00
Reklas dari Rusak Berat	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Reklas dari Barjas	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
Hibah	-	3.643.715.530,00	-	3.643.715.530,00
Tambahan dari Aset Belum Tercatat	-	1.860.494.418,00	-	1.757.549.100,00
Pengurang:				
Pembayaran Utang belanja Modal 2022	-	-	9.135.490.601,00	(9.135.490.601,00)
Mutasi antar SKPD	-	-	4.338.295.271,00	(4.338.295.271,00)
Reklas ke Barang dan Jasa	-	-	1.554.688.345,00	(1.554.688.345,00)
Reklas ke KIB C	-	-	38.824.000,00	(38.824.000,00)
Reklas ke Ekstrakomtable	-	-	1.521.715.111,00	(1.521.715.111,00)
Reklas ke Aset Rusak Berat	-	-	3.223.874.789,00	(3.223.874.789,00)
Penghapusan	-	-	1.327.924.490,00	(1.327.924.490,00)
Jumlah	870.181.347.747,67	78.446.367.527,00	21.140.812.607,00	927.486.902.667,67

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp78.446.367.527,00 berasal dari :
 - Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Angagarn 2023 sebesar Rp67.447.867.808,00 pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
 - Utang Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp491.156.000,00 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan berupa pembayaran jaminan pemeliharaan (5%) Pengadaan dan Pemasangan pagar pengaman jalan (*Guard Rail*) di ruas jalan padamenak japara.
 - Mutasi antar SKPD Rp4.338.295.271,00
 - Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp247.941.900,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kabupaten Kuningan berupa peralatan kantor yang bersumber dari belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2023.

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya (KIB E) sebesar Rp367.397.600,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan berupa peralatan kantor yang bersumber dari belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2023.
- Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomtable sebesar Rp2.500.000,00 pada Kantor Kecamatan Kuningan berupa 1 Unit Sepeda Motor.
- Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp14.999.000,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan berupa meja partisi yang bersumber dari Belanja Modal JKN tahun anggaran 2023.
- Reklasifikasi dari aset lain-lain (Rusak Berat) sebesar Rp2.000.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah di perbaiki / overhaul.
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp30.000.000,00 pada Kantor Kecamatan Ciwaru berupa 1 Unit Pagar Teralis.
- Penerimaan Hibah Rp3.643.715.530,00 terdiri dari :
 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menerima Hibah dari Kementerian Pertanian berupa Alat IT untuk penyuluh pertanian dan Kendaraan Roda Dua sebesar Rp1.175.016.530,00
 - Dinas Lingkungan Hidup menerima hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa 1 (satu) unit alat berat *excavator* yang dipergunakan untuk operasional pengelolaan limbah sampah di TPSA Ciniro Kabupaten Kuningan, sebesar Rp2.130.615.000,00
 - Sekeratiat Daerah menerima hibah dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) Cabang Cirebon berupa 2 (unit) Sepeda Motor Roda Tiga Viar New Karya sebesar Rp69.934.000,00
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa 2 (dua) unit Sepeda Motor Trail Kawasaki Klx dan 1 (satu) unit *pickup* toyota hilux serta hibah dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank BJB Cabang Kuningan berupa 2 (unit) Sepeda Motor Trail Honda CRF, sebesar Rp268.150.000,00
- Dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi barang milik daerah ditemukan Aset Belum Tercatat pada buku inventaris barang milik daerah sebesar Rp1.860.494.418,00 berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa mobil perpustakaan keliling taman bacaan masyarakat Nopol E 1343 Z yang dipergunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebesar Rp50.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 5 (lima) unit Alat berat berupa 3 (tiga) unit *vibration roller*, 1 (satu) unit Macadan Roller/Three Wheel Roler dan 1 (satu) unit *Crawler Excavator* yang dipergunakan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.545.494.000,00
 - 6 (enam) unit sepeda motor dengan No. Polisi E 3623 Y, E 6639 Z, E 6637 Z, E 6634 Z, E 6692 Z, E 6405 Z yang dipergunakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp52.945.318,00
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Win dengan No. Polisi E 6031 Z tersebut sebelumnya digunakan eks. Kantor Kelurahan Awirarangan tahun 2003 sebesar Rp2.500.000,00
 - 3 (tiga) unit kendaraan roda dua Yamaha All New X-Ride Tahun 2022 dengan No. Polisi E 2502 Z, E 2554 Z dan E 2498 Z tersebut digunakan oleh Kelurahan Winduhaji, Kelurahan Kuningan dan Kelurahan Cigugur, kendaraan tersebut diperoleh dari Kegiatan Pemberian Hadiah Desa/ Kelurahan taat pajak pada rekening Belanja yang akan diserahkan ke masyarakat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Rp59.555.100,00
 - Koreksi Kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat daerah Kabupaten Kuningan yang belum tercatat sebesar Rp150.000.000,00
- b. Pengurangan aset peralatan dan mesin sebesar Rp21.140.812.607,00 berasal dari :
- Pembayaran Utang belanja Modal 2022 sebesar Rp9.135.490.601,00 yang telah dibayar pada belanja modal tahun anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut :

No.	Nama SKPD	No. Kontrak	Uraian Pekerjaan	Nilai
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	73/SP.PPK-DIKBUD/XI/2022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	6.000.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	440/5618/DINKES-PPK/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	242.820.000,00
3	DINAS KESEHATAN	440/5845/DINKES-PPK/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	128.871.000,00
4	DINAS KESEHATAN	440/5725/DINKES-PPK/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	915.940.000,00
5	DINAS KESEHATAN	440/5767/DINKES-PPK/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	122.400.000,00
6	DINAS KESEHATAN	440/5556/DINKES-PPK/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	381.009.000,00
7	DINAS KESEHATAN	440/5771/DINKES-PPK/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	62.658.000,00
8	DINAS KESEHATAN	440/5606/DINKES-PPK/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	182.690.281,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Nama SKPD	No. Kontrak	Uraian Pekerjaan	Nilai
9	DINAS KESEHATAN	440/5837/DINKES-PPK/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	290.102.485,00
10	DINAS KESEHATAN	440/5598/DINKES-PPK/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	155.950.000,00
11	DINAS KESEHATAN	440/5729/DINKES-PPK/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	54.565.000,00
12	DINAS KESEHATAN	440/5640/DINKES-PPK/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	183.360.000,00
13	RSUD LINGGAJATI	447/23.24.26.10.05.17/INSTRUMEN/2022	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	61.771.298,00
14	RSUD LINGGAJATI	AK1-P2212-2275815 FKS-P2212-2294469	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	73.589.587,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	660.1/2263/SPK.BPBJ/XI/2022	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	99.300.000,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	671.1/SPK-3028-PPK/DISHUB	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	170.471.000,00
21	DINAS PERHUBUNGAN	621.91/SPK-1276-PPK/DISHUB	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.992.950,00
JUMLAH				9.135.490.601,00

- Mutasi antar SKPD Rp4.338.295.271,00
- Reklas ke Barang dan Jasa sebesar Rp1.543.564.345,00 pada 4 SKPD berupa barang pakai habis yang masuk pada Belanja Modal tahun anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut :

SKPD	Nilai	Uraian
DINAS KESEHATAN	424.086.345,00	Posbindu Kit
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	14.070.000,00	Cairan Kimia G9 Fas Pestisides Detection Kits Pal 010 GF 30/
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	5.600.000,00	Tang Plombir / Segel
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	865.008.000,00	Alat Peraga Pendidikan dan ATK yang bersumber dari dana BOS.
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	234.800.000,00	Alat IUD Kit
JUMLAH	1.543.564.345,00	

- Reklas ke KIB C sebesar Rp38.824.000,00 berupa rehabilitasi gedung sarana olahraga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang masuk belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2023.
- Reklas ke *Ekstrakomtable* sebesar Rp1.521.715.111,00 berupa sarana dan prasarana kantor tersebar pada beberapa SKPD yang bersumber dari belanja Modal tahun anggaran



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

2023, barang tersebut memiliki usia pakai lebih dari satu tahun anggaran, namun secara nilai perolehan dibawah nilai kapitalisasi senilai Rp500.000,00 per unit berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

- Reklas ke Aset Rusak Berat sebesar Rp3.223.874.789,00 tersebar pada beberapa SKPD berupa peralatan kantor yang sudah rusak dan rusak berat yang akan diajukan penghapusan barang milik daerah.
- Koreksi penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp1.327.924.490,00

6.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.535.058.960.107,99 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Gedung dan Bangunan	1.535.058.960.107,99	1.487.226.086.352,40	47.832.873.755,59	3,22

Terdapat penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp47.832.873.755,59 atau 3,22% pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan rincian Aset Gedung dan Bangunan per SKPD pada lampiran 16.

Mutasi Aset Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Gedung dan Bangunan	1.487.226.086.352,40			1.487.226.086.352,40
a.	Penambah:				-
	Belanja Modal sebesar		81.763.034.176,00		81.763.034.176,00
	Tambahan Aset dari Utang Belanja Modal		1.431.258.470,79		1.431.258.470,79
	Mutasi Antar SKPD		4.396.916.667,00		4.396.916.667,00
	Hibah		4.429.035.000,00		4.429.035.000,00
	Reklas dari KIB B		38.824.000,00		38.824.000,00
	Reklas dari Rusak Berat		94.725.000,00		94.725.000,00
	Reklas dari Kemitraan		519.020.235,00		519.020.235,00
	Koreksi		6.087.977.835,40		6.087.977.835,40
b.	Pengurang:				
	Mutasi Antar SKPD			4.396.916.667,00	(4.396.916.667,00)
	Reklas ke KIB B			247.941.900,00	(247.941.900,00)
	Reklas ke KIB D			166.155.250,00	(166.155.250,00)
	Reklas ke Rusak Berat			2.748.225.188,00	(2.748.225.188,00)
	Pembayaran Utang Belanja 2022			7.173.266.181,00	(7.173.266.181,00)
	Reklas ke Penghapusan			17.349.214.147,00	(17.349.214.147,00)
	Pemindahtanganan			7.176.746.000,60	(7.176.746.000,60)
	Reklas ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga			11.661.452.295,00	(11.661.452.295,00)
	Dikeluarkan ke Aset Ekstrakomtable			8.000.000,00	(8.000.000,00)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Jumlah	1.487.226.086.352,40	98.760.791.384,19	50.927.917.628,60	1.535.058.960.107,99

Penambahan asset Gedung dan Bangunan sebesar Rp98.760.791.384,00 tersebut yaitu dari :

- a. Belanja Modal pengadaan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp81.763.034.176,00
- b. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.431.258.471,00 berupa pembangunan Gedung perkantoran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- c. Mutasi antar SKPD sebesar Rp4.396.916.667,00
- d. Penerimaan Hibah sebesar Rp4.429.035.000,00 terdiri dari :
 - Hibah Gedung Pendidikan dari Yayasan Kosgoro Kuningan sebesar Rp4.102.730.000,00 yang saat ini bangunan tersebut digunakan oleh Sekolah Dasar Negeri 17 Kuningan.
 - Hibah bangunan kantor dari Kementerian Agama Eks. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan sebesar Rp326.305.000,00
- e. Koreksi Belum Tercatat Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.087.977.835,00 diperoleh dari Bangun Guna Serah (BGS) Eks. PT Linggajati Wiguna, jangka waktu kerja sama pemanfaatan aset antara pemerintah daerah kabupaten kuningan dengan PT Linggajati Wiguna sudah berakhir sejak tahun Dua Ribu Sembilan Belas.
- f. Reklasifikasi dari asset Rusak Berat sebesar Rp94.725.000,00 merupakan reklasifikasi aset Gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang semula rusak berat dan tidak digunakan (*idle*) tetapi tahun anggaran 2023 sudah direnovasi sehingga di fungsikan Kembali sebagai ruang kelas belajar.
- g. Reklasifikasi dari aset Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp519.020.235,00
- h. Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin sebesar Rp38.824.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan berupa pembayaran rehabilitasi kantor (5%) yang bersumber dari belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2023.

Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp50.927.917.628,60 tersebut yaitu dari :

- a. Mutasi antar SKPD sebesar Rp4.396.916.667,00
- b. Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.349.214.147,00 merupakan penghapusan gedung sekolah yang mendapatkan kegiatan renovasi dari Dana Alokasi Keuangan (DAK) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



- c. Pembayaran Utang Pekerjaan Tahun 2022 sudah dibayar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.173.266.181,00
- d. Reklasifikasi ke aset peralatan dan mesin sebesar Rp247.941.900,00 merupakan peralatan kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diperoleh dari belanja modal Gedung dan bangunan tahun anggaran 2023.
- e. Reklasifikasi ke aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp166.155.250,00 reklasifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan berupa pekerjaan *layering* perbaikan jalan yang diperoleh dari belanja modal Gedung dan bangunan tahun anggaran 2023.
- f. Reklasifikasi ke aset pemindahtanganan sebesar Rp7.176.746.000,00 merupakan reklasifikasi atas aset yang akan dihibahkan pada instansi vertikal dan sekolah swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang bersumber dari Belanja Modal Tahun anggaran 2023
- g. Reklasifikasi ke aset rusak berat sebesar Rp2.748.255.188,00 merupakan reklasifikasi aset Gedung dan Bangunan yang sudah rusak dan rusak berat serta diajukan penghapusan barang milik daerah.
- h. Reklasifikasi ke aset kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp11.661.452.294,00 merupakan aset Gedung dan Bangunan yang dikerjasamakan melalui mekanisme sewa dalam jangka waktu tertentu. Serta di catat sebagai aset properti investasi
- i. Reklasifikasi ke *Ekstrakomtable* dikarenakan tidak memenuhi nilai kapitalasi aset tetap sebesar Rp8.000.000,00.

6.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.272.705.014.924,58 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.272.705.014.924,58	2.217.973.923.924,58	54.731.091.000,00	2,47

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa untuk aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp54.731.091.000,00 jika dibanding dengan aset tahun 2022. Rincian penambahan dan pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD pada lampiran 17.

Mutasi nilai aset jalan, irigasi dan jaringan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.217.973.923.924,58	91.038.302.750,00	38.053.711.750,00	2.270.958.514.924,58
a.	Penambah:				



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 sebesar		86.485.838.150,00		
	Utang Belanja Modal 2023		2.369.927.350,00		
	Reklas dari KIB C		166.155.250,00		
	Tambahan Aset dari Utang Belanja Modal sebesar				
	Mutasi Antar SKPD.		269.882.000,00		
	Koreksi Belum Tercatat		1.746.500.000,00		
b.	Pengurang:				
	Utang Belanja Modal 2022			36.037.329.750,00	
	Mutasi Antar SKPD			269.882.000,00	
	Reklas ke KIB B				
	Reklas ke KIB C				
	Reklas ke Beban Pemeliharaan				
	Reklas ke Pemindahtanganan				
	Jumlah	2.217.973.923.924,58	91.038.302.750,00	36.307.211.750,00	2.272.705.014.924,58

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Penambahan asset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp91.038.302.750,00 tersebut yaitu dari :

- Realisasi Belanja Modal pengadaan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp86.485.838.150,00
- Utang Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.369.927.350,00
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp269.882.000,00
- Reklasifikasi dari asset Gedung dan Bangunan sebesar Rp.166.155.250,00
- Koreksi Neraca Aset Tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.746.500.000,00 diperoleh dari Bangun Guna Serah (BGS) Eks. PT Linggajati Wiguna, jangka waktu kerja sama pemanfaatan aset antara pemerintah daerah kabupaten kuningan dengan PT. Linggajati Wiguna sudah berakhir sejak tahun 2019.

Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp36.307.211.750,00 tersebut yaitu dari :

- Mutasi antar SKPD sebesar Rp269.882.000,00
- Jurnal Penyesuaian - Pembayaran Utang Pekerjaan Tahun 2022 sudah dibayar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.36.037.329.750,00

6.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.708.521.185,70 dengan rincian sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Aset Tetap Lainnya	79.708.521.185,70	78.468.569.935,70	1.239.951.250,00	1,58

Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai aset sebesar Rp1.239.951.250,00 atau 1,58% dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari Rp78.468.569.935,70 menjadi Rp79.708.521.185,70. Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD ada pada lampiran 18. Sedangkan mutasi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Aset Tetap Lainnya	78.468.569.935,70	7.989.804.829,00	6.749.853.579,00	79.708.521.185,70
a.	Penambah:				
	Belanja Modal		7.989.804.829,00		
	Utang Belanja Modal				
	Reklas dari Utang Barang dan Jasa				
	Reklas dari KIB C				
b.	Pengurang:				
	Utang Belanja Modal 2022			81.918.000,00	
	Reklas ke Beban Barang Pakai Habis				
	Reklas ke KIB B			367.397.600,00	
	Reklas ke Ekstrakomtabel			6.300.537.979,00	
	Reklas ke ATB				
	Reklas ke KIB C				
	Reklas ke KIB B				
	Jumlah	78.468.569.935,70	7.989.804.829,00	6.749.853.579,00	79.708.521.185,70

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp79.708.521.185,70 tersebut yaitu dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp7.989.804.829,00 sedangkan pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp6.749.853.579,00 tersebut yaitu dari :

- Pembayaran Utang Pekerjaan Tahun 2022 sudah dibayar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.81.918.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk pembayaran pengadaan Aplikasi KOCEAK (Kuningan *Operation Cyber Hoax*).
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp367.397.600,00 berupa mebeuler dan peralatan kantor yang bersumber dari Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



- c. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp6.300.537.979,00 berupa buku ilmu pengetahuan yang bersumber dari Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

6.3.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp116.731.440.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Kontruksi dalam pengerjaan	116.731.440.000,00	-	116.731.440.000,00	100

Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp116.731.440.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 100% bila dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan tersebut dari utang tunda bayar berupa Pengadaan Penerangan Jalan Umum yang belum selesai per 31 Desember 2023. Sehingga aset tersebut dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

6.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.948.593.503.714,11) mengalami kenaikan sebesar Rp195.228.110.990,54 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Akumulasi Penyusutan	(2.948.593.503.714,11)	(2.753.365.392.723,57)	(195.228.110.990,54)	7,09

Berikut adalah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 per KIB dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Per 31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(677.581.214.775,27)	(112.749.247.931,34)	(7.516.652.853,44)	(782.813.809.853,17)
2	Gedung dan Bangunan	(433.194.009.868,78)	(32.406.374.482,44)	(8.853.590.656,68)	(456.746.793.694,54)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.642.590.168.079,52)	(70.523.596.065,17)	(4.080.863.978,29)	(1.709.032.900.166,40)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(2.753.365.392.723,57)	(215.679.218.478,95)	(20.451.107.488,41)	(2.948.593.503.714,11)

Adapun rincian per KIB serta SKPD nya terdapat pada lampiran 19 – lampiran 21.

6.3.1.4 Dana Cadangan

6.3.1.4.1 Pembentukan Dana Cadangan

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

dan Wakil Bupati Tahun 2024, pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Kuningan membentuk Dana Cadangan. Dana tersebut disimpan di Rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Bank BJB Kuningan sebesar Rp21.000.000.000,00.

Tujuan dibentuk Dana Cadangan tersebut adalah untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Dana Cadangan ini baru dibentuk pada Tahun Anggaran 2023, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31-Des-2023	31-Des-2022	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	21.100.000.000,00	15.000.000.000,00	6.100.000.000,00	40,67
	Jumlah	21.100.000.000,00	15.000.000.000,00	6.100.000.000,00	40,67

6.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.131.810.099,22. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp1.217.829.993,06) dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31-Des-2023	31-Des-2022	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Tagihan Jangka Panjang (TGR)	275.226.987,04	391.182.024,43	(115.955.037,39)	(29,64)
2	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(57.518.684,70)	(56.999.270,63)	(519.414,07)	0,91
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	10.073.344.000,00	(10.073.344.000,00)	(100,00)
4	Aset Tidak Berwujud	11.238.849.858,00	11.216.365.858,00	22.484.000,00	0,20
5	Aset Lain-lain	44.752.943.480,90	51.717.170.318,95	(6.964.226.838,05)	(13,47)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(33.941.166.542,02)	(38.868.249.782,47)	4.927.083.240,45	(12,68)
7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	18.863.475.000,00	7.876.826.944,00	10.986.648.056,00	139,48
	Jumlah	41.131.810.099,22	42.349.640.092,28	(1.217.829.993,06)	(2,88)

6.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang (TGR)

Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp275.226.987,04. Berikut rincian nilai Tuntutan Ganti Kerugian tahun 2023:

NO	NAMA / CV	TAHUN SKTJM	LHP	Bagian Tidak Lancar (TGR)
Yang Bersumber dari PNS				
1	Drs. SUNARDI, MM	4/13/2021	APIP 2010	36.800.000,00
2	DJUANDA	12/15/2018	APIP 2010	50.000.000,00
3	DUDIANA, S.IP	12/6/2021	APIP 2010	6.600.000,00
4	WAWAN SUPMAR HADIWIJAYA	12/15/2021	APIP 2013	832.812,50
5	Drs. JAJA MOHAMAD PAOJAN	12/15/2018		24.500.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NO	NAMA / CV	TAHUN SKTJM	LHP	Bagian Tidak Lancar (TGR)
6	YAYAN JUNIANDRANI, SE., ST., M.Si	4/9/2021	APIP 2019	55.039.361,74
7	DUDUNG ABDUROHMAN	1/11/2022	APIP 2021	56.725.250,00
8	TOTO SAPTORI	1/13/2022	APIP 2021	7.540.100,00
	JUMLAH			238.037.524,24
Yang Bersumber dari Penyedia Jasa				
1	Cahaya Fajar Utama	06 April 2022	Belanja 2019	1.118.327,96
2	Putri Jaya	10 Maret 2022	APIP 2021	2.539.672,00
3	Dian Varista	02 Juni 2022	Belanja 2016	3.338.367,61
4	Limar Pelangi (lunas)	01 Juni 2022	LKPD 2021	5.272.822,47
5	Kelompok Tani Rahayu	05 Mei 2022	LKPD 2019	20.823.461,29
6	Vidya Karya	11 Juli 2022	LKPD 2020	4.096.811,48
	JUMLAH			37.189.462,80
	JUMLAH TOTAL			275.226.987,04

6.3.1.5.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp57.518.684,70). Nilai ini merupakan Nilai Penyisihan atas Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Ganti Rugi. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp519.414,07 jika dibandingkan dengan Tahun 2022. Penyebabnya adalah penambahan nilai umur piutang tak tertagih. Gambarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Uraian	31-Des-2023	31-Des-2022	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(57.518.684,70)	(56.999.270,63)	(519.414,07)	0,91
	Jumlah	(57.518.684,70)	(56.999.270,63)	(519.414,07)	0,91

6.3.1.5.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2023 adalah nihil, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Gedung dan Bangunan Pertokoan Siliwangi Sebelah Barat dan Timur	-	10.073.344.000,00	(10.073.344.000,00)	(100)
	Jumlah	-	10.073.344.000,00	(10.073.344.000,00)	(100)

Nihil karena Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga direklas ke Aset Properti Investasi.



6.3.1.5.4 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp11.238.849.858,00 atau meningkat sebesar Rp22.484.000,00.

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
				Rp	%
1	Aset Tak Berwujud	11.238.849.858,00	11.216.365.858,00	22.484.000,00	0,20

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD pada lampiran 22. Adapun penambah dan pengurang Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	11.216.365.858,00	54.493.000,00	14.999.000,00	11.238.849.858,00
a.	Penambah:				
	Belanja Modal 2023		32.009.000,00		
	Hibah Aset Tak Berwujud		22.484.000,00		
	Reklas ke Barang dan Jasa			17.010.000	
	Reklas ke KIB B			14.999.000,00	
	Jumlah	11.216.365.858,00	54.493.000,00	32.009.000,00	11.238.849.858,00

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut. Penambahan aset tak berwujud sebesar Rp54.493.000,00 tersebut yaitu dari:

- Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp32.009.000,00
- Hibah *software* sistem operasi *Microsoft office 365 enterprise* dari Kementerian Pertanian sebesar Rp22.484.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp32.009.000,00 tersebut yaitu dari :

- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.17.010.000,00 berupa Pembelian Lisensi *Zoom Meeting Pro* dengan masa aktif 1 tahun, pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.999.000 berupa teralis dan partisi yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Kecamatan Cibeureum Dinas Kesehatan .

6.3.1.5.5 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.752.943.480,90 atau menurun sebesar Rp6.523.821.338,05 dari aset lain-lain per 31 Desember 2022.



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
				Rp	%
1	Aset Lain-lain	44.752.943.480,90	51.717.170.318,95	(6.964.226.838,05)	(13,47)

Untuk rincian per SKPD dapat dilihat pada lampiran 23.

No	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Penambah	Pengurang	Per 31 Des 2023 (Rp)
			(Rp)	(Rp)	
1	Aset Lain-lain	51.717.170.318,95	18.179.375.795,00	25.143.602.633,05	44.752.943.480,90
	Koreksi			53.000.000,00	
	Mutasi SKPD		3.283.354.818,00	3.283.354.818,00	
	Reklasifikasi KIB		14.896.020.977,00	97.400.000,00	
	Penghapusan			14.632.357.815,05	
	Hibah			7.077.490.000,00	
	Jumlah	51.717.170.318,95	18.179.375.795,00	25.143.602.633,05	44.752.943.480,90

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Penambahan aset lain-lain sebesar Rp18.179.375.795,00 tersebut yaitu dari:

- Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.283.354.818
- Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp14.896.020.977 berupa aset dengan kondisi rusak berat yang diproses penghapusan barang milik daerah.

Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp32.009.000,00 tersebut yaitu dari:

- Koreksi *Double* Catat berupa Kendaraan Roda Empat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dipergunakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar.
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.283.354.818
- Reklasifikasi atas aset gedung dan bangunan yang telah direnovasi dan dipergunakan kembali pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebesar Rp97.400.000
- Penghapusan sebesar Rp14.632.357.815,05 berupa aset dengan kondisi rusak berat.
- Hibah kepada Instansi Vertikal dan Sekolah Swasta yang bersumber dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.077.490.000

Selain Aset Lain-Lain sebesar Rp44.752.943.480,90, terdapat Aset *Ekstrakomtable* sebesar Rp124.498.871.608,00. Namun sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 dimana untuk Aset *Ekstrakomtable* tidak ditampilkan di *face* LKPD namun cukup diungkapkan di CALK. Aset *ekstrakomtable* ini adalah belanja modal di bawah nilai kapitalisasi.

6.3.1.5.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi penyusutan lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar (Rp33.941.166.542,02) dengan rincian:



No	Uraian	31-Des-2023	31-Des-2022	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	(529.400.639,70)	529.400.639,70	(100,00)
2	Aset Tak Berwujud	(10.629.453.107,85)	(9.924.912.802,60)	(704.540.305,25)	7,10
3	Rusak berat	(22.944.661.964,74)	(28.046.479.870,74)	5.101.817.906,00	(18,19)
4	Aset Lain-Lain	(367.051.469,43)	(367.456.469,43)	405.000,00	(0,11)
	Jumlah	(33.941.166.542,02)	(38.868.249.782,47)	4.927.083.240,45	(12,68)

Berdasarkan tabel diatas, akumulasi penyusutan aset lainnya mengalami penurunan dibanding dengan akumulasi penyusutan tahun 2022 yaitu sebesar Rp 4.927.083.240,45. Untuk rincian per SKPD dijelaskan pada lampiran 24.

6.3.1.5.7 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Per 31 Desember 2023 terdapat Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp18.863.475.000,00. Dana tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/Km.7/2023 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023. Selain itu menyusul Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 tanggal 17 Januari 2024, hal Penyampaian Informasi Sado Rekening TDF, disampaikan saldo Rekening Lain di BI TDF TKD Kabupaten Kuningan Nomor 519000315980 pada Kantor Pusat BI per 01 Desember 2023 sampai 12 Januari 2024 sebesar Rp18.863.475.000,00.

Perbandingan nilai DBH TDF Per 31 Desember 2023 dengan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp10.986.648.056,00 atau sekitar 139,48%, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31-Des-2023	31-Des-2022	Bertambah/(Berkurang)	
					%
1	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	18.863.475.000,00	7.876.826.944,00	10.986.648.056,00	139,48
	Jumlah	18.863.475.000,00	7.876.826.944,00	10.986.648.056,00	139,48

6.3.1.6 Aset Properti Investasi

Aset properti Investasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp22.830.409.813,40 terdiri dari:

- Tanah sebesar Rp3.539.030.000,00
- Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.965.776.059,00
- Akumulasi Penyusutan (Rp674.396.245,60)

Aset Properti Investasi diterapkan berdasarkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan nomor 278 Tahun 2022 dan PSAP Nomor 17 serta Surat Direktorat Jenderal Keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/7571/Keuda Tanggal 5 April



2024 Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Keuangan Daerah terkait Aset Konsesi Jasa, Properti Investasi, dan seterusnya.

Aset tersebut merupakan aset yang disewakan kepada pihak ketiga untuk melalui perjanjian sewa. Aset tersebut yaitu pertokoan siliwangi barat dan Timur serta beberapa Aset Tanah yang disewakan.

Penambahan Aset Properti Investasi ini baru diterapkan pada Tahun Anggaran 2023 untuk ditampilkan dalam Neraca Tahun 2023. Pada tahun sebelumnya belum diterapkan karena masih menunggu ketentuan mengenai kode akun Aset Properti Investasi.

6.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp283.252.861.571,86 mengalami kenaikan sebesar Rp12.681.078.722,70 dibanding dengan kewajiban tahun 2022, seperti terlihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31-Des-2023	31-Des-2022	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kewajiban jangka Pendek	283.252.861.571,86	270.571.782.849,16	12.681.078.722,70	4,69
	Jumlah	283.252.861.571,86	270.571.782.849,16	12.681.078.722,70	4,69

6.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp283.252.861.571,86 dengan rincian:

No	Uraian	31-Des-2023	31-Des-2022	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	658.930.940,52	359.571.042,00	299.359.898,52	83,25
2	Pendapatan Diterima Dimuka	6.652.220.027,97	15.939.401.070,04	(9.287.171.042,07)	(58,27)
3	Utang Belanja	270.454.140.741,37	245.035.240.875,12	25.418.899.866,25	10,37
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.487.569.862,00	9.237.569.862,00	(3.750.000.000,00)	(40,60)
	Jumlah	283.252.861.571,86	270.571.782.849,16	12.681.078.722,70	4,69

6.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp658.930.940,52. Mengalami kenaikan sebesar Rp299.359.898,52 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31-Des-2023	31-Des-2022	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	658.930.940,52	359.571.042,00	299.359.898,52	83,25

Rincian Utang PFK per SKPD terdiri dari:

NO	SKPD	Utang Pajak Daerah th. 2023	Utang Pajak Pusat	Total Utang PFK
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	57.948.060,00		57.948.060,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NO	SKPD	Utang Pajak Daerah th. 2023	Utang Pajak Pusat	Total Utang PFK
2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	385.000,00		385.000,00
3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.825.373,00		3.825.373,00
4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	99.000,00		99.000,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	1.955.500,00	3.153.152,00	5.108.652,00
6	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	18.782.000,00		18.782.000,00
7	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	10.685.000,00	15.134.055,00	25.819.055,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	19.513.315,00	46.384.445,00	65.897.760,00
9	SEKRETARIAT DPRD	440.405.500,00		440.405.500,00
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	800.000,00		800.000,00
11	DINAS SOSIAL PEMB PEREMPUAN & PERLIND ANAK	50.000,00		50.000,00
12	KECAMATAN KADUGEDE	2.705.000,00	2.077.883,00	4.782.883,00
13	KECAMATAN KARANGKANCANA	6.810.000,00		6.810.000,00
14	KECAMATAN SINDANGAGUNG	440.000,00		440.000,00
15	KECAMATAN CIGUGUR	7.437.500,00	7.284.149,52	14.721.649,52
16	KECAMATAN CIMAHI	848.000,00		848.000,00
17	KECAMATAN CINIRU	2.264.500,00		2.264.500,00
18	KECAMATAN KALIMANGGIS	960.000,00	4.640.200,00	5.600.200,00
19	KECAMATAN NUSAHERANG	687.500,00		687.500,00
20	KECAMATAN PASAWAHAN	749.200,00	951.008,00	1.700.208,00
21	KECAMATAN CIDAHU	1.955.600,00		1.955.600,00
	Jumlah	579.306.048,00	79.624.892,52	658.930.940,52

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai Utang PFK tertinggi pada Sekretariat DPRD. Nilai tersebut yang menjadi salah satu penyebab naiknya nilai Utang PFK Tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022.

6.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.652.220.027,97 yang dijelaskan pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka	6.652.220.027,97	15.939.401.070,04	(9.287.181.042,07)	(58,27)
	Jumlah	6.652.220.027,97	15.939.401.070,04	(9.287.181.042,07)	(58,27)

Rincian dari Pendapatan diterima dimuka terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Pajak diterima Dimuka (Bapenda)	1.361.930.616,54
2	Pendapatan Retribusi diterima Dimuka (BPKAD)	5.185.826.103,65
3	Lain-Lain PAD diterima Dimuka (RSUD'45)	104.463.307,78
	Jumlah	6.652.220.027,97

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan hal sebagai berikut:

- Pendapatan dari Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan sebesar Rp1.361.930.616,54.



- b. Pendapatan dari pemakaian kekayaan daerah yaitu Sewa Pertokoan Jalan Siliwangi Kuningan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan sebesar Rp5.185.826.103,65.
- c. Pendapatan lain-lain PAD yang sah di RSUD 45 Kuningan sebesar Rp104.463.307,78.

Rincian perhitungan Pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada Lampiran 25.

6.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp270.454.140.741,37 dapat dirinci per jenis utang belanja sebagai berikut:

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	76.512.580.667,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	72.894.622.013,58
3	Utang Belanja Modal	121.046.938.060,79
Jumlah		270.454.140.741,37

Utang Belanja Pegawai pada Tahun 2023 sebesar Rp76.512.580.667,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Iuran BPJS 4%	46.656.201.373,00
2	Insentif Pemungut Pajak	1.067.481.037,00
3	TPP bulan Oktober, Nopember dan Desember 2023	28.496.898.257,00
4	Pegawai BLUD	292.000.000,00
Jumlah		76.512.580.667,00

Untuk utang Iuran BPJS 4% sebesar Rp46.656.201.373,00 diakui sebagai utang berdasarkan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terkait batas tertinggi perhitungan Iuran Wajib 4% adalah sebesar Rp12.000.000,00, dimana dalam ketentuan tersebut berlaku surut.

Sedangkan untuk Insentif Pemungut Pajak sebesar Rp1.067.481.037,00 diakui sebagai utang berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 27 Tahun 2020 Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Besaran dan Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan.

Utang Tambahan Penghasilan Pegawai diakui sebagai utang selama 3 bulan yaitu bulan Oktober, Nopember dan Desember 2023 sebesar Rp28.496.898.257,00, dimana dalam APBD Tahun 2023 baru dianggarkan 9 bulan.

Utang pegawai BLUD diakui sebagai utang sebesar Rp292.000.000,00 dan merupakan kewajiban tahun 2023 yang dianggarkan kembali di tahun 2024.



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian Utang belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp72.894.622.013,58 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Jamkesda pada Dinas Kesehatan ke Rumah Sakit Swasta, RSUD 45, RSUD Linggajati, Utang Obat, dan Jasa Pelayanan	6.135.535.647,00
2	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan dan Utang Obat pada RSUD 45 Kuningan	29.447.114.127,00
3	Utang Jasa Pelayanan, utang Obat, Bahan Lab dan Lain-Lain di RSUD Linggajati	7.984.992.253,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Non ASN di Bapenda	243.823.096,00
5	Utang Belanja Barang dan Jasa atas kegiatan Tahun 2023	784.954.674,00
6	Utang SKPD atas kegiatan Tahun 2023 (tunda bayar).	28.298.202.216,58
Jumlah		72.894.622.013,58

Berikutnya yaitu Utang Belanja Modal Tahun 2023 sebesar
Rp121.046.938.060,79 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Belanja Modal Tanah	23.156.240,00
2	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	491.156.000,00
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.431.258.470,79
4	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.369.927.350,00
7	KDP	116.731.440.000,00
Jumlah		121.046.938.060,79

Rincian Utang Belanja per SKPD pada lampiran 26.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, nilai utang belanja di Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp25.418.899.866,25 seperti dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

No	Uraian	31-Des-2023	31-Des-2022	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Utang Belanja	270.454.140.741,37	245.035.240.875,12	25.418.899.866,25	10,37
	Jumlah	270.454.140.741,37	245.035.240.875,12	25.418.899.866,25	10,37

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kenaikan nilai utang belanja sangat tinggi hingga mencapai 10,37%. Utang ini terjadi karena pada akhir bulan Desember 2023 dimana pada saat itu kegiatan-kegiatan telah selesai dilaksanakan dan diajukan untuk pembayarannya, namun pada saat itu pula ketersediaan kas di Kas Daerah tidak mencukupi untuk dilaksanakan pembayaran.



6.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.487.569.862,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	Rp	%
1	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.487.569.862,00	9.237.569.862,00	(3.750.000.000,00)	(40,60)
	Jumlah	5.487.569.862,00	9.237.569.862,00	(3.750.000.000,00)	(40,60)

Utang jangka pendek pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.750.000.000,00 jika dibanding dengan utang jangka pendek tahun 2022. Penyebabnya adalah dikarenakan adanya pembayaran cicilan pengembalian kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Utang Jangka Pendek lainnya tahun 2023 merupakan utang atas pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Utang tersebut dicatat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-BPKAD/2022 Tentang Penetapan Sisa Bantuan Keuangan.

6.3.3 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.786.056.523.854,45 atau mengalami kenaikan sebesar Rp128.658.181.329,52 dari nilai ekuitas Per 31 Desember 2022. Rincian ekuitas dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	URAIAN	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022	Bertambah/ Berkurang	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Ekuitas	2.786.056.523.854,45	2.657.398.342.524,93	128.658.181.329,52	4,84
	Jumlah	2.786.056.523.854,45	2.657.398.342.524,93	128.658.181.329,52	4,84

Penjelasan lebih rinci mengenai Ekuitas dapat dilihat pada penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan ekuitas.

6.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

6.4.1. PENDAPATAN – LO

Pendapatan – LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.538.361.396.645,66. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp68.995.491.653,04 jika dibandingkan dengan tahun 2022 seperti terlihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Penambah/ Pengurang (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	364.218.641.438,66	341.333.691.836,95	22.884.949.601,71	6,70
2.	Pendapatan Transfer-LO	2.152.141.652.469,00	2.015.081.249.358,00	137.060.403.111,00	6,80
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	22.001.102.738,00	112.950.963.797,67	(90.949.861.059,67)	(80,52)
	Jumlah	2.538.361.396.645,66	2.469.365.904.992,62	68.995.491.653,04	2,79



6.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah - LO TA 2023 sebesar Rp351.930.008.106,66, yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Penambah/ Pengurang (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah-LO				
a	Pendapatan Pajak Daerah – LO	125.349.103.591,30	110.759.877.744,37	14.589.225.846,93	13,17
b	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	79.661.720.559,35	66.187.356.683,70	13.474.363.875,65	20,36
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	1.371.024.337,07	7.138.783.168,00	(5.767.758.830,93)	(80,79)
d	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	157.836.792.950,94	157.247.674.240,88	589.118.710,06	0,37
	Jumlah	364.218.641.438,66	341.333.691.836,95	22.884.949.601,71	6,70

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah-LO di tahun 2023 sebesar Rp22.884.949.601,71. Kenaikan tertinggi adalah Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp14.589.225.846,93. Menyusul berikutnya adalah Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Berikut penjelasan dari masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah-LO

6.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp125.349.103.591,30. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	Pendapatan Pajak Daerah-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang belum diterima Kas nya (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Pendapatan Pajak Daerah – LO	122.612.598.317	1.245.005.665,80	125.466.028.542,00	1.361.930.616,50	122.612.598.317,00	125.349.103.591,30

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp122.612.598.317,00 adalah Pajak yang telah diterima oleh Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2023;
- Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA sebesar Rp1.245.005.665,80 merupakan penambah berupa pendapatan pajak reklame diterima dimuka tahun 2022;
- Pendapatan-LO yang belum diterima kasnya sebesar Rp125.466.028.542,00 merupakan penambahan berupa Piutang Pajak Daerah tahun 2023;
- Belum diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp1.361.930.616,50 adalah pengurang berupa Pendapatan Pajak Reklame Diterima Dimuka tahun 2023;



- e. Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp122.612.598.317,00 merupakan pengurang berupa penerimaan pembayaran Piutang Pajak Daerah Tahun 2022.

Adapun rincian dari Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	%
	Pajak Daerah – LO				
1	Pajak Hotel	4.830.607.309,00	4.268.443.654,00	562.163.655,00	13,17
2	Pajak Restoran	14.584.089.541,00	11.511.274.537,00	3.072.815.004,00	26,69
3	Pajak Hiburan	1.919.456.406,00	1.527.264.580,00	392.191.826,00	25,68
4	Pajak Reklame	3.422.858.543,30	4.798.498.043,37	(1.375.639.500,07)	(28,67)
5	Pajak Penerangan Jalan	29.990.734.447,00	28.617.267.651,00	1.373.466.796,00	4,80
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.575.652.000,00	429.620.274,00	2.146.031.726,00	499,52
7	Pajak Parkir	540.427.012,00	178.884.544,00	361.542.468,00	202,11
8	Pajak Air Tanah	733.055.586,00	2.343.110.910,00	(1.610.055.324,00)	(68,71)
9	Pajak Bumi dan Bangunan	45.915.517.563,00	36.122.586.980,00	9.792.930.583,00	27,11
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.836.705.184,00	20.962.926.571,00	(126.221.387,00)	(0,60)
	Jumlah Pajak Daerah – LO	125.349.103.591,30	110.759.877.744,37	14.589.225.846,93	13,17

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022, maka terdapat peningkatan nilai Pendapatan Pajak daerah-LO pada hampir seluruh akun Pajak Daerah-LO di Tahun 2023 sebesar Rp14.589.225.846,93. Namun selain dari itu, terdapat tiga pajak daerah yang mengalami penurunan, yaitu pajak reklame, air tanah dan BPHTB.

6.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.661.720.559,35 dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LO yang belum diterima Kas nya (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	55.688.506.176,00	14.554.951.264,00	52.980.912.714,00	5.185.826.103,65	38.376.823.491,00	79.661.720.559,35

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.373.087.227,35 diperoleh dari:

- Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA merupakan penerimaan retribusi yang telah diterima di kas daerah selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp55.688.506.176,00;
- Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA sebesar Rp14.554.951.264,00 merupakan penambah pendapatan LO berupa retribusi diterima dimuka dari sewa Pertokoan Siliwangi tahun 2022;
- Belum diakui sebagai Pendapatan-LO merupakan penambahan Pendapatan Piutang Retribusi sebesar Rp52.980.912.714,00;



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- d. Pendapatan-LO yang belum diterima Kasnya merupakan Pendapatan Retribusi diterima dimuka Tahun 2023 sebesar Rp5.185.826.103,65.
- e. Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp38.376.823.491,00 merupakan piutang Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2023.

Adapun rincian dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	%
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO				
a	Retribusi Pelayanan Umum	44.348.031.035,00	55.690.338.024,66	(11.342.306.989,66)	(20,37)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	40.952.132.985,00	52.916.827.574,66	(11.964.694.589,66)	(22,61)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	610.439.000,00	491.105.000,00	119.334.000,00	24,30
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	573.340.000,00	170.125.000,00	403.215.000,00	237,01
4	Retribusi Pelayanan Pasar	533.868.550,00	490.223.450,00	43.645.100,00	8,90
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	558.750.000,00	629.505.000,00	(70.755.000,00)	(11,24)
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	18.892.500,00	13.350.000,00	5.542.500,00	41,52
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	54.880.000,00	44.104.000,00	10.776.000,00	24,43
8	Retribusi Pelayanan Pendidikan	7.560.000,00	7.910.000,00	(350.000,00)	(4,42)
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.038.168.000,00	927.188.000,00	110.980.000,00	11,97
b	Retribusi Jasa Usaha	33.478.292.157,35	5.834.088.121,04	27.644.204.036,31	473,84
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.385.831.657,35	5.146.811.121,04	27.239.020.536,31	529,24
11	Retribusi Terminal	108.000.000,00	116.985.000,00	(8.985.000,00)	(7,68)
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	334.850.000,00	-	334.850.000,00	-
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	31.516.500,00	28.894.000,00	2.622.500,00	9,08
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	557.714.000,00	504.051.000,00	53.663.000,00	10,65
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	60.380.000,00	37.347.000,00	23.033.000,00	61,67
c	Retribusi Perijinan Tertentu	1.835.397.367,00	4.662.930.538,00	(2.827.533.171,00)	(60,64)
16	IMB	1.787.297.367,00	4.599.195.038,00	(2.811.897.671,00)	(61,14)
17	Ijin Trayek	48.100.000,00	63.735.500,00	(15.635.500,00)	(24,53)
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	79.661.720.559,35	66.187.356.683,70	13.474.363.875,65	20,36

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbandingan antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dengan Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp13.474.363.875,65 atau 20,36%. Kenaikan tersebut sangat dipengaruhi dari Retribusi Jasa Usaha berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.



6.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan-LO selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.371.024.337,07 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang belum diterima Kas nya (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	6.674.861.370,00	-	-	-	5.303.837.032,93	1.371.024.337,07

Berdasarkan tabel di atas, nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diperoleh dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp6.674.861.370,00 yang merupakan Bagian Laba yang disetorkan ke kas daerah, dikurangi selisih perhitungan nilai investasi dengan Laporan Keuangan BUMD sebesar Rp5.303.837.032,93.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp5.767.758.830,93. Rincian penurunan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Penambah/Pengurangan (Rp)	%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO				
1	Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (Bank Kuningan)	3.203.634.482,00	1.798.805.815,00	1.404.828.667,00	78,10
2	PT Lembaga Keuangan Mikro Kuningan	(1.098.927.638,00)	-	(1.098.927.638,00)	-
3	Perusahaan Air Minum Tirta Kemuning	258.417.320,00	2.303.036.047,00	(2.044.618.727,00)	(88,78)
4	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan	(3.962.891.105,93)	-	(3.962.891.105,93)	-
5	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	2.970.791.279,00	3.036.941.306,00	(66.150.027,00)	(2,18)
	JUMLAH	1.371.024.337,07	7.138.783.168,00	(5.767.758.830,93)	(80,79)



Berdasarkan data pada tabel di atas, pada tahun 2023 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp5.767.758.830,93. Penurunan tersebut disebabkan pada tahun ini nilai ekuitas BUMD khususnya PT. Lembaga Keuangan Mikro dan Perumda Aneka Usaha mengalami kerugian. Sehingga hal tersebut menyebabkan turunnya nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO.

6.4.1.1.4. Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

Nilai Lain-lain PAD yang Sah – LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp157.836.792.950,94 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LO yang belum diterima Kasnya (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah – LO	165.394.216.540,00	-	11.110.678.801,24	-	18.668.102.390,30	157.836.792.950,94

Berdasarkan tabel diatas, dapat jelaskan bahwa Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- a. Pendapatan LRA sebesar Rp165.394.216.540,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Penerimaan LRA Tahun 2023
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.062.593.973,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	7.346.363.183,00
3	Jasa Giro	1.766.964.697,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	18.136.900,00
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	325.476.419,00
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	15.204.265,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	4.953.985.894,00
8	Pendapatan BLUD	105.524.787.104,00
9	Dana Kapitasi FKTP JKN	44.380.704.105,00
	Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah – LO	165.394.216.540,00

- b. Belum diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp11.110.678.801,24 yaitu penambahan piutang tahun 2023 yang terdiri dari:

No.	Uraian	SKPD	Penambahan
1	Hasil Kerja Sama Daerah	Bapenda	6.009.081.277,00
2	Bagian Lancar TGR	BPKAD	275.226.987,04
3	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Bapenda	324.365.819,00
4	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Bapenda	934.440,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5	Pendapatan BLUD	RSUD 45	4.352.410.761,00
6	Piutang dari Pengembalian	BPKAD	9.215.377,00
7	Pendapatan diterima dimuka	BLUD	139.444.140,20
	JUMLAH		11.110.678.801,24

- c. Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO merupakan Pengurangan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp18.668.102.390,30 yaitu pembayaran piutang yang terdiri dari:

No.	Uraian	SKPD	Pengurangan
1	Hasil Kerja Sama Daerah	Bapenda	7.346.363.183,00
2	Bagian Lancar TGR	BPKAD	33.462.142,09
3	Tagihan Jangka Panjang TGR	BPKAD	391.182.024,43
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Bapenda	325.476.419,00
5	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Bapenda	934.440,00
6	Piutang dari Pengembalian	BPKAD	24.221.040,00
7	Pendapatan BLUD	RSUD 45	10.441.999.834,00
8	Pendapatan diterima dimuka		104.463.307,78
	JUMLAH		18.668.102.390,30

Dalam pengurang nilai Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah dari BLUD RSUD 45 Kuningan terdapat piutang Jamkesda sebesar Rp2.107.057.389,00 dari Dinas Kesehatan. Namun piutang tersebut tidak dimunculkan dalam LK Pemda dikarenakan piutang tersebut merupakan piutang antar SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, nilai Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp589.118.710,06 Seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp	%
Lain-Lain PAD yang Sah - LO	157.836.792.950,94	157.247.674.240,88	589.118.710,06	0,37
Jumlah	157.836.792.950,94	157.247.674.240,88	589.118.710,06	0,37

6.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.152.141.652.469,00. Adapun rinciannya sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
	Pendapatan Transfer – LO				
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan -LO	1.789.224.224.200,00	1.765.030.674.857,00	24.193.549.343,00	1,37



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
2	Transfer Pemerintah Provinsi – LO	362.917.428.269,00	250.050.574.501,00	112.866.853.768,00	45,14
	Jumlah	2.152.141.652.469,00	2.015.081.249.358,00	137.060.403.111,00	6,80

Pada Tabel di atas terlihat bahwa nilai pendapatan Transfer LO Tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp137.060.403.111,00 atau 6,80%.

Berikut rincian Pendapatan Transfer LO per 31 Desember 2023:

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA yang belum diterima Kas nya (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Pendapatan Transfer - LO	2.486.364.664.961,00	-	30.368.886.677,00	-	364.591.899.169,00	2.152.141.652.469,00

Berdasarkan tabel diatas dapat jelaskan hal sebagai berikut:

- Pendapatan LRA sebesar Rp2.486.364.664.961,00
- Belum diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp30.368.886.677,00 merupakan penambah piutang transfer pemerintah provinsi Rp5.165.445.265,00, piutang transfer pemerintah pusat sebesar 6.339.966.412,00 dan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp18.863.475.000,00
- Pendapatan LRA yang tidak diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp364.591.899.169,00 terdiri dari Dana Desa sebesar Rp352.599.938.000,00 yang tidak dicatat sebagai pendapatan LO sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 21, Penerimaan TDF Tahun 2022 sebesar Rp7.876.826.944,00 dan pengurang piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi sebesar Rp4.115.134.225,00

6.4.1.3. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp22.001.102.738,00. Perbandingan dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah/(Berkurang)	
	(Rp)	(Rp)	Rp	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	22.001.102.738,00	112.950.963.797,67	(90.949.861.059,67)	(80,52)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO	22.001.102.738,00	112.950.963.797,67	(90.949.861.059,67)	(80,52)



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penurunan nilai Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO di tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terdiri dari Pendapatan Hibah LO.

Nilai Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding Tahun 2022 sebesar Rp90.949.861.059,67 atau senilai 80,52%. Rincian dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LO yang belum diterima Kas nya (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	5.287.120.850,00	16.713.981.888,00	-	-	-	22.001.102.738,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- Pendapatan LRA sebesar Rp5.287.120.850,00 adalah pendapatan Hibah Pusat
- Pendapatan LO yang tidak diakui sebagai pendapatan LRA adalah penerimaan hibah berupa aset, terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Hibah Aset Tanah	10.375.805.000,00
2	Hibah Peralatan Mesin	1.903.520.888,00
3	Hibah Gedung Bangunan	4.429.035.000,00
4	Hibah Aset Tak Berwujud	5.621.000,00
	JUMLAH	16.713.981.888,00

6.4.2. BEBAN-LO

Beban-LO Pemerintah Kabupaten Kuningan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.397.576.593.680,79 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
2	BEBAN –LO				
2.1	Beban Operasi – LO	2.248.038.547.709,79	2.352.175.042.225,90	(104.136.494.516,11)	(4,43)
2.2	Beban Transfer – LO	143.796.548.571,00	150.762.565.450,00	(6.966.016.879,00)	(4,62)
2.3	Defisit Non Operasional	-	10.279.991.063,70	(10.279.991.063,70)	(100,00)
2.4	Beban Luar Biasa – LO	5.741.497.400,00	11.870.504.527,00	(6.129.007.127,00)	(51,63)
	Jumlah	2.397.576.593.680,79	2.525.088.103.266,60	(127.511.509.585,81)	(5,05)



Berdasarkan tabel tersebut, bila dibandingkan dengan nilai Beban LO tahun 2022, secara keseluruhan nilai Beban LO Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp127.511.509.585,81 atau 5,05%.

6.4.2.1. Beban Operasi

Beban operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.248.038.547.709,79, yang terdiri dari :

6.4.2.1.1. Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai-LO Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.202.474.996.220,00. Terdapat peningkatan nilai beban pegawai di tahun 2023 sebesar Rp30.347.801,00.

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
2	BEBAN OPERASI-LO				
2.1	Beban Operasi – LO	1.202.474.996.220,00	1.202.444.648.419,00	30.347.801,00	0,00

Rincian Beban Pegawai LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Belanja-LRA (Rp)	Reklas Beban dari Aset Tetap (Rp)	Beban diluar Belanja LRA (Rp)	Beban yang Belum dibayar (Rp)	Belum diakui sebagai Beban (Rp)	Belanja LRA yang Tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7=2+3+4+5-6-7
Beban Pegawai LO	1.236.027.150.638,00	-	-	76.512.580.667,00	-	110.064.735.085,00	1.202.474.996.220,00

Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja LRA sebesar Rp1.236.027.150.638,00
- Beban yang Belum dibayar sebesar Rp76.512.580.667,00 adalah Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 yang terdiri dari:
 - Utang iuran jaminan kesehatan BPJS 1% dan 4% sebesar Rp46.656.201.373,00
 - Utang Insentif pemungut pajak sebesar Rp1.067.481.037,00
 - Utang Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Oktober, Nopember dan Desember tahun 2023 sebesar Rp28.496.898.257,00
 - Utang Jasa Pelayanan RSUD45 Kuningan sebesar Rp292.000.000,00
- Belanja LRA yang Tidak Diakui sebagai Beban sebesar Rp110.064.735.085,00 adalah Utang Belanja Pegawai Tahun 2022 yang terdiri dari:
 - Utang iuran jaminan kesehatan BPJS 1% dan 4% tahun 2022 sebesar Rp39.655.124.947,00 yang masih belum dibayar sampai dengan tahun 2023;



- Insentif Pemungut Pajak Triwulan ke 4 TA 2022 sebesar Rp1.237.111.468,00 yang sudah lunas dibayar;
- TPP Tahun 2022 sebesar Rp30.185.708.970,00 yang sudah lunas dibayar;
- Utang Tunjangan Profesi Guru Tahun 2022 sebesar Rp38.986.789.700,00 yang sudah lunas dibayar.

Rincian Beban Pegawai LO per SKPD terdapat pada lampiran 27.

6.4.2.1.2 Beban Barang / Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp251.510.459.997,09. Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Belanja-LRA (Rp)	Reklas Beban dari Aset Tetap & Lainnya (Rp)	Beban diluar Belanja LRA (Rp)	Beban yang Belum dibayar	Reklas Beban ke Aset Tetap & Lainnya (Rp)	Belanja LRA yang Tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9=2+3+4+5-6-7
Beban Persediaan LO	244.297.513.759,00	1.543.564.345,00	32.280.565.164,48	28.117.253.822,00	30.000.000,00	54.698.437.093,39	251.510.459.997,09

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja LRA sebesar Rp244.297.513.759,00 merupakan belanja barang tahun 2023
2. Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.543.564.345,00 yang menambah beban persediaan.
3. Beban diluar Belanja LRA sebesar Rp32.280.565.164,48 merupakan persediaan tahun 2022
4. Beban yang Belum dibayar merupakan penambah utang belanja barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp28.117.253.822,00
5. Reklas Beban ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp30.000.000,00
6. Belanja LRA yang tidak diakui sebagai Beban sebesar Rp54.698.437.093,39 merupakan penambah persediaan sebesar Rp33.196.875.285,39 dan utang belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp21.501.561.808,00.

Jika dibandingkan dengan Beban Persediaan-LO tahun 2022, terdapat penurunan nilai sebesar Rp9.152.451.548,18 atau 3,51%.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Barang	251.510.459.997,09	260.662.911.545,27	(9.152.451.548,18)	(3,51)
	JUMLAH	251.510.459.997,09	260.662.911.545,27	(9.152.451.548,18)	(3,51)



6.4.2.1.3 Beban Jasa

Nilai Beban Jasa pada Tahun 2023 adalah Rp157.212.572.808,68. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp91.652.488.238,67 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Jasa	157.212.572.808,68	248.865.061.047,35	(91.652.488.238,67)	(36,83)
	JUMLAH	157.212.572.808,68	248.865.061.047,35	(91.652.488.238,67)	(36,83)

6.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan – LO tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.451.776.012,00 yang mengalami penurunan 76,81% dari tahun 2022 sebesar Rp11.434.704.779,00.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Pemeliharaan	3.451.776.012,00	14.886.480.791,00	(11.434.704.779,00)	(76,81)
	JUMLAH	3.451.776.012,00	14.886.480.791,00	(11.434.704.779,00)	(76,81)

6.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.130.567.343,00 mengalami penurunan sebesar 53,64% dari tahun sebelumnya, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Perjalanan Dinas	30.130.567.343,00	64.990.197.476,00	(34.859.630.133,00)	(53,64)
	JUMLAH	30.130.567.343,00	64.990.197.476,00	(34.859.630.133,00)	(53,64)

6.4.2.1.6 Beban untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Nilai Beban untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat pada tahun 2023 adalah Rp5.413.510.330,46. Nilai tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan nilai beban tahun 2022 sebesar Rp21.184.637.640,66 atau 79,65%.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.413.510.330,46	26.598.147.971,12	(21.184.637.640,66)	(79,65)
	JUMLAH	5.413.510.330,46	26.598.147.971,12	(21.184.637.640,66)	(79,65)

6.4.2.1.7 Beban Barang dan Jasa BOS

Beban barang dan jasa BOS tahun 2023 adalah Rp116.773.864.788,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.572.312.790,00, seperti terlihat pada tabel berikut ini:



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Barang dan Jasa BOS	116.773.864.788,00	115.201.551.998,00	1.572.312.790,00	1,36
	JUMLAH	116.773.864.788,00	115.201.551.998,00	1.572.312.790,00	1,36

6.4.2.1.8 Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp166.285.437.656,00. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp52.079.673.753,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 atau senilai 45,60%.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	166.285.437.656,00	114.205.763.903,00	52.079.673.753,00	45,60
	JUMLAH	166.285.437.656,00	114.205.763.903,00	52.079.673.753,00	45,60

6.4.2.1.9 Beban Bunga

Beban Bunga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.619.236.622,00. Sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat beban bunga seperti terlihat pada tabel.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Bunga	2.619.236.622,00	-	2.619.236.622,00	-
	JUMLAH	2.619.236.622,00	-	2.619.236.622,00	-

6.4.2.1.10 Beban Subsidi-LO

Pada Tahun 2023 tidak terdapat beban subsidi sehingga Beban Subsidi LO tahun 2023 adalah nihil. Berbeda dengan tahun 2022 yang terdapat beban subsidi di senilai Rp1.408.740.156,00, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Subsidi-LO	-	1.408.740.156,00	(1.408.740.156,00)	(100,00)
	JUMLAH	-	1.408.740.156,00	(1.408.740.156,00)	(100,00)

6.4.2.1.11 Beban Hibah-LO

Beban Hibah-LO TA 2023 sebesar Rp90.508.065.750,00, nilai Beban Hibah LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.314.391.085,00 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Hibah-LO	90.508.065.750,00	84.193.674.665,00	6.314.391.085,00	7,50
	JUMLAH	90.508.065.750,00	84.193.674.665,00	6.314.391.085,00	7,50

Rincian dari nilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian	Belanja-LRA (Rp)	Reklas Beban dari Aset Tetap & Lainnya (Rp)	Beban diluar Belanja LRA (Rp)	Beban yang Belum dibayar (Rp)	Reklas Beban ke Aset Tetap & Lainnya (Rp)	Belum diakui sebagai Beban (Rp)	Belanja LRA yang Tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+3+4+5-6-7-8
Beban Hibah - LO	83.430.575.750,00	7.077.490.000,00	-	-	-	-	-	90.508.065.750,00

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan hal berikut ini:

- Belanja LRA merupakan relisasi belanja hibah sebesar Rp83.430.575.750,00
- Reklas Beban dari Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp7.077.490.000,00 yang terdiri dari Rp2.768.590.000,00 merupakan reklas dari aset lainnya berupa aset pemindahtanganan yang dihibahkan ke Desa dan instansi vertikal lainnya, dan Hibah Aset Gedung Bangunan ke 22 Satuan Pendidikan Swasta.

6.4.2.1.12 Beban Bantuan Sosial -LO

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.492.525.000,00 sesuai dengan nilai Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023. Rincian dari Beban Bantuan Sosial tersebut antara lain:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	5.266.525.000,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.176.000.000,00
Jumlah		9.492.525.000,00

Beban bantuan sosial ini berupa bantuan uang maupun barang untuk pengobatan, alat bantu, bahan pertanian dan peternakan, bantuan sosial untuk program rutilahu dan sebagainya.

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.337.922.000,00 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau sebesar 16,41%, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Bansos-LO	9.492.525.000,00	8.154.603.000,00	1.337.922.000,00	16,41
JUMLAH		9.492.525.000,00	8.154.603.000,00	1.337.922.000,00	16,41

6.4.2.1.13 Beban Penyusutan – LO

Beban penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp201.655.540.853,44 yaitu beban penyusutan aset tetap. Rincian Beban Penyusutan Tahun 2023 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Peralatan Dan Mesin	105.623.758.871,10
2	Gedung Dan Bangunan	29.994.499.656,97



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
3	Jalan Jaringan Irigasi dan Jaringan	66.037.282.325,37
Jumlah		201.655.540.853,44

Pada Tahun 2023 Beban penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp1.051.161.004,44 bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2022. Berikut tabel perbandingan Beban Penyusutan LO Tahun 2023 dengan Tahun 2022:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Penyusutan-LO	201.655.540.853,44	200.604.379.849,00	1.051.161.004,44	0,52
JUMLAH		201.655.540.853,44	200.604.379.849,00	1.051.161.004,44	0,52

6.4.2.1.14 Beban Amortisasi - LO

Beban amortisasi Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp708.156.805,25 yaitu beban penyusutan aset tak berwujud. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, Beban Amortisasi mengalami penurunan sebesar Rp269.750.999,75. Berikut tabel perbandingan Beban Penyusutan LO Tahun 2023 dengan Tahun 2022:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Penyusutan-LO	708.156.805,25	977.907.805,00	(269.750.999,75)	(27,58)
JUMLAH		708.156.805,25	977.907.805,00	(269.750.999,75)	(27,58)

Penurunan beban amortisasi tersebut dikarenakan adanya koreksi atas aset tak berwujud pada dinas komunikasi dan informatika yaitu belanja lisensi *zoom*, yang semula belanja modal Aset Tak Berwujud direklas menjadi Belanja Jasa Sewa Lisensi.

6.4.2.1.15 Beban Penyisihan Piutang

Jumlah beban penyisihan piutang Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.974.084.433,87. Beban Penyisihan Piutang ini mengalami kenaikan sebesar Rp191.900.882,71 di Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan Piutang dan nilai umur piutang. Perbandingan beban penyisihan piutang tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Penyisihan Piutang	1.974.084.433,87	1.782.183.551,16	191.900.882,71	10,77
JUMLAH		1.974.084.433,87	1.782.183.551,16	191.900.882,71	10,77

Rincian atas beban tersebut dapat dilihat pada lampiran 28.

6.4.2.1.16 Beban Lain-lain - LO

Beban Lain-Lain-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.827.753.090,00. Perlu kami jelaskan bahwa Beban Lain-Lain-LO Tahun



2023 merupakan beban yang timbul akibat dari adanya reklasifikasi dari belanja modal ke aset ekstrakomtable.

Aset ekstrakomtable merupakan aset yang tidak dapat ditampilkan di neraca karena secara kapitalisasi tidak dapat dikategorikan sebagai aset dan secara masa manfaat juga tidak bisa dikategorikan sebagai barang pakai habis. Oleh karena itu, aset ekstrakomtable dicatat sebagai beban lain-lain LO.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Penyisihan Piutang	7.827.753.090,00	7.198.790.049,00	628.963.041,00	8,74
	JUMLAH	7.827.753.090,00	7.198.790.049,00	628.963.041,00	8,74

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 nilai beban lain-lain LO naik sebesar Rp628.963.041,00 atau 8,74, %.

6.4.2.2 Beban Transfer - LO

Beban Transfer-LO Tahun 2023 sebesar Rp143.796.548.571,00. Rincian Beban Transfer LO tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Belanja-LRA (Rp)	Reklas Beban dari Aset Tetap & Lainnya (Rp)	Beban diluar Belanja LRA (Rp)	Beban yang Belum dibayar	Reklas Beban ke Aset Tetap & Lainnya (Rp)	Belum diakui sebagai Beban (Rp)	Belanja LRA yang Tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+3+4+5-6-7-8
Beban Transfer-LO	496.396.486.571,00	-	-	-	-	-	352.599.938.000,00	143.796.548.571,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Beban Transfer sebesar Rp143.796.548.571,00 diperoleh dari nilai LRA sebesar Rp496.396.486.571,00 dikurangi Dana Desa sebesar Rp352.599.938.000,00. Beban Dana Desa tidak dicatat di Laporan Operasional dikarenakan bukan merupakan beban operasional langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, melainkan beban operasional Pemerintah Desa.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terdapat penurunan beban transfer sebesar Rp6.966.016.879,00 seperti pada tabel berikut ini:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Transfer-LO	143.796.548.571,00	150.762.565.450,00	(6.966.016.879,00)	(4,62)
	JUMLAH	143.796.548.571,00	150.762.565.450,00	(6.966.016.879,00)	(4,62)

Beban Transfer terdiri dari:

- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp18.185.397.238,00
- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp125.611.151.333,00



6.4.2.3 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional per 31 Desember 2023 adalah tidak terdapat defisit non operasional. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat defisit non operasional sebesar Rp10.279.991.063,70 seperti terlihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Defisit Non Operasional	-	10.279.991.063,70	(10.279.991.063,70)	(100,00)
	JUMLAH	-	10.279.991.063,70	(10.279.991.063,70)	(100,00)

Defisit Non Operasional tersebut merupakan penurunan nilai ekuitas investasi pada BUMD karena terdapat beberapa BUMD yang mengalami kerugian. Sedangkan pada Laporan Keuangan tahun 2023 nilai ekuitas investasi pada BUMD dicatat sebagai pengurang nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah-LO.

6.4.2.4 Beban Luar Biasa

Untuk Tahun 2023 terdapat beban untuk Pos Luar Biasa sebesar Rp5.741.497.400,00. Beban tersebut berupa bantuan untuk bencana alam yang terjadi pada Tahun 2023 di kabupaten Kuningan, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan dan lainnya.

Selain itu terdapat pula pengeluaran berupa pembayaran cicilan pengembalian Sisa Dana Bantuan Provinsi Tahun 2015-2022 sebesar Rp3.750.000.000,00. Nilai pembayaran cicilan tersebut menjadi pengurang beban luar biasa LO. Sehingga dari Realisasi Belanja Tidak Tidak Terduga LRA sebesar Rp9.491.497.400,00 dikurangi nilai pengembalian Sisa Bantuan Provinsi sebesar Rp3.750.000,00, maka nilai beban luar biasa LO menjadi sebesar Rp5.741.497.400,00.

Rincian dari Beban Luar biasa dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Beban Luar Biasa	5.741.497.400,00	11.870.504.527,00	(6.129.007.127,00)	(51,63)
	JUMLAH	5.741.497.400,00	11.870.504.527,00	(6.129.007.127,00)	(51,63)

Pada laporan operasional, Beban Luar Biasa mengalami penurunan nilai sebesar Rp6.129.007.127,00 jika dibanding dengan realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2022.

6.4.2.5 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp140.784.802.964,87. Laporan Operasional TA 2023 mengalami Surplus disebabkan oleh nilai beban LO lebih kecil dari nilai pendapatan LO. Jika dibanding dengan tahun 2022 nilai surplus/defisit LO mengalami kenaikan signifikan dikarenakan pada tahun 2022 Laporan Operasional mengalami defisit. Gambaran hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Surplus/Defisit LO	140.784.802.964,87	(55.722.198.273,98)	196.507.001.238,85	(352,65)



6.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

6.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp264.526.050.304,00. Untuk Tahun 2023, gambaran aktivitas operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Arus Masuk Kas	2.842.021.968.214,00	2.679.667.713.075,66	162.354.255.138,34	6,06
2	Jumlah Arus Keluar Kas	2.577.495.917.910,00	2.478.658.717.147,00	98.837.200.763,00	3,99
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	264.526.050.304,00	201.008.995.928,66	63.517.054.375,34	31,60

6.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.842.021.968.214,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.679.667.713.075,66 maka terdapat kenaikan sebesar Rp162.354.255.138,34. Berikut merupakan rincian dari arus masuk kas aktivitas Operasi.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	122.612.598.317,00	107.678.513.745,00	14.934.084.572,00	13,87
2	Penerimaan Retribusi Daerah	55.688.506.176,00	77.253.777.415,66	(21.565.271.239,66)	(27,91)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.674.861.370,00	7.138.783.168,00	(463.921.798,00)	(6,50)
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	165.394.216.540,00	154.328.861.768,00	11.065.354.772,00	7,17
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	35.706.038.793,00	46.290.301.582,00	(10.584.262.789,00)	(22,86)
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	25.013.661.151,00	37.619.775.916,00	(12.606.114.765,00)	(33,51)
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.150.587.239.500,00	1.107.697.897.206,00	42.889.342.294,00	3,87
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	547.648.400.288,00	565.745.873.209,00	(18.097.472.921,00)	(3,20)
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	12.942.270.000,00	315.201.708.000,00	(302.259.438.000,00)	(95,89)
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	361.867.117.229,00	143.009.228.224,00	218.857.889.005,00	153,04
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	352.599.938.000,00	-	352.599.938.000,00	-
12	Penerimaan Hibah	5.287.120.850,00	9.755.148.980,00	(4.468.028.130,00)	(45,80)
13	Penerimaan Lainnya	-	107.947.843.862,00	(107.947.843.862,00)	(100,00)
	Jumlah Arus Masuk Kas	2.842.021.968.214,00	2.679.667.713.075,66	162.354.255.138,34	6,06

6.5.1.2 Arus Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus keluar dari aktivitas operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.577.495.917.910,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.478.658.717.147,00 maka terdapat kenaikan sebesar



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rp98.837.200.763,00 atau 3,99%. Adapun rinciannya dapat dijelaskan pada uraian berikut ini.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Pembayaran Pegawai	1.236.027.150.638,00	1.146.569.988.635,00	89.457.162.003,00	7,80
2	Pembayaran Barang dan Jasa	740.038.445.929,00	787.351.371.791,00	(47.312.925.862)	(6,01)
3	Pembayaran Bunga	2.619.236.622,00	-	2.619.236.622,00	-
4	Pembayaran Subsidi	-	1.408.740.156,00	(1.408.740.156,00)	(100,00)
5	Pembayaran Hibah	83.430.575.750,00	66.576.805.450,00	16.853.770.300,00	25,31
6	Pembayaran Bantuan Sosial	9.492.525.000,00	8.154.603.000,00	1.337.922.000,00	16,41
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	478.211.089.333,00	440.805.060.750,00	37.406.028.583,00	8,49
8	Pembayaran Tidak Terduga	9.491.497.400,00	11.870.504.527,00	(2.379.007.127,00)	(20,04)
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota	18.185.397.238,00	6.769.979.323,00	11.415.417.915,00	168,62
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota	-	9.151.663.515,00	(9.151.663.515,00)	(100,00)
	Jumlah Arus Keluar Kas	2.577.495.917.910,00	2.478.658.717.147,00	98.837.200.763,00	3,99

6.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini pada tahun 2023 adalah sebesar (Rp265.093.604.687,00). Berikut penjelasan arus kas dari aktivitas investasi:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
a	Arus Masuk Kas	17.400.000.000,00	-	17.400.000.000,00	-
b	Jumlah Arus Keluar Kas	282.493.604.687,00	250.356.932.839,00	32.136.671.848,00	12,84
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(265.093.604.687,00)	(250.356.932.839,00)	(14.736.671.848,00)	5,89

6.5.2.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi

Arus masuk kas aktivitas investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.400.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 Arus Kas Masuk dari Aktifitas Investasi adalah Nihil, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp17.400.000.000,00. Adapun rinciannya dapat dijelaskan pada uraian berikut ini.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
a	Pencairan Dana Cadangan	17.400.000.000,00	-	17.400.000.000,00	-
	Jumlah	17.400.000.000,00	-	17.400.000.000,00	-



6.5.2.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

Arus keluar dari aktivitas investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp282.493.604.687,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	23.500.000.000,00	15.000.000.000,00	8.500.000.000,00	56,67
2	Perolehan Tanah	11.192.050.724,00	26.751.824.467,00	(15.559.773.743,00)	(58,16)
3	Perolehan Peralatan Mesin	67.447.867.808,00	49.977.556.706,00	17.470.311.102,00	34,96
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	81.763.034.176,00	66.623.156.876,00	15.139.877.300,00	22,72
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.485.838.150,00	79.711.956.467,00	6.773.881.683,00	8,50
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.989.804.829	6.792.438.933,00	1.197.365.896,00	17,63
7	Perolehan Aset Lainnya	32.009.000,00	-	32.009.000,00	-
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.083.000.000,00	5.499.999.390,00	(1.416.999.390,00)	(25,76)
	Jumlah	282.493.604.687,00	250.356.932.839,00	32.136.671.848,00	12,84

Bila dibandingkan dengan arus keluar kas investasi tahun 2022, nilai arus kas dari aktivitas investasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp32.136.671.848,00 atau 12,84%.

6.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Sama dengan tahun 2022 yaitu nihil. Rincian dapat dilihat dari tabel berikut ini:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Arus Kas Masuk	38.986.789.700,00	-	38.986.789.700,00	-
	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	38.986.789.700,00	-	38.986.789.700,00	-
2	Arus Kas Keluar	38.986.789.700,00	-	38.986.789.700,00	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	38.986.789.700,00	-	38.986.789.700,00	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-	-

Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan terdiri dari Arus Masuk Kas berupa Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Bank (Pinjaman Jangka Pendek) sebesar Rp38.986.789.700,00. Sedangkan Arus Keluar nya berupa Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Bank (Pemabyaran Utang Jangka Pendek) sebesar Rp38.986.789.700,00.

6.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp288.512.998,52. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Catatan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Arus Kas Masuk	162.138.288.768,67	145.563.326.880,00	16.574.961.888,67	11,39
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	162.138.288.768,67	145.563.264.380,00	16.575.024.388,67	11,39
	Kas Lainnya di Bendahara FKTP	-	62.500,00	(62.500,00)	(100,00)
2	Arus Kas Keluar	161.849.775.770,15	145.203.693.338,00	16.646.082.432,15	11,46
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	161.838.928.870,15	145.203.693.338,00	16.635.235.531,15	11,46
	Koreksi Silpa	10.846.900,00	-	10.846.900,00	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	288.512.998,52	359.633.542,00	(71.120.543,48)	(19,78)

Dari uraian tabel di atas, diperoleh nilai Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp288.512.998,52. Nilai tersebut terdiri dari:

- Pemungutan PFK sebesar Rp162.138.288.768,67
- Penyetoran PFK sebesar Rp161.838.928.870,15
- Koreksi Silpa sebesar Rp10.846.900,00

6.5.5 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	264.526.050.304,00	201.008.995.928,66	63.517.054.375,34	31,60
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(265.093.604.687,00)	(250.356.932.839,00)	(14.736.671.848,00)	5,89
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-	-
4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	288.512.998,52	359.633.542,00	(71.120.543,48)	(19,78)
	Jumlah	(279.041.384,48)	(48.988.303.368,34)	48.709.261.983,86	(99,43)

Nilai Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar (Rp279.041.384,48) Nilai ini mengalami kenaikan tahun dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp48.709.261.983,86 atau senilai (99,43)%.

6.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas pada Laporan Arus Kas Tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp16.278.489.290,13. Nilai ini merupakan Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Kas di BUD	566.130.021,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	28.180.384,66
3	Kas di Bendahara Penerimaan	24.545.838,00
4	Kas di Bendahara BLUD	13.477.341.729,00
5	Kas di Bendahara JKN	1.792.619.266,47
6	Kas di Bendahara BOS	27.478.806,00
7	Kas Lainnya	362.193.245,00
	Jumlah :	16.278.489.290,13



6.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas dalam Laporan Arus Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.999.447.905,65. Nilai tersebut mengalami penurunan bila dibanding Tahun 2022 sebesar Rp279.041.384,48 seperti dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	%
1	Saldo Akhir Kas di BUD	2.101.955.329,00	566.130.021,00	1.535.825.308,00	271,28
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	45.455.966,00	28.180.384,66	17.275.581,34	61,30
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	10.882.668,00	24.545.838,00	(13.663.170,00)	(55,66)
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	13.168.966.760,13	13.477.341.729,00	(308.374.968,87)	(2,29)
5	Saldo Akhir Kas di JKN	-	1.792.619.266,47	(1.792.619.266,47)	(100,00)
6	Saldo Akhir Kas di BOS	5.736.960,00	27.478.806,00	(21.741.846,00)	(79,12)
7	Kas Lainnya berupa PFK	666.450.222,52	362.193.245,00	304.256.977,52	84,00
	JUMLAH	15.999.447.905,65	16.278.489.290,13	(279.041.384,48)	(1,71)

6.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Nilai Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.773.829.333.689,12. Rincian atas LPE dapat diuraikan dalam penjelasan per akun Laporan Perubahan Ekuitas.

6.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.657.398.342.524,93.

No	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Bertambah/ (Berkurang)	
1	Ekuitas Awal LPE	2.657.398.342.524,93	2.722.121.481.555,90	(64.723.139.030,97)	(2,38)
	Jumlah	2.657.398.342.524,93	2.722.121.481.555,90	(64.723.139.030,97)	(2,38)

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, nilai Ekuitas Awal LPE Tahun 2023 mengalami penurunan dibanding dengan nilai Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp64.723.139.030,97 atau sekitar 2,38%.

6.6.2. Surplus/Defisit LO

Surplus LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp140.784.802.964,87. Berikut adalah perbandingan surplus defisit LO Tahun 2023 dengan Tahun 2022:

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
				Rp
1	Surplus/ Defisit LO	140.784.802.964,87	(55.722.198.273,98)	196.507.001.238,85
	Jumlah	140.784.802.964,87	(55.722.198.273,98)	196.507.001.238,85

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan nilai surplus / defisit LO pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp196.507.001.238,85. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 terdapat surplus LO sedangkan pada tahun 2022 mengalami defisit LO.



6.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2023 sebesar (Rp12.126.621.635,35) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
				Rp
1	Koreksi Kas	53.314.679,00	-	53.314.679,00
2	Koreksi piutang	-	(4.053.605.308,00)	4.053.605.308,00
3	Koreksi Aset Tanah	(3.931.613.000,00)	80.190.000,00	(4.011.803.000,00)
4	Koreksi Peralatan Dan Mesin	532.569.928,00	101.620.015,00	430.949.913,00
5	Koreksi Gedung dan Bangunan	(11.261.236.313,20)	(11.896.557.193,00)	635.320.879,80
6	Koreksi Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.746.500.000,00	-	1.746.500.000,00
7	Koreksi Aset Lain-lain	(12.938.857.815,05)	(508.910.000,00)	(12.429.947.815,05)
8	Koreksi Akumulasi Penyusutan	13.145.331.305,00	7.276.321.729,00	5.869.009.576,00
9	Koreksi Penyisihan Piutang	527.369.580,90	-	527.369.580,90
	JUMLAH	(12.126.621.635,35)	(9.000.940.757,00)	(3.125.680.878,35)

Berdasarkan tabel diatas apabila dibandingkan dengan tahun 2022, nilai dampak kumulatif kesalahan/ kebijakan mendasar mengalami penurunan sebesar (Rp3.125.680.878,35). Hal tersebut disebabkan adanya koreksi atas beberapa akun aset dan kewajiban. Koreksi atas beberapa akun tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Kas sebesar Rp53.314.679,00 Terdiri dari koreksi:
 - Saldo awal BOS tahun 2022 sebesar Rp10.784.400,00 karena ada sekolah yang ditutup yaitu SMPN Satu Atap Kawung Sari sebesar Rp10.752.000,00, SDN 2 Padabeunghar sebesar Rp13.000,00 dan Koreksi Saldo awal SMPN 2 Kramatmulya sebesar Rp19.400,00. Uang tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah pada Tahun 2022, namun per 31 Desember 2022 masih tercatat sebagai Kas di BOS. Sehingga pada Tahun 2023 kas tersebut dikoreksi.
 - Saldo awal kas di Bendahara Laboratorium Kesehatan Daerah (Dinas Kesehatan) sebesar Rp62.500,00. Kas tersebut dikoreksi dikarenakan uang tersebut merupakan uang pembayaran kepada pihak ketiga atas belanja barang dan jasa yang ditransfer ulang ke rekening bendahara dikarenakan *error* sistem Bank, sehingga per 31 Desember 2022 masih tercatat sebagai sisa kas di bendahara dan menjadi saldo awal tahun 2023.
 - Koreksi bertambah Kas Lainnya pada saat *audited* dikarenakan kurang catat Kas di Bidang-Bidang pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Cigugur, dan BOS sebesar Rp491.153,00.
 - Koreksi bertambah Kas Lainnya dikarenakan kurang catat Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) sebesar Rp63.670.426,00. Kas tersebut tidak dicatat sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran karena uang tersebut merupakan uang Pihak Ketiga yaitu CV Kian Jaya Pratama.



- Koreksi aset Tanah sebesar (Rp3.931.613.000,00) yang terdiri dari:
 - Koreksi bertambah aset tanah sebesar Rp84.287.000,00 berupa Jalan Lingkungan Winduhaji – Citangtu yang berlokasi di Kecamatan Kuningan berdasarkan Dokumen Pembebasan Lahan berupa Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor : 594/151/Pem.um Tanggal 16 November 2006;
 - Koreksi berkurang aset tanah sebesar (Rp4.015.900.000,00) yaitu tanah Desa yang tercatat pada buku inventaris Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, yang dipergunakan Sekolah Dasar Negeri.
- Peralatan dan Mesin sebesar Rp532.569.928,00 Nilai ini merupakan koreksi penambahan nilai aset peralatan mesin yang disebabkan oleh:
 - Penambahan aset peralatan dan mesin yang belum tercatat sebesar Rp1.860.494.418,00 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa mobil perpustakaan keliling taman bacaan masyarakat Nopol E 1343 Z yang dipergunakan pada Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebesar Rp50.000.000,00.
 - b. 5 (lima) unit Alat berat berupa 3 (tiga) unit *vibration roller*, 1 (satu) unit *Macadan Roller/Three Wheel Roler* dan 1 (satu) unit *Crawler Excavator* yang dipergunakan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.545.494.000,00.
 - c. 6 (enam) unit sepeda motor dengan No. Polisi E 3623 Y, E 6639 Z, E 6637 Z, E 6634 Z, E 6692 Z, E 6405 Z yang dipergunakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp52.945.318,00.
 - d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Win dengan No. Polisi E 6031 Z tersebut sebelumnya digunakan eks. Kantor Kelurahan Awirarangan tahun 2003 sebesar Rp2.500.000,00.
 - e. 3 (tiga) unit kendaraan roda dua Yamaha All New X-Ride Tahun 2022 dengan No. Polisi E 2502 Z, E 2554 Z dan E 2498 Z tersebut digunakan oleh Kelurahan Winduhaji, Kelurahan Kuningan dan Kelurahan Cigugur, kendaraan tersebut diperoleh dari Kegiatan Pemberian Hadiah Desa/ Kelurahan taat pajak pada rekening Belanja yang akan diserahkan ke masyarakat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp59.555.100,00
 - f. Koreksi Kendaraan Dinas/ Operasional pada Sekretariat daerah Kabupaten Kuningan yang belum tercatat sebesar Rp150.000.000,00
 - Pengurang Aset Peralatan Mesin sebesar Rp1.327.924.490,00 yang dihapuskan karena rusak berat.
- Gedung dan Bangunan sebesar (Rp11.261.236.313,20). Nilai ini diperoleh dari:
 - Nilai koreksi bertambah sebesar Rp6.087.977.835,10 yang merupakan koreksi belum tercatat gedung bangunan diperoleh dari Bangun Guna Serah (BGS) Eks. PT Linggajati Wiguna, jangka waktu kerja sama



pemanfaatan aset antara pemerintah daerah kabupaten kuningan dengan PT Linggajati Wiguna sudah berakhir sejak tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

- Nilai koreksi berkurang sebesar Rp17.349.214.147,30 yang merupakan penghapusan aset gedung sekolah yang mendapatkan kegiatan renovasi dari Dana Alokasi Keuangan (DAK) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Koreksi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.746.500.000,00 diperoleh dari Bangun Guna Serah (BGS) Eks. PT Linggajati Wiguna, jangka waktu kerja sama pemanfaatan aset antara pemerintah daerah kabupaten kuningan dengan PT Linggajati Wiguna sudah berakhir sejak tahun 2019.
- Koreksi Aset Lain-Lain sebesar (Rp12.938.857.815,05) yaitu koreksi atas kesalahan catat, double catat dan penghapusan aset lain-lain.
- Koreksi Akumulasi penyusutan sebesar Rp13.145.331.305,00. Nilai ini merupakan nilai penyusutan aset, baik aset tetap atau aset lainnya yang dikoreksi karena kesalahan pencatatan atau belum tercatat.
- Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp527.369.580,90 yaitu koreksi atas penyisihan piutang yang telah lunas.

6.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir TA 2023 sebesar Rp2.786.056.523.854,45 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
				Rp
1	Ekuitas Akhir	2.786.056.523.854,45	2.657.398.342.524,93	128.658.181.329,52
	Jumlah	2.786.056.523.854,45	2.657.398.342.524,93	128.658.181.329,52

6.7. HAL-HAL LAIN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023

6.7.1. Pengelolaan APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2023 terdapat pengelolaan dana APBD yang diatur secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dimana proses pengelolaan dana tersebut (penerimaan dan pengeluaran) tidak melalui Rekening Kas Daerah tetapi langsung kepada Rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 37 Puskesmas di Kabupaten Kuningan. Untuk diketahui bahwa status 37 FKTP tersebut per Januari 2023 telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)



- 2) Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD'45 Kuningan yang diatur secara khusus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, dimana dana BLUD dikelola secara terpisah dari Rekening Kas Daerah.
- 3) Pengelolaan Dana BOS
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terdiri dari BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.
- 4) Pengelolaan Dana Desa
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa, Dana Desa tersebut ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat ke Rekening Kas Desa tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah. Pada Tahun 2023 Dana Desa yang bersumber dari APBN dianggarkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp352.599.938.000,00 dan terealisasi baik pendapatan maupun belanja sebesar Rp352.599.938.000,00.

6.8. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat setelah tanggal Neraca yang mengakibatkan jurnal penyesuaian pada Neraca. Kejadian tersebut antara lain yaitu Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 tanggal 17 Januari 2024, hal Penyampaian Informasi Saldo Rekening TDF. Dalam surat tersebut disampaikan saldo Rekening Lain di BI TDF TKD Kabupaten Kuningan Nomor 519000315980 pada Kantor Pusat BI per 01 Desember 2023 sampai 12 Januari 2024 sebesar Rp18.863.475.000,00. Pada Tahun 2023, Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk TDF - TKD yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF - TKD yang disediakan oleh BUN bagi pemerintah daerah. Penarikan DBH dari Rekening Lain BI TDF – TKD ke RKUD dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan setelah *holding period* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian nilai TDF TKD tersebut dilakukan jurnal penyesuaian untuk dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2023.